



TESIS

**IDENTIFIKASI PELANGGARAN ETIKA PROYEK
KONSTRUKSI DALAM LINGKUP PROYEK
KONSTRUKSI PEMERINTAH DAERAH (X).
TINJAUAN DARI PERSPEKTIF:
PEMERINTAH DAN KONTRAKTOR**

Hansen Thomas Yarisetouw
NRP. 9112202812

DOSEN PEMBIMBING
Tri Joko Wahyu Adi, S.T., M.T., Ph.D.

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN TEKNOLOGI
BIDANG KEAHLIAN MANAJEMEN PROYEK
PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2015



TESIS

THE IDENTIFICATIONS OF CONSTRUCTION PROJECT ETHICAL VIOLATIONS WITHIN THE SCOPE OF REGIONS (X) GOVERNMENT CONSTRUCTION PROJECT. REVIEW FROM PERSPECTIVES OF: THE GOVERNMENT AND CONTRACTOR

**Hansen Thomas Yarisetouw
NRP. 9112202812**

**SUPERVISOR
Tri Joko Wahyu Adi, S.T., M.T., Ph.D.**

**MAGISTER MANAGEMENT OF TECHNOLOGY
MAJORING PROJECT MANAGEMENT
POST GRADUATE PROGRAM
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2015**

**IDENTIFIKASI PELANGGARAN ETIKA PROYEK KONSTRUKSI
DALAM LINGKUP PROYEK KONSTRUKSI PEMERINTAH DAERAH (X).
TINJAUAN DARI PERSPEKTIF: PEMERINTAH DAN KONTRAKTOR**

Tesis disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Manajemen Teknologi (M.MT)

di

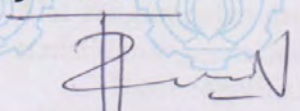
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh :


HANSEN THOMAS YARISETOUW
NRP. 9112202812

Tanggal Ujian : Senin, 20 April 2015
Periode Wisuda : September 2015

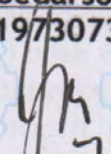
Disetujui oleh :


1. Tri Joko Wahyu Adi, S.T., M.T., Ph.D
NIP. 197404202002121003


(Pembimbing)


2. Dr. Soedarso, M.Hum
NIP. 197307312002121001

(Penguji)


3. Ir. Endah Angreni, M.T
DE002

(Penguji)


Direktur Program Pascasarjana,

Prof. Dr. Ir. Adi Soeprijanto, M.T.
NIP. 19640405 199002 1 001

IDENTIFIKASI PELANGGARAN ETIKA PROYEK KONSTRUKSI DALAM LINGKUP PROYEK KONSTRUKSI PEMERINTAH DAERAH (X). TINJAUAN DARI PERSPEKTIF: PEMERINTAH DAN KONTRAKTOR

Nama Mahasiswa : Hansen Thomas Yarisetouw
NRP : 9112202812
Dosen Pembimbing : Tri Joko Wahyu Adi, S.T., M.T., Ph.D.

ABSTRAK

Pelanggaran etika merupakan bentuk perilaku yang bertentangan dengan norma kebaikan. Praktek pelanggaran etika dalam pelaksanaan proyek konstruksi terjadi dalam bentuk penyuapan, penipuan, ketidakadilan, dan manipulasi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi serta mendeskripsikan persepsi pemerintah dan kontraktor terhadap praktek pelanggaran etika dalam lingkup proyek konstruksi pemerintah, di Daerah (X). Daerah (X) yang menjadi daerah penelitian merupakan salah satu kabupaten di Indonesia.

Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif. Responden penelitian adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari instansi pemerintah dan Kontraktor (Gred 5 dan 6), yang sebagai pelaksana proyek konstruksi Pemerintah Daerah (X). Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Metode analisis statistik menggunakan analisis deskriptif dan uji Anova.

Hasil identifikasi deskriptif persepsi bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika proyek konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian, terungkap bahwa terdapat empat praktek yang diduga sering terjadi, yaitu mengakali material, mengakali volume material, menyogok dalam bentuk biaya perjalanan, dan memanipulasi pendokumentasian proyek. Hasil uji Anova mengungkapkan terdapat empat praktek yang memiliki perbedaan persepsi penilaian dampak, yaitu tidak adil dalam negosiasi kontrak, perselisihan kepentingan, memanipulasi informasi proyek, dan memanipulasi pengawasan proyek. Hasil identifikasi penyebab mengungkapkan, (1) tidak cukupnya pendidikan dan pelatihan etika profesional pengadaan proyek konstruksi pemerintah, (2) praktek kompetisi tidak sehat, dan (3) adanya arahan (“negatif”) dari pimpinan organisasi. Hasil identifikasi solusi untuk meminimalisasi praktek pelanggaran etika, dapat melalui (1) memberdayakan program pendidikan dan pelatihan etika profesional pengadaan proyek konstruksi pemerintah, (2) regulasi dan penegakan hukum oleh pemerintah, dan (3) penekanan sebuah bentuk kode etik profesional dalam pengadaan proyek konstruksi pemerintah.

Kata Kunci: *Etika Proyek Konstruksi, Proyek Konstruksi Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontraktor.*

THE IDENTIFICATIONS OF CONSTRUCTION PROJECT ETHICAL VIOLATIONS WITHIN THE SCOPE OF REGIONS (X) GOVERNMENT CONSTRUCTION PROJECT. REVIEW FROM PERSPECTIVES OF: THE GOVERNMENT AND CONTRACTOR

Student's Name : Hansen Thomas Yarisetouw
NRP : 9112202812
Advisor : Tri Joko Wahyu Adi, S.T., M.T., Ph.D.

ABSTRACT

Ethics violation is a form of behavior that is contrary to the norm of goodness. The practices of ethical violations in the implementation of construction projects occur in the form of bribery, negligence, fraud, unfairness, and manipulation. This study aims to identify and describe perceptions of the government and contractor against the practice of ethical violations within the scope of government construction projects, in Region (X). Region (X) is a research area is one of the regencies in Indonesia.

This research was descriptive. The respondents were Commitment Officers (PPK) of government agencies and contractors (Grade 5 and 6), that implement the construction project of (X) Regency government. The instruments of collecting the data were questionnaires and interviews. The statistical analysis method was descriptive analysis and ANOVA test.

The results of descriptive identification of government construction projects ethical violations practices perception in (X) Regency revealed that there are four alleged common practice, i.e. deceive the materials, deceive the material volume, bribing in the form of travel expenses, and being manipulate project documentation. ANOVA test results reveal that there are four practices that have different perceptions of the impact assessment, they are not fair in contract negotiations, conflict of interests, being manipulating in giving information, and being manipulating in supervising the project. The results of cause identification reveal, (1) not sufficient in education and training of professional ethics of government construction project procurement, (2) unfair competition practice, and (3) direction ("negative") from organization leader. The results of solution identification to minimize the practice of ethical violations reveal that it can be performed through (1) education and training programs of professional ethics of government construction project procurement, (2) regulation and law enforcement by the government, and (3) the emphasis of a form of professional ethic code in government construction project procurement.

Keywords: *Construction Project Ethics, Government Construction Projects, Commitment Officers (PPK), Contractor.*

KATA PENGANTAR

Segala pujian dan ucapan syukur kepada TUHAN, yang dalam penulisan tesis ini juga telah menganugerahkan hikmat dan pertolongan-Nya kepada penulis. Kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini, penulis juga menyampaikan terima kasih. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih, kepada:

1. Keluarga terkasih yang selalu bersama-sama dalam doa dan dukungan, yang diberikan juga selama masa studi ini.
2. Bapak Tri Joko Wahyu Adi, S.T., M.T., Ph.D selaku dosen pembimbing, yang telah membimbing dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. Soedarso, M.Hum dan Bapak Ir. Aditya Susantio, M.M.T, selaku dosen penguji saat penulisan proposal, yang telah memberikan masukan-masukkan guna penyempurnaan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Soedarso, M.Hum dan Ibu Ir. Endah Angreni M.T, selaku dosen penguji tesis, yang juga turut memberikan masukan-masukkan guna penyempurnaan penulisan tesis ini.
5. Bapak Ir. Putu Artama Wiguna, M.T., Ph.D selaku dosen wali, yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan di MMT ITS.
6. Segenap dosen pengajar dan civitas akademik MMT ITS Surabaya.
7. Teman-teman program kerjasama PU-MMT ITS, yang telah banyak berbagi pengalaman selama proses perkuliahan.
8. Kementerian PU, yang telah memberikan beasiswa dan kesempatan kepada penulis guna menjalani studi ini.
9. Pemerintah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua, selaku instansi pemerintah tempat penulis bekerja sebagai PNS, yang telah memberikan kesempatan waktu kepada penulis guna menjalani studi ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam isi penulisan tesis ini. Kritik dan saran sangat diharapkan, guna penyempurnaan penulisan tesis ini.

Surabaya, April 2015
Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR PERSAMAAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Penelitian.....	5
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1 Definisi dan Terminologi.....	7
2.1.1 Etika.....	7
2.1.2 Proyek.....	7
2.1.3 Pekerjaan konstruksi.....	8
2.1.4 Proyek pemerintah.....	9
2.1.5 Pemerintah.....	9
2.1.6 Kontraktor pelaksana.....	9
2.1.7 Pelanggaran etika proyek konstruksi.....	10
2.1.8 Operasional konsep penelitian.....	10

2.2 Konsep dan Dasar Teori	11
2.2.1 Etika dan etisitas tindakan manusia	11
2.2.2 Masalah umum etika professional dalam industri konstruksi	12
2.2.3 Etika bisnis dan etika profesional	18
2.2.4 Etika dan hukum	21
2.2.5 Dilema etika professional proyek konstruksi	22
2.2.6 Dampak praktek pelanggaran etika proyek konstruksi	24
2.2.7 Statistik deskriptif	25
2.2.8 Anova	26
2.3 Penelitian Terdahulu	26
2.4 Posisi Penelitian	31
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Variabel Penelitian	35
3.3 Pengumpulan Data	38
3.4 Bagan Alir Penelitian	38
3.5 Populasi dan Sampel	38
3.5.1 Metode dan teknik pengambilan sampel	39
3.5.2 Penentuan jumlah sampel	40
3.5.3 Responden penelitian	40
3.6 Tipe Skala Pengukuran Data	42
3.7 Validitas dan Reliabilitas	45
3.7.1 Validitas	45
3.7.2 Reliabilitas	45
3.8 Teknik Analisis dan Penyajian Data	46
BAB 4 PEMBAHASAN	49

4.1 Lokasi Penelitian dan Gambaran Pembangunan Infrastruktur	49
4.2 Pengumpulan dan Persiapan Data.....	50
4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas	54
4.3.1 Uji validitas.....	54
4.3.2 Uji reliabilitas.....	57
4.4 Analisis Data.....	57
4.4.1 Persetujuan bentuk praktek pelanggaran etika proyek konstruksi.....	58
4.4.2 Persepsi frekuensi praktek pelanggaran etika proyek konstruksi	61
4.4.3 Persepsi dampak praktek pelanggaran etika proyek konstruksi.....	64
4.4.4 Uji Anova.....	69
4.4.5 Identifikasi penyebab	70
4.4.6 Identifikasi solusi	72
4.5 Pembahasan.....	73
4.5.1 Bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi.....	73
4.5.2 Status saat ini praktek pelanggaran etika proyek konstruksi	75
4.5.3 Penyebab praktek pelanggaran etika proyek konstruksi pemerintah.....	88
4.5.4 Solusi meminimalkan bentuk praktek pelanggaran etika proyek konstruksi pemerintah.....	89
4.5.5 Hasil uji Anova	90
4.5.6 Aspek pengawasan melalui kajian literatur	99
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian	39
Gambar 3.2 Teknik Penyajian Hasil Status Pelanggaran Etika	48
Gambar 4.1 Jumlah Responden Penelitian	52
Gambar 4.2 Pengalaman Kerja Responden PPK dan Kontraktor	52
Gambar 4.3 Jenis Proyek yang Ditugaskan Kepada Responden PPK	53
Gambar 4.4 Persepsi Status Saat ini Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden PPK	77
Gambar 4.4.a Persepsi Status Saat Ini Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi yang Berdampak Pada Mutu dari Responden PPK.....	77
Gambar 4.4.b Persepsi Status Saat Ini Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi yang Berdampak Pada Organisasi dari Responden PPK	77
Gambar 4.5 Persepsi Status Saat ini Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden Kontraktor	78
Gambar 4.5.a Persepsi Status Saat Ini Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi yang Berdampak Pada Mutu dari Responden Kontraktor	78
Gambar 4.5.b Persepsi Status Saat Ini Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi yang Berdampak Pada Organisasi dari Responden Kontraktor	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Variabel Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi.....	27
Tabel 2.2 Pernyataan Penyebab Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Tinjauan Pustaka.....	31
Tabel 2.3 Pernyataan Solusi Meminimalkan Bentuk-bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Tinjauan Pustaka	32
Tabel 2.4 Rujukan Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Bentuk-bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Pemerintah.....	36
Tabel 3.2 PPK Proyek Konstruksi di Daerah (X) Tahun 2014.....	40
Tabel 3.3 Responden Ahli.....	42
Tabel 3.4 Skala Likert Pengukuran Data Tingkat Persetujuan	42
Tabel 3.5 Skala Likert Penilaian Dampak dan Tingkat Frekuensi	43
Tabel 4.1 Arah Pembangunan Infrastruktur di Daerah penelitian	50
Tabel 4.2 Profil Responden dan Data Terkumpul.....	51
Tabel 4.3 Validitas Persetujuan Praktek Pelanggaran Etika Proyek Kontruksi.....	54
Tabel 4.4 Validitas Frekuensi Praktek Pelanggaran Etika Proyek Kontruksi.....	55
Tabel 4.5 Validitas Dampak Praktek Pelanggaran Etika Proyek Kontruksi.....	56
Tabel 4.6 Uji Reliabilitas Instrumen.....	57
Tabel 4.7 Kriteria Kategori Berdasarkan Interval Skor	58
Tabel 4.8 Deskriptif Persepsi Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden PPK	59
Tabel 4.9 Deskriptif Persepsi Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden Kontraktor	60
Tabel 4.10 Deskriptif Persepsi Frekuensi Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden PPK.....	62
Tabel 4.11 Deskripsi Persepsi Frekuensi Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden Kontraktor.....	63
Tabel 4.12 Deskriptif Persepsi Dampak Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden PPK.....	65

Tabel 4.13 Deskriptif Persepsi Dampak Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden Kontraktor	68
Tabel 4.14 Uji Anova Perbedaan Persepsi antara Responden PPK dengan Kontraktor.....	70
Tabel 4.15 Identifikasi Persepsi Penyebab Terjadinya Praktek Pelanggaran Etika di Proyek Konstruksi Pemerintah	71
Tabel 4.16 Identifikasi Persepsi Solusi Meminimalkan Bentuk Praktek Pelanggaran Etika di Proyek Konstruksi Pemerintah.....	73
Tabel 4.17 Identifikasi Deskriptif Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian dari Persepsi Pemerintah dengan Kontraktor.....	91
Tabel 4.18 Deskripsi Persepsi Responden Ahli: Terhadap Empat Variabel yang Berbeda Persepsi dari Hasil Uji Anova Penilaian Dampak Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian antara Responden PPK dengan Kontraktor	100

BIOGRAFI



Identitas Penulis:

Nama : Hansen Thomas Yarisetouw
Tempat, Tgl Lahir : Bandung, 11 April 1986
Agama : Kristen
Anak Pasangan : Bapak R. Yarisetouw, dan
Ibu A. Yaukwart

Riwayat Pendidikan:

- Pendidikan formal berjenjang (SD, SMP, STM) s.d tahun 2004, di Kota Jayapura - Papua;
- Pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Teknik Sipil, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), di Kota Jayapura - Papua, di tahun 2005 s.d 2009.

Riwayat Pekerjaan:

- Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah, di Papua, dari tahun 2006 s.d saat ini.

Aktivitas Saat Ini:

- Menempuh pendidikan lanjutan Program Pasca Sarjana (S2), Bidang Keahlian Manajemen Proyek, Program Studi Magister Manajemen Teknologi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, dari tahun 2013 s.d saat ini (2015), sebagai penerima Program Beasiswa Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Karya Tulis Tugas Akhir:

- Penulisan Skripsi dengan judul: Tinjauan Moda Transportasi Angkutan Massal untuk Bus Kota dalam Trayek Kota Jayapura - Abepura. Tahun 2009;
- Penulisan Tesis dengan judul: Identifikasi Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dalam Lingkup Proyek Konstruksi Pemerintah Daerah (X). Tinjauan dari Perspektif: Pemerintah dan Kontraktor. Tahun 2015.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana yang berupa pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari kegiatan andalan Pemerintah Republik Indonesia di dalam hal meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi, yang hasilnya diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, anggaran belanja pemerintah baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara terpisah atau pun secara bersama-sama secara berkelanjutan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan telah ditetapkan otonomi daerah maka pemerintah provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia mempunyai kewajiban menyediakan sarana infrastruktur bagi masyarakatnya.

Pertumbuhan jasa konstruksi yang tinggi dan belum diimbangi dengan tatanan penyelenggaraan yang maksimal sehingga menyebabkan munculnya berbagai masalah, antara lain belum terwujudnya mutu produk, efisiensi waktu pelaksanaan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya, rendahnya tingkat kepatuhan pengguna jasa dan penyedia jasa terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan belum terwujudnya kesejajaran antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban. Bertitik tolak dari kondisi tersebut, maka dilakukanlah evaluasi kembali terhadap tatanan usaha di bidang jasa konstruksi yang memunculkan berbagai pertimbangan yakni, jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Berpijak dari pertimbangan tersebut, maka dicanangkan pula cita-cita jasa konstruksi yang diinginkan di masa mendatang, yakni: Tertib usaha jasa konstruksi; pemberdayaan jasa konstruksi nasional untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan produktivitas, dan

menumbuhkan daya saing; kedudukan yang adil antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan kemitraan sinergis dalam usaha jasa konstruksi. Untuk mencapai cita-cita tersebut, maka pengaturan di bidang jasa konstruksi harus berdasarkan azas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, dan keamanan dan keselamatan (Undang-undang Nomor 18, 1999).

Saat ini, masalah etika profesional telah memicu antusias dan diskusi pragmatis di kalangan masyarakat umum, dan ada permintaan oleh literatur untuk mendorong penerapan praktek etika yang baik atau berperilaku etis di dalam bisnis industri konstruksi. Hal ini menjadi perhatian, sebab dampak dari praktek yang tidak etis dalam industri konstruksi telah merugikan banyak pihak dan berdampak pada hasil proyek (Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, 2012). Sehingga, dengan memperhatikan aspek etika dapat menjamin keberlanjutan dalam hasil akhir proyek (Mishra, Dangayach, & Mittal, 2011), dan dianjurkan untuk semua pihak untuk mempromosikan dan mempraktekkan perilaku etika dalam proyek mereka untuk meminimalkan cacat dan kegagalan konstruksi (Ahzahar, Karim, & Eman, 2011).

Efek dari praktik yang tidak etis telah berlangsung dampak merugikan industri konstruksi, seperti biaya terbuang, ketidakpastian tender, peningkatan biaya proyek, permasalahan ekonomi, terjadi pemerasan, penuntutan pidana, penuntutan denda, masuk daftar hitam dan risiko reputasi. Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012) dan (Rahman, Wang, & Saimon, 2011) meneliti dan telah menyimpulkan bahwa perilaku tidak etis di industri konstruksi mengambil bentuk sebagai penyuapan, kelalaian, penipuan, dan ketidakadilan. Selain itu, berdampak juga pada hasil proyek seperti cacat dan kegagalan konstruksi, sebab penggunaan bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau dapat juga merupakan konsekuensi dari pihak tak bertanggung jawab yang dengan sengaja mengurangi kualitas dalam rangka untuk mengurangi biaya (Ahzahar, Karim, & Eman, 2011).

Berdasarkan data dari buku saku APBN dan indikator ekonomi kementerian keuangan diketahui bahwa belanja pemerintah disektor infrasturktur dari tahun

2005 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan cukup signifikan. Gambaran realisasi belanja infrastruktur dari tahun 2005 sampai dengan 2011 adalah sebagai berikut: tahun 2005 sebesar Rp 23.7 Triliun, 2006 sebesar Rp 50.0 Triliun, tahun 2007 sebesar Rp 54.0 Triliun, tahun 2008 sebesar Rp 71.0 Triliun, tahun 2009 sebesar Rp 78.9 Triliun, tahun 2010 sebesar Rp 82.6 Triliun, tahun 2011 sebesar Rp 123.8 Triliun (Susanto & Makmur, 2013).

Sementara belanja pemerintah di sektor konstruksi terus mengalami peningkatan, korupsi dan praktek tidak etis sering dilaporkan di media dan dianggap sebagai identik dengan proyek konstruksi. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 30 Juni 2014, telah melakukan penanganan korupsi yang sebagiannya dari jenis perkara korupsi pengadaan barang/jasa sebanyak 7 kasus. Tabulasi data penanganan korupsi dari tahun 2004-2014 per 30 Juni 2014, untuk pengadaan barang/jasa sebanyak 120 kasus yang adalah peringkat kedua dari banyaknya jenis kasus. Peringkat pertama adalah kasus penyuapan sebanyak 175 kasus (KPK Indonesia, 2014). Temuan dari penelitian yang dilakukan di negara-negara lain seperti, Malaysia (Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, 2012) dan (Rahman, Wang, & Saimon, 2011), India (Mishra, Dangayach, & Mittal, 2011), Rumania (Richea, 2013), Yunani (Trivellas & Drimoussis, 2013) memberikan bukti bahwa praktek di proyek konstruksi terkendala dengan masalah etika.

Instansi Pemerintah di Daerah penelitian telah berkomitmen untuk meningkatkan kelayakan infrastruktur pemerintahan, ekonomi, dan fasilitas layanan publik, yang memadai. Salah satu implementasi dari misi tersebut adalah dengan melaksanakan agenda pembangunan permukiman, dengan sasaran mewujudkan perumahan yang terjangkau dan layak huni, sebagai program andalan. Salah satu ancaman dalam analisis lingkungan Pemerintah di Daerah penelitian adalah masih berkembangnya nuansa Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Pemerintah Daerah (X), Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2006-2010, 2006).

Pada umumnya kasus pada pekerjaan konstruksi didominasi oleh penyimpangan berupa pengaturan lelang, kekurangan volume pekerjaan, ketidak-

sesuaian spesifikasi berupa pengurangan kualitas pekerjaan, pemahalan harga (mark-up) dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan (Susanto & Makmur, 2013).

Dengan adanya penemuan-penemuan penelitian yang mengungkapkan industri konstruksi terkendala dengan masalah perilaku tidak etis, maka pelaksanaan penelitian ini secara khusus akan difokuskan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan persepsi pemerintah dan kontraktor, yang sebagai pelaksana proyek konstruksi pemerintah, terhadap bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, serta dapat mengetahui penyebab dan solusi untuk meminimalkan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, secara khusus di Daerah penelitian.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti adalah:

1. Apa sajakah bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, dan bagaimana frekuensi dan dampak dari praktek-praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah saat ini, di Daerah (X)?
2. Apa penyebab dan solusi untuk meminimalkan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah saat ini, di Daerah (X)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi serta mendeskripsikan masing-masing persepsi pemerintah dan kontraktor, terhadap bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi, dan mengetahui penilaian responden, yang merupakan “keyakinan responden,” terhadap tingkat frekuensi dan dampak dari praktek-praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah saat ini, di Daerah (X).
2. Mengetahui dan mendeskripsikan persepsi keseluruhan responden, terhadap penyebab dan solusi untuk meminimalkan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah saat ini, di Daerah (X).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain, dapat:

1. Mengetahui bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di Daerah (X) saat ini.
2. Mengetahui penyebab dan mendapat solusi, untuk meminimalkan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di Daerah (X) saat ini.
3. Mempromosikan dan mendorong untuk meminimalkan praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di Daerah (X).
4. Bermanfaat bagi penelitian yang lainnya, yang terkait dengan permasalahan penelitian ini, untuk dapat mengembangkannya lebih detil.

1.5 Batasan Penelitian

1. Ukuran pelanggaran etika pada penelitian ini sebagai bentuk perilaku yang tidak etis (professional) atau melakukan perbuatan yang salah dan dilakukan dengan sengaja, serta berulang di dalam pelaksanaan proyek konstruksi.
2. Lokasi penelitian dibatasi pada Daerah (X).
3. Lingkup proyek konstruksi pada penelitian ini adalah proyek konstruksi pemerintah yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2012- 2014 (saat ini).
4. Pembahasan penelitian ini tentang mendeskripsikan persepsi responden terhadap bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika, penyebab, dan solusi untuk meminimalkan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah saat ini.
5. Permasalahan pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di lihat dari sudut pandang (persepsi) pemerintah (PPK) dan penyedia jasa (Kontraktor).
6. Penyedia jasa dibatasi pada Kontraktor dibidang jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi Gred 5 dan 6.
7. Daerah (X) adalah salah satu instansi pemerintah daerah kabupaten, yang berada di Indonesia (yang dalam penulisan ini juga akan disebutkan sebagai “Daerah penelitian”).

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Terminologi

2.1.1 Etika

Etika dalam bisnis sering digambarkan sebagai "melakukan hal yang benar" dan dalam konteks pembangunan perilaku etis yang diukur oleh tingkat kepercayaan dan integritas dimana perusahaan dan/atau perorangan menjalankan usaha (Mason & England, 2011). Oleh Tota & Shehu, (2012) etika di dalam bisnis berkaitan dengan perilaku yang baik dan buruk, atau benar dan salah yang terjadi dalam konteks bisnis. Menurut, Trivellas & Drimoussis, (2013) elemen etika sebagai kompetensi perilaku, yang relevan dengan profesi manajemen proyek dan dalam konteks proyek, mendefinisikan etika merangkul tindakan atau perilaku yang mewakili kebebasan pribadi dan profesional serta batas-batas yang diterima secara moral.

2.1.2 Proyek

Proyek adalah sekumpulan kegiatan terorganisir yang mengubah (transform) sejumlah sumber daya menjadi satu atau lebih produk barang/jasa bernilai terukur dalam sistem satu siklus dengan batasan waktu (*delivery*), biaya (*cost*), dan kualitas (*quality*) yang ditetapkan melalui perjanjian. Berdasarkan kepada bentuk dan jenis kegiatan utamanya, proyek dapat dikelompokkan menjadi:

1. Proyek rekayasa konstruksi ("proyek konstruksi"), meliputi perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pemeliharaan, renovasi, rehabilitas dan restorasi bangunan konstruksi dan wujud fisik lainnya beserta kelengkapan asesorisnya.
2. Proyek pengadaan barang, meliputi pengadaan benda dan peranti, baik bergerak maupun tidak bergerak, dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, lahan, dan peralatan beserta kelengkapan asesorisnya.
3. Proyek teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pengadaan jaringan serta instalasi sarana prasarana informasi dan telekomunikasi baik cetak, audio, video dan internet (*cyber*).

4. Proyek sumber daya alam dan energi, meliputi eksplorasi, eksploitasi, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan dan distribusi sumber daya alam dan energi.
5. Proyek pendidikan dan pelatihan, meliputi pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan-kegiatan peningkatan kemampuan keahlian, kecakapan dan keterampilan lainnya dalam berbagai bidang.
6. Proyek penelitian dan pengembangan, meliputi kegiatan studi dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, budaya, politik, manajemen, lingkungan hidup, dan aspek kemasyarakatan lainnya.

Proyek ada karena adanya kebutuhan, baik kebutuhan yang direncanakan maupun kebutuhan yang belum/tidak direncanakan sebelumnya. Kebutuhan-kebutuhan biasanya berasal dari permintaan internal pemerintah dan masyarakat sebagai akibat adanya pemicu kebutuhan, seperti perlunya peningkatan kapasitas dan kualitas (kinerja) pelayanan kepada masyarakat, kebijakan pemerintah dan keputusan politis pemerintah, dan pengaruh tuntutan masyarakat dan lingkungan hidup (Malik, 2010).

2.1.3 Pekerjaan konstruksi

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain (Undang-undang Nomor 18, 1999). Perpres 70, (2012) disebutkan pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Pada penelitian Mitkus & Mitkus, (2014) proyek konstruksi dipahami sebagai suatu proses dalam pelaksanaan pembangunan atau pengadaan yang melibatkan klien, kontraktor, subkontraktor, desainer dan pengawas teknis konstruksi. Oleh Aziz dan Derus, (2010) dalam Nordin, Takim, & Nawawi, (2012) Proses konstruksi memerlukan kontribusi dari berbagai pihak/*stakeholder*, ini termasuk kelompok klien dari organisasi pemerintah, organisasi swasta,

perorangan, pengembang, kontraktor, subkontraktor, pemasok, produsen, dan kelompok profesional (arsitek, surveyor, pemodal, perusahaan asuransi, dan insinyur sipil-“struktural, mekanikal dan elektrik”).

2.1.4 Proyek pemerintah

Proyek pemerintah adalah segala bentuk kegiatan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN dan/atau APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola (direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pihak pemerintah sendiri atau pihak lain) maupun oleh penyedia jasa (kontraktor). Dengan menjamin terlaksananya pengadaan barang/jasa tersebut dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan usaha sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. (Malik, 2010)

2.1.5 Pemerintah

Pemerintah selaku pemilik pekerjaan memiliki peran sangat penting mulai dari perencanaan kebutuhan infrastruktur yang menyentuh masyarakat, kemudian melakukan pemilihan penyedia jasa melalui proses pelelangan, dan pengawasan pelaksanaan agar pelaksanaan konstruksi dapat tepat harga, tepat mutu, tepat jumlah (kuantitas) dan tepat waktu. Untuk itu, dibutuhkan tenaga-tenaga wakil pemerintah yang handal dalam mengawal pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dibiayai oleh pemerintah. (Susanto & Makmur, 2013).

Wakil pemerintah dalam penelitian ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah (Perpres 70, 2012).

2.1.6 Kontraktor pelaksana

Kontraktor pelaksana/penyedia jasa adalah orang atau badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kontraktor/penyedia jasa dapat berupa badan usaha atau orang

perseorangan yang berbadan hukum atau sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pekerjaan konstruksi (Susanto & Makmur, 2013).

2.1.7 Pelanggaran etika proyek konstruksi

Penelitian yang dilakukan oleh Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012) menjelaskan bahwa praktek perilaku tidak etis dalam industri konstruksi yang dibuktikan oleh kontraktor adalah rendahnya harga penawaran, dokumentasi yang buruk, keterlambatan pembayaran, kurangnya etika keselamatan kerja, perlakuan tidak adil dalam tender, pemalsuan pengalaman dan kualifikasi pesaing, dan kebijakan birokrasi pemerintah. Stansbury, (2005) dalam Nordin, Takim, & Nawawi, (2012) praktek yang tidak etis dapat mengakibatkan biaya terbuang, pemerasan, penuntutan pidana, denda, masuk daftar hitam, dan resiko reputasi.

Hamzah et al, (2008) yang dikutip dalam Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012) praktik tidak etis dapat terjadi pada setiap tahap dari proyek konstruksi selama perencanaan dan desain, pra-kualifikasi, pelaksanaan proyek, operasional dan pemeliharaan. Praktek-praktek seperti ini dapat menghasilkan proyek-proyek yang saat selesai dianggap tidak perlu, tidak cocok, *overlay* komponen yang kompleks, proyek mahal atau proyek tertunda.

2.1.8 Operasional konsep penelitian

Operasional variabel penelitian di dalam penelitian ini, dimaksudkan hanya akan fokus pada “identifikasi aspek bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika profesional dalam pelaksanaan pengadaan proyek konstruksi pemerintah”, yang ditinjau dari perspektif para pelaksana proyek konstruksi (PPK dan Kontraktor), sehingga perlu dihindari adanya kerancuan antara konsep penelitian ini (yang hanya fokus pada aspek etika profesional) dengan konsep kinerja (yang berbasis pada pengukuran kapasitas dan kualitas layanan, Malik, 2010) dan/atau dengan konsep peraturan perundang-undangan (aspek hukum).

Mengukur variabel penelitian disini diperoleh dengan cara mengidentifikasi persepsi responden, yang merupakan bentuk “tingkat keyakinan responden”, dengan cara menjawab pertanyaan penelitian.

Nama lokasi atau daerah pada penelitian ini, yang saat akan dipublikasikan dianggap perlu untuk “disamarkan”, guna menghindari hal-hal yang di luar kewenangan ilmiah.

Definisi variabel penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut ini, yang maknanya didefinisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2015), dan dioperasionalkan dengan tujuan mengidentifikasi “aspek pelanggaran etika guna menjawab permasalahan penelitian ini:

1. Penipuan didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh), atau sebagai adanya perbuatan mengakali (mencari akal atau daya upaya) untuk melakukan sesuatu dengan licik (tidak profesional).
2. Ketidakadilan didefinisikan sebagai adanya perbuatan pengingkaran untuk tidak memihak; adanya pengingkaran untuk berlaku seimbang (sama berat); dan/atau, adanya pengingkaran untuk bertindak sepatutnya.
3. Penyuapan didefinisikan sebagai adanya proses, cara, perbuatan memberi “sesuatu” (uang/benda berharga/biaya perjalanan) yang dengan maksud sebagai suatu bentuk sogok.
4. Pemanipulasian didefinisikan sebagai adanya proses, cara, perbuatan memanipulasi atau memanipulasikan “sesuatu” (informasi, pengawasan, keselamatan kerja, dan pendokumentasian) yang dengan maksud berbuat curang.

2.2 Konsep dan Dasar Teori

2.2.1 Etika dan etisitas tindakan manusia

Kata etika berasal dari bahasa Yunani (“*ethos*”) yang antara lain berarti adat-istiadat. Sebagai sebuah cabang filsafat, etika menjadi suatu penyelidikan normatif dan bukan hanya ilmu deskriptif murni. Obyek studinya terpaut dengan perilaku moral dan immoral supaya sanggup mengambil keputusan-keputusan dengan baik dan sampai pada rekomendasi yang memadai. Etika memiliki tiga ranah utama, yaitu (1) masalah benar, baik atau apa yang seharusnya dilakukan; (2) konsep-konsep mengenai nilai-nilai moral dalam hidup manusia; (3) motivasi yang

mendorong manusia untuk melakukan perbuatan baik (Vidal, 1990; Hare, 1992 dalam Chang, 2011).

Pope & Vasques, 1998 dalam Satiadarma, (2004) menjelaskan bahwa upaya menginterpretasikan konsep etika secara multi-interpretatif pada dasarnya dilandasi upaya melarikan diri dari tanggung jawab moral, untuk mencari pembenaran demi pembelaan diri dan keuntungan pribadi semata. Contohnya, bahwa pada berbagai kasus pelanggaran etika profesi, seorang pelaku cenderung mengemukakan alasan seperti orang lain melakukan hal yang juga demikian, masalah tersebut tidak pernah dibicarakan sejak awal, tidak ada landasan hukumnya untuk memperdebatkan masalah tersebut, dan masih banyak lagi alasan lain yang dikemukakan untuk melepaskan diri dari “jerat” pelanggaran etika profesi.

Etisitas tindakan seseorang terpaut dengan unsur-unsur berikut ini. Pertama, etisitas tindakan terpaut dengan obyek tindakan manusia. Obyek tindakan selalu terkait dengan buah tindakan manusia (pencurian, perampokan, pembunuhan, pemberian sedekah, menolong sesama). Kedua, etisitas tindakan manusia dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar yang berupa pengaruh-pengaruh, atau kondisi-kondisi langsung yang memberikan ciri-ciri moral lebih lanjut kepada tindakan-tindakan sebenarnya yang sudah berdimensi moral. Ketiga, etisitas tindakan manusia terkait dengan maksud tindakan seseorang (maksud dalam konteks ini berarti alasan yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu), (Chang, 2011).

2.2.2 Masalah umum etika professional dalam industri konstruksi

Sektor industri konstruksi memegang peranan penting dalam pengembangan sosial dan ekonomi suatu negara. Ini sangat penting untuk fakta bahwa pertumbuhan ekonomi dari suatu negara dapat diukur dengan pembangunan infrastruktur fisik (Takim dan Akintoye, 2002; Abdullah et al 2004 dalam Nordin, Takim, & Nawawi, 2012).

Mishra, Dangayach, & Mittal, (2011) untuk negara manapun manajemen proyek telah menjadi bagian penting bagi perkembangannya. Di dalam dunia bisnis proyek konstruksi yang sangat kompetitif telah menciptakan tekanan yang besar

pada manajer proyek. Tekanan berasal dari siklus proyek dan tujuan membangun keuntungan dalam organisasi bisnis, yang memaksa organisasi untuk mengejar praktik yang tidak etis. Tetapi, di dalam praktek industri dimana ada persyaratan bisnis yang ketat praktek tidak etis dapat ditekan. Guo, Richards, Wilkinson, & Li, (2013) menyaksikan di negara-negara seperti Perancis dan Selandia Baru dimana pelestarian lingkungan adalah merupakan prioritas utama, sehingga spesifikasi desain konstruksi dan kontrol pelaksanaan diperlukan untuk lulus pengawasan yang ketat, dan praktek tersebut dapat menghindari kesalahan yang dapat membahayakan keamanan lingkungan dan sosial.

Telah diketahui bahwa pelaksanaan proyek konstruksi terutama berfokus pada biaya, waktu, dan kualitas daripada dampak sosial dan dampak jangka panjang dari proyek. Akibatnya, kegiatan yang tidak etis dalam proyek bisnis dapat ditemukan dengan mudah, di mana situasi atau masalah timbul karena praktek bisnis yang meragukan, korupsi tinggi, atau pelanggaran hukum (Mishra, Dangayach, & Mittal, 2011). Penelitian tersebut memandang sebagai kekurangan, bahwa literatur serta perspektif praktisi saat ini tidak juga mengidentifikasi peran etika dalam keberhasilan proyek. Temuan dari penelitian yang dilakukan dalam industri konstruksi di negara-negara lain, yang disaksikan oleh Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012) seperti di Amerika Serikat, Australia, Afrika Selatan, Hong Kong, dan praktek di Malaysia, memberikan bukti bahwa industri konstruksi terkendala dengan masalah etika.

Masalah umum etika professional dalam industri konstruksi yang disorot adalah praktek tender, standar kualitas pekerjaan konstruksi, budaya keselamatan, pembayaran, korupsi, dan yang paling penting akuntabilitas publik untuk uang yang dihabiskan untuk bangunan umum dan infrastruktur, yang kemudian disimpulkan sebagai bentuk perilaku yang tidak adil, kelalaian, konflik kepentingan, kolusi tender, penipuan dan penyuapan. (Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, 2012). Dari penelitian Mishra, Dangayach, & Mittal, (2011) telah teridentifikasi etika sebagai dimensi keempat yang penting dalam organisasi berbasis proyek, dan pendekatan mempertimbangkan etika akan menghasilkan keberlanjutan proyek, ini

akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan serta menciptakan harmoni, kepercayaan, persaudaraan, nilai-nilai dan moralitas di antara anggota tim.

2.2.2.1 Perilaku tidak adil

Perilaku yang tidak adil dapat terjadi kompetisi (persaingan tidak sehat) dalam kontrak (syarat kontrak yang tidak adil). Kadang-kadang hal ini terjadi dengan membatasi panggilan untuk penawaran tender, dengan mengirimkan undangan kepada perusahaan yang tidak memiliki keahlian nyata, sehingga muncul seolah-olah ada proses tender dengan persaingan yang ketat. Berikut fitur perilaku tidak adil yang disaksikan dan telah dicatat, sebagai sedikit atau tidak adanya kemampuan untuk menegosiasikan persyaratan kontrak; pengungkapan informasi komersial yang relevan dan penting tidak memadai, yang para pihak harus menyadari sebelum memasuki transaksi; pengungkapan yang tidak memadai dan jelas dari istilah penting dari kontrak, terutama yang berbobot terhadap pihak yang lemah; para pihak yang dominan berusaha untuk memvariasikan sifat hubungan jangka panjang sehingga lebih menguntungkan bagi mereka, tetapi telah mempengaruhi kelangsungan hidup dari pihak-pihak yang lemah (Mishra, Dangayach, & Mittal, 2011).

Hasil kajian literatur yang dilakukan oleh Neu, Everett, & Rahaman, (2014) menemukan dalam penelitian sebelum-sebelumnya ada berbagai kasus, seperti: Pra-kualifikasi dan proses penetapan daftar pendek pemenang (*shortlisting*), dimanipulasi untuk menampi kelompok penawar potensial, sehingga hanya ada satu pilihan yang jelas; proses pewan, spesifikasi teknologi dan bahan yang digunakan untuk mendukung penawar tertentu; informasi rahasia tentang proses seleksi tender atau penawar lain dapat “bocor” ke penawar yang disukai, sehingga mereka dapat menyusun tawaran mereka. Informasi orang dalam ini membuat lebih mudah menyiapkan penawaran yang akan menang, akhirnya syarat kontrak itu sendiri dapat ditulis dengan cara yang memungkinkan untuk adanya peningkatan biaya berikutnya; penggunaan *cost-plus pricing*, misalnya, adalah teknik disukai, karena memungkinkan pemenang untuk mengembang biaya sebagai cara untuk meningkatkan harga kontrak utama; dan promosi staf, pemberhentian, penurunan pangkat rentan terhadap praktek perburuan yang tidak adil dalam praktek bisnis,

dan ketika perselisihan timbul seringkali tidak ada jalan yang cepat, murah, dan bahkan ada keengganan oleh pihak yang lebih lemah untuk mengakses ketindakan-tindakan perbaikan karena takut akan ada tindakan pembalasan.

Mitkus & Mitkus, (2014) mengemukakan ketentuan kontrak bahkan jelas dapat sengaja disalahartikan oleh pihak yang berlaku tidak adil. Selain itu, ada beberapa contoh presentasi fakta palsu dan pelanggaran serupa lainnya. Contoh berikut sebagai perilaku yang tidak adil, yang diidentifikasi sebagai penyebab konflik yang cukup khas dalam kondisi kemerosotan ekonomi. Klien menjadi kekurangan uang untuk membayar kontraktor untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan. Alih-alih mengakui fakta ini, klien mulai mengirimkan klaim tidak masuk akal kepada kontraktor, dengan alasan bahwa pembayaran tertunda karena, misalnya, kinerja pengerjaan akhir yang buruk, bahan yang salah digunakan, dan lain-lain. Kemudian klien terus memanfaatkan ketidaksempurnaan dalam sistem hukum dengan memasuki proses litigasi yang berlangsung selama beberapa tahun, dengan menggunakan uang yang harus dibayarkan kepada kontraktor.

Pemalsuan dokumen, penghentian pekerjaan setelah pembayaran diterima, bersembunyi, dan lain-lain adalah contoh lain dari perilaku yang tidak adil dari para pihak (Janipha & Ismail, 2013). Umumnya, penawaran itu bertujuan untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang disarankan oleh kontraktor terbaik. Dalam beberapa pengadaan, klien lebih memilih untuk memilih kontraktor dengan penawaran terendah. Namun, ada kontraktor (dengan penawaran terendah) tidak mengikuti persyaratan untuk setiap spesifikasi, bahan atau produk. Dengan demikian, hal itu berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan keseluruhan dalam lingkungan konstruksi dan menyebabkan biaya proyek yang berlebihan.

2.2.2.2 Konflik kepentingan

Ini adalah situasi dimana seseorang dalam posisi kepercayaan, seperti politisi atau eksekutif atau direktur, dari suatu perusahaan bersaing kepentingan profesional atau pribadi, yang bisa membuatnya berada pada posisi yang sulit dalam memenuhi tugasnya untuk tidak memihak. Konflik kepentingan dapat membuat tampilan ketidakpantasan, yang dapat merusak kepercayaan pada kemampuan

seseorang untuk bertindak dengan benar dalam jabatannya. Konflik kepentingan cenderung melibatkan interpretasi pribadi yang menyatakan apakah perilaku tertentu umumnya dapat diterima atau tidak, dan tidak memposisikan dengan menyatakannya sebagai sesuatu perbuatan yang adalah ilegal. Tanggung jawab harus secara jelas ditempatkan pada setiap individu, untuk menyatakan semua kemungkinan potensi kasus dengan interpretasi negatif, sebelum terlibat dalam aktivitas proyek (Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, 2012).

Yiu dan Cheung, (2006) dalam Mitkus & Mitkus, (2014) menambahkan bahwa, dalam konflik industri konstruksi kadang-kadang tampak tak terelakkan karena tingginya perbedaan kepentingan di antara para peserta proyek konstruksi. Oleh karena itu, setiap proyek adalah unik. Di sisi lain, jalannya proyek dan keadaan yang ada dapat diinterpretasikan berbeda oleh setiap tim manajemen proyek konstruksi, sehingga sebuah perselisihan harus diselesaikan sebab tidak dapat dikelola.

Terkait konteks “konflik konstruksi” perlu dicatat bahwa para pihak dalam suatu perjanjian kontrak konstruksi terikat oleh kontrak. Kegiatan dan hubungan mereka diatur oleh kontrak dan hukum. Fakta dari isi kontrak, yaitu aturan perilaku para pihak, yang ditentukan oleh kesepakatan antara para pihak dalam proses komunikasi bukan oleh ketentuan tertulis formal (misalnya, dokumen yang ditandatangani oleh para pihak). Banyak artikel tentang konflik dan perselisihan di industri konstruksi secara eksklusif berurusan dengan keadaan karakteristik konflik, dan cenderung mengabaikan penyebab atau keliru terhadap keadaan yang relevan hadir sebagai penyebab. Penyebab sebenarnya dari konflik yang terkait dengan konstruksi adalah komunikasi yang tidak berhasil diantara para peserta dalam sebuah proyek konstruksi (Mitkus & Mitkus, 2014).

2.2.2.3 Penyuapan dan penipuan

Bentuk-bentuk utama korupsi yang diidentifikasi adalah penyuapan, penggelapan, penipuan dan pemerasan. Konsep ini sebagian tumpang tindih dan kadang-kadang dipertukarkan dengan konsep lain (Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, 2012). Korupsi adalah perilaku menyimpang yang memanifestasikan

dirinya dalam penyalahgunaan fungsi seperti dalam politik, ekonomi, kelembagaan, dan mendukung fakta bahwa godaan untuk korupsi bisa ada di mana-mana (Takim, Shaari, & Nordin, 2013).

Nordin, Takim, & Nawawi, (2012) dalam tulisannya yang mencoba untuk menyelidiki *Transparency Initiatives* (TI) dalam konstruksi berkaitan dengan psikologi sosial dari perilaku manusia. Dua temuan pentingnya adalah sumber korupsi dan strategi pemberantasan korupsi di industri konstruksi. Temuan menunjukkan sejumlah sumber yang dapat menjadi alasan untuk praktik korupsi. Dua sumber masalah teknis yaitu kelemahan dalam sistem dan tekanan ekonomi. Pada masalah perilaku, perilaku manusia dipengaruhi oleh budaya, masyarakat, dan kepribadian. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih memperhatikan pada pengembangan budaya konstruksi yang sehat dengan mempromosikan jujur, etika dan integritas yang tinggi sebagai nilai budaya konstruksi. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan kepercayaan dalam lingkungan konstruksi, setiap orang merasa aman untuk melaporkan korupsi, dan pengakuan kepada perusahaan yang mematuhi praktik terbaik. Selanjutnya, telah disepakati bahwa prosedur yang terorganisir dengan baik, penegakan peraturan/hukum secara tegas, dan karya manajemen proyek yang transparan merupakan elemen penting untuk mencegah korupsi. Lebih penting lagi memotivasi psikologi setiap individu untuk perbaikan perilaku sebagai manusia sosial, melalui penegakan integritas, nilai-nilai budaya dan etika. Oleh karena itu, meskipun ada banyak undang-undang dan regulasi yang membatasi praktek korupsi, adalah sikap orang dan nilai diri sebagai yang lebih penting dalam usaha untuk pemberantasan korupsi.

Korupsi dalam industri konstruksi adalah masalah yang kompleks dan sensitif. Secara umum, diasumsikan dapat terjadi tetapi dalam bentuk dan skala korupsi dengan sifatnya yang sulit untuk dinyatakan. Korupsi dapat terjadi dalam setiap tahapan proyek konstruksi, seperti pada fase perencanaan proyek, pembiayaan, desain, tender dan pelaksanaan. Dan, bahwa dalam setiap fase tindakan korupsi mungkin melibatkan pemilik proyek, lembaga donor, konsultan, kontraktor, sub-kontraktor, mitra usaha patungan, dan agen. Korupsi dapat menyebabkan proyek yang berwenang dipertanyakan karena mungkin ada suap dan

penipuan dalam pemilihan kontraktor, sehingga dapat menyebabkan harga proyek bisa terlalu meningkat dan produk akhir yang rusak atau berbahaya (gagal struktur) (Ahzahr, Karim, & Eman, 2011).

Berikut ini penyuapan dan penipuan dalam pengadaan yang disaksikan dan dikutip oleh Neu, Everett, & Rahaman, (2014) bahwa penyuapan dan penipuan dalam pengadaan mengacu pada penjualan ilegal, tidak sah, dan membeli/menggunakan pengaruh dan kekuasaan pemerintah untuk kepentingan pribadi. Setelah kontrak diberikan, kemungkinan lain untuk penyuapan dan penipuan dapat terjadi, sebagai contoh, modifikasi kontrak yang dihasilkan dari informasi “baru” atau melengkapi spesifikasi setelah kontrak ditandatangani menciptakan situasi di mana tidak ada lagi proses tender yang kompetitif, tetapi hanya membuat negosiasi bilateral. Kontrak yang ada juga dapat dimodifikasi, baik secara formal atau hanya dengan tidak mengikuti ketentuan kontrak memungkinkan kontraktor untuk menggunakan bahan yang lebih murah dan dengan demikian menghasilkan keuntungan tambahan.

Penelitian Takim, Shaari, & Nordin, (2013) menunjukkan bahwa sumber korupsi terdiri dari lima elemen, yaitu, mentalitas, budaya, lingkungan, gaya hidup, dan keniscayaan. Hal ini disebabkan persepsi individu yang mengklaim bahwa untuk mendapatkan proyek tidak bisa dihindari untuk melalui saluran informal (yaitu, membayar suap, permintaan untuk suap, dan transaksi tidak jujur). Sehingga, melalui gagasan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dengan tujuan meningkatkan nilai-nilai etis, dalam aspek sosial, aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek integritas, diharapkan bisa membantu, untuk membangun masa depan yang berkelanjutan.

2.2.3 Etika bisnis dan etika profesional

Ulasan berikut ini menunjukkan bagaimana peran etika di dalam bisnis dan peran etika profesional dapat mengontrol para individu menjalankan praktek mereka sehari-hari dalam berprofesi.

2.2.3.1 Etika bisnis

Etika di dalam bisnis berkaitan dengan perilaku yang baik dan buruk atau benar dan salah yang terjadi dalam konteks bisnis. Konsep benar dan salah semakin sering ditafsirkan saat ini untuk menyertakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit dan halus terkait dengan keadilan dan kesetaraan. Salah satu masalah utama dengan pendekatan ini adalah bahwa hal itu tidak mempunyai standar atau norma yang jelas dan harus digunakan, dengan demikian pendekatan konvensional rentan terhadap relativisme etis. Sehingga, kita dapat bingung, tidak pasti, dan tidak nyaman ketika menghadapi dilema etika. (Tota & Shehu, 2012).

Tolok ukur relativisme adalah situasi atau keadaan yang dialami pada waktu mengambil sebuah keputusan etis. Seorang relativis mengambil sebuah keputusan berdasarkan sesuatu yang baik secara moral, jika keputusan itu mendatangkan hasil-hasil yang diinginkan. Tampak ada keterkaitan antara keputusan dan keinginan dalam usaha yang dijalankan (Chang, 2011).

Peran etika dalam bisnis, untuk:

- Menggambarkan kategori dan proses pembentukan nilai dalam organisasi dan dalam ekonomi.
- Menggambarkan bagaimana keputusan dibuat dalam organisasi.
- Memberikan kritik terhadap proses pembentukan nilai dalam organisasi dan dalam ekonomi.
- Menentukan nilai-nilai yang harus terus ada di dalam organisasi.
- Menetapkan bagaimana keputusan harus dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang sehat.

Hal ini sering digambarkan sebagai "melakukan hal yang benar" dan dalam konteks pembangunan perilaku etis, yang diukur oleh tingkat kepercayaan dan integritas dimana perusahaan dan/atau perorangan menjalankan usaha (Mason & England, 2011).

2.2.3.2 Etika profesional

Hampir setiap profesi memiliki kode etiknya, untuk menyediakan kerangka kerja yang akan menghantarnya pada pilihan etis yang baik. Oleh karena itu, etika

profesi adalah sistem norma untuk menangani dengan baik moralitas dan perilaku profesional dalam praktek mereka sehari-hari, dan untuk menganggap tanggung jawab moral tidak hanya untuk individu, tetapi untuk semua profesional yang berlatih dalam profesi tertentu (Rahman, Wang, & Saimon, 2011).

Etika profesional didefinisikan sebagai sistem norma yang mengontrol moralitas dan perilaku profesional dalam praktek mereka sehari-hari. Penerapan prinsip-prinsip etika dan penegakan standar menjadi hal-hal yang semakin penting bagi masyarakat saat ini dimana jumlah profesi dan tuntutan sebagai profesional meningkat, dan lingkungan kerja yang etis menjadi lebih sensitif karena kredibilitas seluruh profesi terancam ketika penyimpangan perilaku etis terjadi (Rahman, Wang, & Saimon, 2011). Sehingga, untuk mewujudkan perilaku etis sebagai bagian dari etika professional perlu dibentuk. Dan, pelaksanaan kontrol ini oleh badan profesional yang bersangkutan sering diwujudkan dalam promosi dan penegakan kode etik (Mason & England, 2011).

Banyak pihak di industri konstruksi mengklaim bahwa kode etik profesional dapat membantu mengurangi perilaku tidak etis dari insinyur sipil, dan dapat meningkatkan tingkat etika di antara pemain konstruksi. Namun, faktanya adalah, meskipun sebagian besar organisasi memiliki kode etik mereka sendiri, masih banyak contoh perilaku tidak etis dalam industri konstruksi (Rahman, Wang, & Saimon, 2011). (Mason & England, 2011) Seperti etika profesional, etika pribadi adalah refleksi dari nilai-nilai keyakinan, kepribadian dan latar belakang. Kecenderungan setiap orang terhadap perilaku etis sangat mungkin dipengaruhi oleh sistem nilai yang dipantulkan oleh organisasi yang mempekerjakan mereka. Ini sering mengakibatkan rasa pribadi seseorang tentang apa yang benar dan salah menjadi terkubur di dalam sebuah organisasi, tanpa kepatuhan terhadap etika profesi. Sehingga, menurut Tota & Shehu, (2012) pertanyaan-pertanyaan etis yang lebih sering dikemukakan baru-baru ini, karena adanya tekanan dari segi ekonomi/keuangan terutama di negara-negara berkembang, sehingga ada dorongan untuk bertindak tidak etis. Seringkali peraturan diperlukan untuk memperbaiki praktek-praktek bisnis yang tidak etis. Kembali kita melihat bahwa moral dengan sendirinya tidak dapat melakukan begitu banyak perubahan, hanya ketika

keprihatinan moral dijabarkan ke dalam tuntutan hukum akan memberikan perubahan yang luas dan dapat diandalkan.

2.2.4 Etika dan hukum

Dalam proses globalisasi ekonomi, kita harus memperhatikan moralisasi dari peran pemerintah. Pemerintah harus menggunakan kebijakannya untuk mengatur hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda, memotivasi berbagai pihak, dan mendorong daya saing di bidang perekonomian. Kita dapat mengatakan bahwa itu adalah korelasi yang benar-benar responsif antara pemerintah dan tingkat perilaku etis. Etika hukum harus dilakukan dengan dianggap benar atau salah, tetapi hukum mencerminkan etika masyarakat yang dikodifikasi. Oleh karena itu, jika seseorang melanggar hukum atau melanggar peraturan, dia juga berperilaku tidak etis. Meskipun tumpang tindih, kami terus berbicara tentang perilaku etis yang diinginkan sebagai perilaku yang melampaui apa yang diwajibkan oleh hukum. Dilihat dari sudut pandang sederhana, kita pasti akan mengatakan bahwa ketaatan kepada hukum adalah standar minimum perilaku (Tota & Shehu, 2012).

Terkait erat dengan subjek integritas adalah persyaratan untuk objektivitas dan kemampuan atau untuk menghindari situasi di mana konflik kepentingan dapat terjadi. Profesi hukum telah lama sadar akan bahaya dari konflik kepentingan atas nama klien untuk siapa mereka bertindak. Profesi lain belum begitu aktif dalam mengenali potensi perilaku tidak etis di daerah ini. Kuncinya adalah mengidentifikasi di mana individu menempatkan diri mereka dalam situasi ini yang berpotensi menimbulkan konflik, sehingga dapat berusaha untuk menghindari konflik. Panduan yang diberikan dalam hubungan ini adalah bahwa alih-alih menghindari situasi ini, kekhawatiran antara tim proyek mungkin cukup untuk menanamkan prinsip etis. Pedoman kode etik harus berusaha, untuk mengatasi konflik kepentingan, dengan melaksanakan kajian konflik (Mason & England, 2011).

2.2.5 Dilema etika professional proyek konstruksi

Industri konstruksi menjadi lingkungan yang "sempurna" bagi dilema etika, dengan mentalitas harga terendah, persaingan yang ketat, dan margin keuntungan yang kecil. Jelaslah bahwa ada daerah signifikan yang menjadi perhatian, yang berkaitan dengan perilaku etis profesional di bidang konstruksi. Ada banyak pihak yang terlibat dalam industri konstruksi, seperti klien, arsitek, surveyor, insinyur sipil, dan insinyur lainnya dan banyak upaya telah dilakukan untuk meningkatkan standar etika dan integritas di kalangan profesional, di sektor konstruksi di seluruh dunia. Klien sebagai kekuatan kemudi utama, sehingga keterlibatan klien dalam setiap aspek dari proses konstruksi sangat penting, untuk memastikan proyek yang akan selesai dalam lingkup, biaya dan waktu yang diizinkan, dan sesuai standar yang diinginkan. Terhadap pernyataan tersebut hanya sebagian kelompok orang yang setuju, karena masih bisa diperdebatkan apakah klien harus terlibat dalam semua proses, sebab pasti ada beberapa proses di mana klien harus dikeluarkan untuk menghindari gangguan langsung dan konflik kepentingan, sebab karenanya kemungkinan akan menimbulkan gangguan atas otoritas insinyur (Rahman, Wang, & Saimon, 2011).

Perilaku etis adalah sesuai dengan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

1. Kejujuran, yakni bertindak dengan kejujuran dan menghindari perilaku yang mungkin mengakibatkan secara langsung atau tidak langsung, dalam penipuan.
2. Kewajaran, yakni tidak berusaha untuk memperoleh manfaat yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari perlakuan yang tidak adil dari orang lain.
3. Pengakuan, yakni menghindari tindakan-tindakan yang mungkin mengakibatkan pihak lain kehilangan pengakuan yang adil untuk pekerjaan mereka.
4. Keandalan, yakni mempertahankan keunggulan keterampilan dan menyediakan layanan hanya dalam wilayah kompetensi.
5. Integritas, yakni memperhatikan untuk kepentingan masyarakat, khususnya orang-orang yang akan menggunakan atau mendapatkan suatu kepentingan proyek di masa depan.

6. Objektivitas, yakni mengidentifikasi setiap potensi konflik kepentingan dan mengungkapkan konflik kepada setiap orang yang akan terpengaruh.
7. Akuntabilitas, yakni memberikan informasi dan peringatan dari hal-hal dalam pengetahuan Anda yang berpotensi merugikan orang lain, dan yang mungkin dapat dipengaruhi oleh mereka. Peringatan harus diberikan dalam waktu yang cukup untuk memungkinkan pengambilan tindakan efektif untuk menghindari kerugian.

Prinsip-prinsip ini ditulis untuk diterapkan pada pekerjaan semua profesional yang bekerja di industri konstruksi, apa pun kualifikasi asli mereka atau afiliasi mereka, apakah mereka bekerja untuk atau atas nama independen profesional atau sebagai mitra, asosiasi, direktur atau karyawan sebuah perusahaan (Mason & England, 2011). Kadang-kadang hal ini menyebabkan dilema bagi para profesional dan bahwa mereka tidak yakin dengan kode untuk diikuti/dipatuhi. Misalnya, dalam beberapa keadaan, melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan keuntungan organisasi didorong oleh kode etik dari organisasi umum, tetapi dilarang oleh kode etik profesi. Dalam jenis dilema, profesional harus sangat waspada (Rahman, Wang, & Saimon, 2011).

Neu, Everett, & Rahaman, (2014) artikulasi etika seperti yang ditemukan dalam kode etik dan pedoman pengadaan adalah penting, tetapi perilaku para aktor berbeda dengan praktek bermotif tersebut. Kode etik mengartikulasikan visi normatif perilaku pengadaan yang tepat, tetapi kode etik tidak ditanamkan dalam bentuk kebiasaan dengan cara yang sama seperti praktek sehari-hari. Pengadaan pemerintah mirip dengan domain lain dari kehidupan organisasi. Aktor sosial hampir selalu memiliki insentif dan alasan untuk mengejar kepentingan individu dengan mengorbankan publik atau komunal. Kisah penipuan, pelanggaran lingkungan, pelanggaran kesehatan dan keselamatan, dan penghindaran pajak penghasilan hanyalah beberapa contoh aktivitas yang istimewa dari *selfinterest*.

Secara umum, dilema etika adalah situasi yang kompleks bagi seseorang dalam bisnis, di mana keputusan harus dibuat tentang tindakan memadai yang harus diambil (Harrison, 2005 dalam Tota & Shehu, 2012). Selanjutnya, Tota & Shehu,

(2012) menjelaskan sebuah dilema mungkin berasal dari konflik antara kebenaran atau kesalahan tindakan, dan kebaikan atau keburukan, sebagai konsekuensi dari tindakan. Dengan kata lain, melakukan apa yang secara moral benar tampaknya menghasilkan hasil yang buruk dan melakukan apa yang salah secara moral tampaknya menyebabkan efek yang lebih baik. Perspektif lain dari dilema etika, setidaknya konflik antara dua prinsip-prinsip etika yang keduanya dapat menyebabkan hasil yang sama baik atau sama buruk. Dalam situasi seperti ini, mematuhi dan mengarah ke satu prinsip dan melanggar prinsip yang lain, sedangkan kedua prinsip tampak sama-sama valid. Oleh karena itu dilema jika melakukan apa yang benar menghasilkan sesuatu yang buruk, atau jika melakukan apa yang salah menghasilkan sesuatu yang baik. Kekuatan kewajiban moral mungkin tampak seimbang dengan realitas akhir yang baik. Kita dapat memiliki kepuasan yang tepat terlepas dari kerusakan yang dilakukan, atau kita dapat bertujuan untuk apa yang tampaknya menjadi hasil terbaik terlepas dari kesalahan apa dan apa yang seharusnya kita berkomitmen.

2.2.6 Dampak praktek pelanggaran etika proyek konstruksi

Janipha & Ismail, (2013) menyatakan kualitas telah menjadi salah satu isu penting dalam lingkungan konstruksi. Hal tersebut disebabkan sifat lingkungan konstruksi itu sendiri, yang menghadapi masalah fragmentasi yang tinggi, ketidakstabilan, produktifitas rendah, kualitas buruk, dan kurangnya standar dalam mewujudkan produk akhir konstruksi. Budaya mutu dan kualitas sikap disini dipahami sebagai tindakan atau perilaku, yang mementingkan aspek kualitas proyek konstruksi, dari manajemen dan staf di organisasi. Kesamaan budaya mutu dan kualitas sikap yang positif, adalah faktor utama dalam mengembangkan perubahan dalam lingkungan konstruksi, khususnya untuk masalah kualitas konstruksi. Namun demikian, ada kendala dalam mengadopsi dan menerapkan kualitas dalam lingkungan konstruksi sebagai perusahaan yang berbeda, dengan memiliki budaya kualitas dan sikap yang berbeda. Beberapa perusahaan menerapkan standar kualitas pada proyeknya untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka dan citra perusahaan, sedangkan bagi perusahaan lain persepsi kualitas adalah untuk memenuhi persyaratan dan kewajiban standar kualitas.

Penting untuk memastikan berbagai pihak dalam proyek konstruksi menggunakan bahan yang baik dan dapat diterima, untuk menghasilkan hasil kerja proyek yang berkualitas tinggi yang memenuhi permintaan pengguna akhir. Selain itu, dianjurkan semua pihak untuk mempromosikan dan mempraktekkan perilaku etika dalam proyek mereka, agar dapat meminimalkan faktor kontribusi lain yang dapat menyebabkan cacat dan kegagalan konstruksi. Kadang-kadang penggunaan bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi merupakan konsekuensi, dari pihak yang tak bertanggung jawab yang dengan sengaja mengurangi kualitas, dalam rangka untuk mengurangi biaya. Mengurangi kualitas bahan dan juga biaya tampaknya memiliki agenda tersembunyi di antara pihak yang terlibat. Faktor penting yang kedua adalah rusaknya struktur selama tahapan pelaksanaan konstruksi. Rusak selama konstruksi atau yang lebih dikenal sebagai “pengerjaan yang miskin”, yang merupakan salah satu faktor populer yang mengarah pada membangun cacat dan menimbulkan masalah kegagalan struktur. Biasanya bangunan perumahan yang sering mengalami sebagian besar masalah kegagalan bangunan, karena pengerjaan yang buruk, dan masalah pengerjaan yang buruk berhubungan erat dengan perilaku kontraktor (Ahzahr, Karim, & Eman, 2011).

Hasil kajian literatur penelitian terdahulu, mengungkapkan bahwa dampak pelanggaran etika terhadap proyek konstruksi dapat berupa: dampak terhadap biaya (Mishra, Dangayach, & Mittal, 2011; Neu, Everett, & Rahaman, 2014), mutu proyek konstruksi (Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, 2012; Janipha & Ismail, 2013; Ahzahr, Karim, & Eman, 2011), dan organisasi (Mishra, Dangayach, & Mittal, 2011; Janipha & Ismail, 2013).

2.2.7 Statistik deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang bermakna. Statistik deskriptif memberikan informasi hanya mengenai data yang dipunyai dan tidak melakukan inferensi atau kesimpulan apapun tentang gugus data induknya (yang lebih banyak). Penyusunan tabel, diagram, grafik, indeks, dan besaran-besaran lain termasuk kategori statistik deskriptif. Statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran objek yang

diteliti sebagaimana adanya, tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi. Jadi, statistik deskriptif adalah statistik yang menggunakan data pada suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai kelompok itu saja (Sumanto, 2009).

2.2.8 Anova

Anova lebih dikenal dengan uji-F (Fisher Test), sedangkan arti variasi atau varian berasal dari pengertian konsep “Mean Square” atau kuadrat rerata (KR) (Riduan, 2011).

Konsep pengujian perbandingan rata-rata persepsi penilaian dampak praktek-praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, dipaparkan di bawah ini.

Konsep pengujian perbedaan dengan Anova:

1. Hipotesa:
 - H0: Tidak terdapat perbedaan rata-rata persepsi PPK dengan Kontraktor terhadap dampak pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di Daerah (X).
 - H1: Terdapat perbedaan rata-rata persepsi PPK dengan Kontraktor terhadap dampak pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di Daerah (X).
2. Nilai acuan menggunakan tingkat kesalahan ($\alpha=5\%$). Apabila nilai Sig. < 5% maka kesimpulan Tolak H0 atau Terima H1.
3. Apabila tolak H0 (terima H1) maka terdapat perbedaan rata-rata persepsi PPK dengan Kontraktor terhadap penilaian dampak pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah di Daerah (X), dan begitu sebaliknya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pada tinjauan pustaka yang telah dilakukan, maka pada Tabel 2.1 Variabel Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi, di halaman setelah ini, akan memaparkan hasil rujukan variabel dan indikator penelitian dari tinjauan pustaka. Dan akan dilanjutkan dengan memaparkan beberapa jurnal terkait, dengan menunjukkan metodologi yang digunakan dan temuan dan/atau hasil penelitiannya.

Tabel 2.1 Variabel Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi

Dimensi	Indikator	Referensi
1. Penipuan	Material	Neu, Everett, & Rahaman, (2014); Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012).
	Volume material	Neu, Everett, & Rahaman, (2014).
	Dokumen	Mitkus & Mitkus, (2014); Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012).
	Biaya	Neu, Everett, & Rahaman, (2014).
2. Ketidakadilan	Tidak adil dalam tender	Rahman, Wang, & Saimon, (2011); Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012); Janipha & Ismail, (2013); Neu, Everett, & Rahaman, (2014).
	Tidak adil dalam negosiasi kontrak	Mishra, Dangayach, & Mittal, (2011).
	Tidak adil dalam hubungan (terafiliasi)	Mishra, Dangayach, & Mittal, (2011); Rahman, Wang, & Saimon, (2011).
	Perselisihan kepentingan	Rahman, Wang, & Saimon, (2011); Mitkus & Mitkus, (2014).
	Tidak adil dalam informasi	Mishra, Dangayach, & Mittal, (2011); Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012).
3. Penyuapan	Uang tunai	Rahman, Wang, & Saimon, (2011); Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012).
Penyuapan	Benda berharga	Rahman, Wang, & Saimon, (2011); Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012).
	Biaya perjalanan	Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012).
4. Pemanipulasian	Pembayaran	Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012).
	Informasi proyek	Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012).
	Pengawasan proyek	Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012).
	Keselamatan kerja di proyek	Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012).
	Pendokumentasian proyek	Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012).

Hasil kajian literature yang dilakukan adalah sebagai berikut ini, dengan menunjukkan konsep penelitian dan hasil dan/atau temuan dari masing-masing penelitian:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mishra, Dangayach, & Mittal, (2011) "*An Ethical Approach Towards Sustainable Project Success*." Telah menghasilkan makalah sebagai gagasan konseptual, yang menghubungkan keberhasilan proyek dengan pendekatan etis. Tujuan penelitiannya adalah mengidentifikasi etika sebagai dimensi keempat, yang penting dalam organisasi berbasis proyek. Metodologi penelitian yang digunakan dengan pendekatan konseptual melalui studi literatur. Hasil penelitian yang diperoleh adalah, para manajer harus memastikan bisnis tepat waktu, di bawah anggaran, dan dalam ruang lingkup, sambil mempertahankan integritas profesional mereka dalam lingkungan yang berkembang; etika bisnis dalam manajemen proyek sangat penting dalam menjaga aliran hubungan dalam manajemen yang terpadu; etika menjadi dimensi penting yang akan menghasilkan keberlanjutan terhadap hasil akhir proyek. Penelitian ini terbatas pada mengidentifikasi etika sebagai dimensi yang penting dalam organisasi berbasis proyek konstruksi.
2. Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012) "*Ethical Issues in the Construction Industry*." Telah meneliti praktek etika di industri konstruksi Malaysia. Pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan isu-isu etis yang diangkat adalah apa perilaku tidak etis yang umumnya dibuktikan oleh kontraktor selama siklus hidup proyek, dan bagaimana praktik tidak etis mempengaruhi industri konstruksi dan dengan cara apa mereka bisa dikurangi. Tujuan penelitian ini adalah Menyelidiki status saat ini dari praktek etika dalam industri konstruksi, untuk meminimalkan masalah etis dalam industri konstruksi. Metodologi penelitiannya adalah kuesioner dikirim kepada kontraktor, dan data yang terkumpul kemudian dianalisis dan ditabulasi dengan menggunakan rata-rata sederhana dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan peringkat tertinggi untuk pelanggaran etis oleh kontraktor berturut-turut adalah pada harga penawaran, terlambat pembayaran, kurangnya etika keselamatan, perlakuan tidak adil dalam tender/negosiasi, melebihi-

lebihkan kemampuan dan kualifikasi, kebijakan birokrasi pemerintah, dan dokumentasi yang buruk. Penelitian ini terbatas pada industri konstruksi Malaysia dan sebagai respondennya adalah kontraktor.

3. Dalam penelitian Neu, Everett, & Rahaman, (2014) "*Preventing Corruption within Government Procurement: Constructing the Disciplined and Ethical Subject.*" Membahas peran kontrol internal dan praktek pemantauan dalam konteks korup dan bagaimana kontrol dan praktek-praktek ini membentuk etika dan perilaku moral pelaku organisasi. Metodologi penelitian ini sebagai desain konseptual melalui kajian literatur. Secara khusus, penelitian ini fokus pada dimensi penyuapan dan penipuan dalam pengadaan pemerintah, dan memproyeksikan pada wawasan Michel Foucault dan Gilles Deleuze, yang mengusulkan bahwa praktek-praktek anti korupsi tergantung pada pemahaman praktek dan analisis politik visibilitas, dan pengaturan efektif yang memiliki potensi untuk mencegah praktek-praktek korupsi dan mempengaruhi etika dalam organisasi. Hasil penelitian menggambarkan pengadaan pemerintah mirip dengan domain lain dari kehidupan organisasi. Aktor sosial hampir selalu memiliki insentif dan alasan untuk mengejar kepentingan individu dengan mengorbankan kepentingan publik atau komunal. Penipuan, pelanggaran lingkungan, pelanggaran kesehatan dan keselamatan, dan penghindaran pajak penghasilan hanyalah beberapa contoh aktivitas istimewa *selfinterest*.
4. Rahman, Wang, & Saimon, (2011) "*Clients' Perspectives of Professional Ethics for Civil Engineers.*" Melihat fakta bahwa meskipun sebagian besar organisasi memiliki kode etik mereka sendiri, masih banyak contoh perilaku tidak etis dalam industri konstruksi. Untuk alasan ini, penelitian ini berusaha untuk mempelajari persepsi klien bahwa kode etik profesi teknik sipil memiliki dampak perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis dalam industri konstruksi, seperti penipuan, penyuapan dan kolusi tender, yang dibahas dalam lima puluh lima wawancara terstruktur. Wawancara menunjukkan penyebab perilaku tidak etis, serta cara-cara untuk mitigasi. Akhirnya, dua model prosedur disiplin untuk menangani perilaku tidak etis dikembangkan untuk industri konstruksi, terutama untuk insinyur sipil. Salah satu model penanganan untuk perilaku tidak etis yang tidak serius seperti terlambat kerja, absensi kehadiran atas nama

teman, dan kinerja mengecewakan. Sedangkan, model penanganan yang berikutnya adalah untuk perilaku tidak etis yang serius seperti penipuan, ketidakjujuran, dan kolusi dengan pihak lain.

5. Mitkus & Mitkus, (2014) "*Causes of Conflicts in a Construction Industry: a Communicational Approach.*" Menganalisis penyebab konflik yang timbul antara klien dan kontraktor dalam industri konstruksi. Metodologi penelitian dilaksanakan melalui desain konseptual melalui kajian literatur. Analisis artikel tentang topik ini telah mengungkapkan konflik di industri konstruksi, dalam pandangan yang berbeda dari aspek komunikasi umumnya. Sebuah perjanjian kontrak konstruksi yang mengatur hubungan antara klien dan kontraktor juga dipandang sebagai produk komunikasi. Para penulis berhipotesis bahwa penyebab utama konflik di industri konstruksi adalah komunikasi yang tidak berhasil antara klien dan kontraktor. Hasil hipotesis telah dikonfirmasi oleh studi penelitian yang dilakukan. Selain itu, perilaku yang tidak adil dari para pihak dalam suatu perjanjian kontrak konstruksi, dan mekanisme pertahanan psikologis juga telah diidentifikasi sebagai kemungkinan penyebab konflik di industri konstruksi.
6. Temuan-temuan penelitian untuk dampak praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi. Dampak Praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi dapat berdampak terhadap:
 - Biaya (Mishra, Dangayach, & Mittal, 2011; Neu, Everett, & Rahaman, 2014);
 - Mutu proyek (Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, 2012; Janipha & Ismail, 2013; Ahzahar, Karim, & Eman, 2011),
 - Organisasi (Mishra, Dangayach, & Mittal, 2011; Janipha & Ismail, 2013).

Pada Tabel 2.2 Pernyataan Penyebab Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Tinjauan Pustaka, memaparkan pernyataan-pernyataan yang dapat dianggap tepat, sebagai penyebab praktek pelanggaran etika proyek konstruksi. Pernyataan-pernyataan dibawah ini yang dijadikan pedoman, untuk melakukan wawancara penelitian, guna mengidentifikasi penyebab bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di daerah penelitian.

Tabel 2.2 Pernyataan Penyebab Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Tinjauan Pustaka

Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang dapat dianggap tepat sebagai penyebab pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah!	Referensi
Kompetisi tidak sehat di pengadaan proyek konstruksi.	Rahman, Wang, & Saimon, (2011); Neu, Everett, & Rahaman, (2014).
Budaya di sektor pengadaan proyek konstruksi.	Rahman, Wang, & Saimon, (2011).
Arahan (“negatif”) dari pemegang otoritas (pimpinan organisasi).	Rahman, Wang, & Saimon, (2011); Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012).
Tidak cukup pendidikan dan pelatihan etika profesional pengadaan proyek konstruksi dalam mengatasi permintaan yang ilegal.	Rahman, Wang, & Saimon, (2011); Mishra, Dangayach, & Mittal, (2011).
Pengaruh krisis ekonomi ke sektor pengadaan proyek konstruksi.	Rahman, Wang, & Saimon, (2011); Nordin, Takim, & Nawawi, (2012).
Kelemahan dari asek legislasi/peraturan perundang-undangan di sektor pengadaan proyek konstruksi.	Rahman, Wang, & Saimon, (2011); Nordin, Takim, & Nawawi, (2012); Tota & Shehu, (2012).
Pendidikan etika profesi di bidang pengadaan proyek konstruksi tidak cukup dari lembaga profesional.	Rahman, Wang, & Saimon, (2011); Nordin, Takim, & Nawawi, (2012); Mason & England, (2011).
Pendidikan etika profesional bagi lulusan teknik tidak cukup di sekolah.	Rahman, Wang, & Saimon, (2011).

Pada Tabel 2.3 Pernyataan Solusi Meminimalkan Bentuk-bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Tinjauan Pustaka, di halaman setelah ini, akan memaparkan pernyataan-pernyataan yang dapat dianggap tepat sebagai solusi untuk meminimalkan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi. Pernyataan-pernyataan berikut ini, yang dijadikan pedoman di dalam melakukan wawancara penelitian, guna mengidentifikasi solusi untuk meminimalkan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian.

2.4 Posisi Penelitian

Posisi penelitian ini adalah konstruktif atau mendukung penelitian terdahulu. Penelitian ini mengidentifikasi serta memberikan deskripsi tentang bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi, khususnya dalam lingkup proyek kontruksi pemerintah di Daerah penelitian. Pada Tabel 2.4 Rujukan

Penelitian Terdahulu, di halaman setelah ini, memaparkan metodologi penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian ini.

Tabel 2.3 Pernyataan Solusi Meminimalkan Bentuk-bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Tinjauan Pustaka

Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang dapat dianggap tepat sebagai solusi untuk meminimalkan pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah!	Referensi
Memberdayakan program pendidikan, dan pelatihan etika profesional oleh lembaga profesi jasa konstruksi.	Rahman, Wang, & Saimon, (2011); Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012).
Melakukan penelitian dan pengembangan pendidikan etika profesional untuk secara efektif menangani masalah etika di sektor proyek konstruksi publik dan swasta.	Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012); (Mishra, Dangayach, & Mittal, 2011).
Menegaskan regulasi dan penegakan hukum oleh pemerintah di sektor pengadaan proyek konstruksi.	Rahman, Wang, & Saimon, (2011); (Nordin, Takim, & Nawawi, 2012).
Mewajibkan bagi lulusan teknik muda untuk memiliki pemahaman pada hal-hal profesional, termasuk aspek etika pengadaan proyek konstruksi.	Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012), (Nordin, Takim, & Nawawi, 2012).
Memanfaatkan peran media asosiasi bidang konstruksi dalam mempromosikan sebuah bentuk profesi masyarakat kontruksi yang etis.	Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012).
Menerapkan sebuah bentuk kode etik profesional dalam pengadaan proyek konstruksi pemerintah.	Rahman, Wang, & Saimon, (2011); (Mason & England, 2011).
Mengenalkan prinsip-prinsip “pakta integritas” sebagai alat untuk mewujudkan penawaran yang legal.	Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012).
Membuat perilaku tidak etis dalam pengadaan barang/jasa proyek konstruksi sebagai aktivitas kriminal.	Rahman, Wang, & Saimon, (2011); Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012).
Menegaskan kerja tim kualitas di proyek konstruksi untuk memastikan kualitas bersama dengan praktek etika.	Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012).
Menegaskan dan mewujudkan kemauan dan komitmen badan legislatif untuk menegakkan lingkungan profesional di sektor pengadaan proyek konstruksi.	Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012).

Temuan peluang penelitian yang diperoleh dengan melakukan kajian literatur, dapat disimpulkan, bahwa secara umum penelitian-penelitian terdahulu di bidang proyek konstruksi telah banyak meneliti objek atau permasalahan penelitian, tentang “Manajemen Proyek Konstruksi” seperti pada penelitian: Alias, Baharum,

Tabel 2.4 Rujukan Penelitian Terdahulu

Rujukan Penelitian Terdahulu	Lingkup Penelitian	Metode Analisis	Responden Penelitian
Rahman, Wang, & Saimon, (2011)	Meneliti perilaku tidak etis dalam industri konstruksi, penyebab dan cara untuk mitigasi	<i>Mean and Rank</i>	Kontraktor dan Pemerintah
Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012)	Meneliti perilaku tidak etis yang dibuktikan oleh kontraktor, dan bagaimana cara mengurangi perilaku tidak etis	<i>Simple Average Mean and Percentages.</i>	Kontraktor
Neu, Everett, & Rahaman, (2014)	Meneliti Etika dalam organisasi pengadaan pemerintah secara khusus fokus pada penyuapan dan penipuan	Desain konseptual melalui kajian literatur	Kajian literatur

& Idris, (2012), Janipha & Ismail, (2013), Mitkus & Mitkus, (2014); “Tata Kelola dan Pengadaan Proyek” seperti pada penelitian: Aliza, Stephen, Trigunarsyah, & Bambang, (2011), Tao & Jingjing, (2011); “Isu Etika di Industri Konstruksi” seperti pada penelitian: Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, (2012), Mishra, Dangayach, & Mittal, (2011), Rahman, Wang, & Saimon, (2011), Mason & England, (2011); dan, “Prinsip-prinsip Perilaku Etis” seperti pada penelitian: Richea, (2013), Nordin, Takim, & Nawawi, (2012), Takim, Shaari, & Nordin, (2013). Maka penulis berpendapat, kesempatan ini menjadi sebuah peluang penelitian, untuk mengkaji isu pelanggaran etika proyek konstruksi di sektor publik atau di sektor proyek konstruksi pemerintah.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada, area riset penelitian, yaitu di lingkup proyek konstruksi, dan menggunakan variabel-variabel penelitian yang diidentifikasi dari penelitian terdahulu dengan kajian literatur.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu pada objek penelitian. Penelitian terdahulu telah mengkaji melalui gagasan konseptual tentang

keberhasilan proyek konstruksi dengan pendekatan praktek yang profesional dan meneliti isu pelanggaran etika di proyek konstruksi, yang objek penelitiannya mencakup industri konstruksi atau mengambil posisi yang luas di dalam bisnis proyek konstruksi, di sektor swasta. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini akan fokus pada objek penelitian praktek pelanggaran etika proyek konstruksi milik pemerintah. Selain perbedaan pada objek penelitian, perbedaan lainnya ada pada metodologi penelitian (melihat dari perspektif pemerintah dan kontraktor) dan lingkup lokasi penelitian.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan persepsi dua kelompok responden, yaitu pemerintah dan kontraktor, terhadap bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika proyek konstruksi, dan dampaknya terhadap apakah biaya, mutu, atau organisasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penyebab dan solusi, sehingga dapat meminimalkan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di Daerah penelitian.

Metode yang digunakan dalam survei persepsi ini adalah survei langsung, dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Survei dilakukan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang merupakan wakil dari pemerintah dan Kontraktor, yang sebagai pelaksana proyek konstruksi pemerintah di Daerah penelitian.

Hasil penelitian yang diperoleh memperlihatkan penilaian persepsi dari responden PPK dan Kontraktor, sebagai pelaksana proyek konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian.

3.2 Variabel Penelitian

Pada Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Bentuk-bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi, di halaman berikut ini, memaparkan variabel dan indikator dari penelitian terdahulu yang dilengkapi dengan definisi operasional, yang akan digunakan untuk pengumpulan data melalui kuesioner.

Pengumpulan data melalui kuesioner untuk mendapatkan persepsi responden terhadap tingkat persetujuan sebagai bentuk-bentuk praktek yang “diyakini” merupakan praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian, seberapa seringkah terjadi? Dan, dapat berdampak pada biayakah/mutukah/organisasi, dan persepsi dampaknya seberapa berdampak.

Bentuk operasional kuesioner penelitian ditunjukkan pada Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Bentuk-bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Pemerintah

Dimensi	Indikator	Definisi Operasional
X1 Penipuan	X1.1 Mengakali Material	Adanya perbuatan melakukan sesuatu dengan licik terkait material (bahan bangunan) yang dipakai dalam pelaksanaan proyek konstruksi.
	X1.2 Mengakali Volume Material	Adanya perbuatan melakukan sesuatu dengan licik terkait volume (bobot pekerjaan) dalam pelaksanaan proyek konstruksi.
	X1.3 Mengakali Dokumen	Adanya perbuatan melakukan sesuatu dengan licik terkait dokumen (surat tertulis atau tercetak yang dipakai sebagai bukti keterangan) dalam pelaksanaan proyek konstruksi.
	X1.4 Mengakali Biaya	Adanya perbuatan melakukan sesuatu dengan licik terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya (uang yang dikeluarkan untuk mengadakan) proyek konstruksi.
X2. Ketidakadilan	X2.1 Tidak Adil dalam Tender	Adanya pengingkaran untuk tidak memihak dalam tender (tawaran untuk memborong pekerjaan) proyek konstruksi.
	X2.2 Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak	Adanya pengingkaran untuk berlaku seimbang (sama berat) terkait proses tawar menawar untuk membuat kontrak (perjanjian secara tertulis) proyek konstruksi.
	X2.3 Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi)	Adanya pengingkaran untuk tidak memihak terkait hubungan pertalian keluarga, persahabatan dalam pengadaan proyek konstruksi.
	X2.4 Perselisihan Kepentingan	Adanya perihal berselisih untuk mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum dalam proyek konstruksi.
	X2.5 Tidak Adil dalam Informasi	Adanya pengingkaran untuk tidak memihak terkait pemberian informasi pengadaan proyek konstruksi.
X3 Penyuapan	X3.1 Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai	Adanya perbuatan memberi uang tunai yang sebagai bentuk sogok dalam pengadaan proyek konstruksi.

Dimensi	Indikator	Definisi Operasional
	X3.2 Menyogok dalam Bentuk Benda Berharga	Adanya perbuatan memberi benda berharga yang sebagai bentuk sogok dalam pengadaan proyek konstruksi.
	X3.3 Menyogok dalam Bentuk Biaya Perjalanan	Adanya perbuatan memberi biaya perjalanan yang sebagai bentuk sogok dalam pengadaan proyek konstruksi.
X4 Pemanipulasian	X4.1 Memanipulasi Pembayaran	Adanya perbuatan penyelewengan/berbuat curang terkait proses pembayaran proyek konstruksi.
	X4.2 Memanipulasi Informasi Proyek	Adanya perbuatan penyelewengan/berbuat curang terkait menyediakan informasi proyek.
	X4.3 Memanipulasi Pengawasan Proyek	Adanya perbuatan penyelewengan/berbuat curang terkait mengontrol (mengawasi dan memeriksa) proyek konstruksi.
	X4.4 Memanipulasi Keselamatan Kerja di Proyek	Adanya perbuatan penyelewengan/berbuat curang terkait praktek melakukan sesuatu perbuatan/keadaan dengan selamat di proyek konstruksi.
	X4.5 Memanipulasi Pendokumentasian Proyek	Adanya perbuatan penyelewengan/berbuat curang terkait mendokumentasikan (mengatur dan menyimpan sebagai dokumen) proyek konstruksi.

Definisi operasional/bentuk pertanyaan wawancara untuk mengidentifikasi penyebab dan solusi pelanggaran etika proyek konstruksi, sebagai berikut ini:

- Menurut Bapak/Ibu apakah yang mendorong sebabnya terjadi praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di Daerah (X)?
- Menurut Bapak/Ibu apakah cara-cara yang dapat meminimalkan praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di Daerah (X)?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas akan digunakan secara bersama-sama, dengan Tabel 2.2 Pernyataan Penyebab Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Tinjauan Pustaka, dan Tabel 2.3 Pernyataan Solusi Meminimalkan Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Tinjauan Pustaka, sebagai pedoman wawancara bagi peneliti. Bentuk operasional pedoman wawancara dipaparkan pada Lampiran 2 Bentuk Pedoman Wawancara Penyebab dan Cara

Minimalisasi Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian.

3.3 Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti. Pengumpulan data menggunakan metode sampel, dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner berjenis pertanyaan tertutup dan wawancara terstruktur.

Kuesioner penelitian digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang pertama, yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan persepsi kelompok-kelompok responden untuk mengetahui bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, dan mengetahui tingkat persepsi (“keyakinan”) responden terhadap frekuensi dan dampak dari praktek-praktek pelanggaran etika proyek konstruksi yang teridentifikasi, di Daerah penelitian saat ini

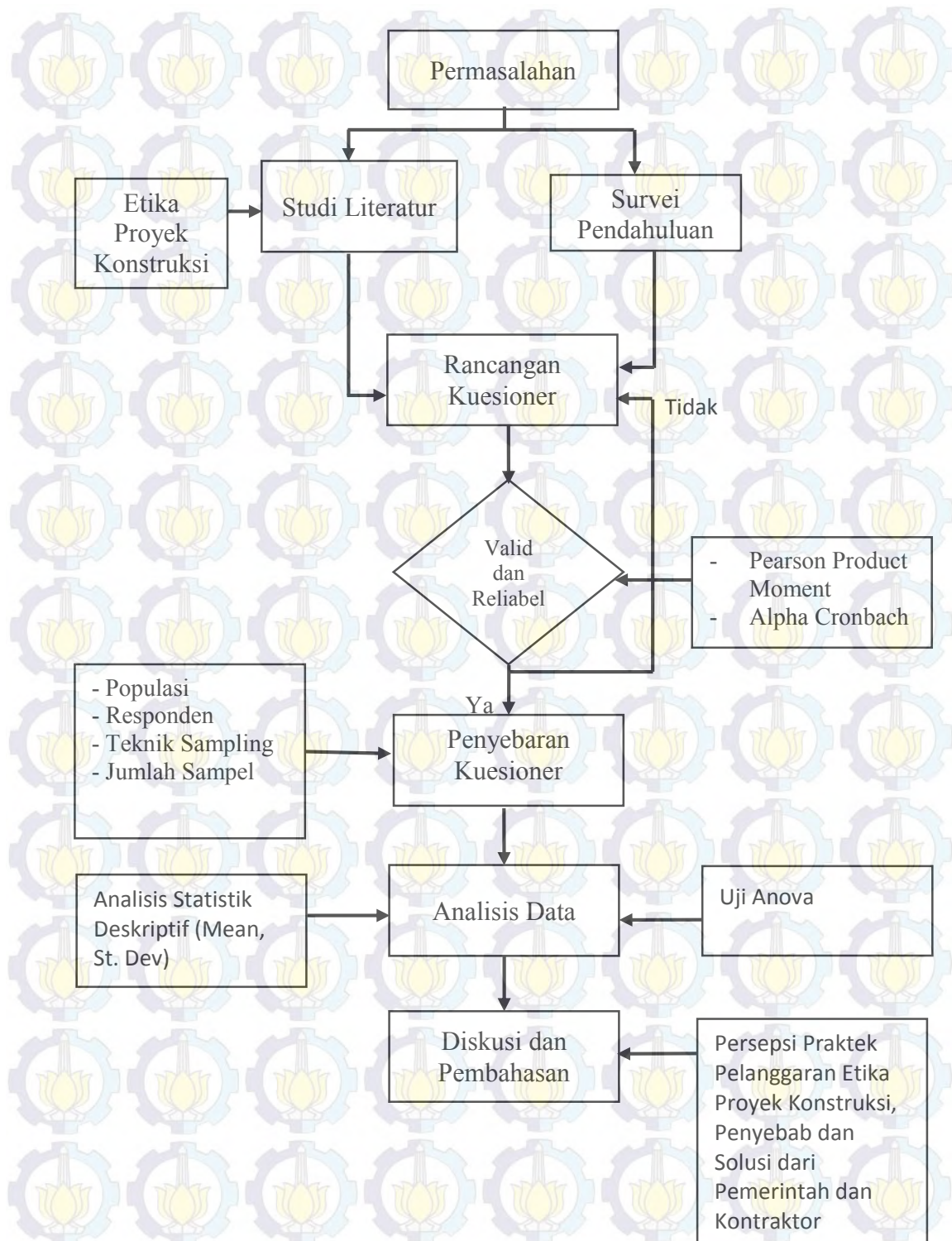
Menjawab permasalahan penelitian selanjutnya, untuk mengetahui penyebab dan solusi yang dapat meminimalkan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di Daerah penelitian, dilakukan melalui wawancara terstruktur. Pada pedoman wawancara berstruktur, setiap pertanyaan telah disiapkan alternatif jawabannya, maka tugas pewawancara hanya mencocokkan jawaban responden dengan salah satu alternatif jawaban yang telah tersedia. Tugas mencatat dilakukan pewawancara apabila jawaban responden (informan) ternyata tidak sesuai dengan semua alternatif jawaban yang telah tersedia (Silaen & Widiono, 2013).

3.4 Bagan Alir Penelitian

Alur dalam penelitian ini disusun sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitian. Adapun tahapan dalam penelitian ini dipaparkan pada Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian, di halaman berikut ini.

3.5 Populasi dan Sampel

Pemaparan sampel penelitian dimulai dari memaparkan metode dan teknik pengambilan sampel penelitian, diikuti dengan memaparkan metode penentuan jumlah sampel penelitian, dan terakhir memaparkan para responden penelitian.



Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian

3.5.1 Metode dan teknik pengambilan sampel

Pengambilan atau penarikan sampel menggunakan, teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*) untuk mendapatkan sampel responden pemerintah dan

responden ahli, dan teknik sampel acak sederhana (*simple random sampling*) untuk mendapatkan sampel responden kontraktor.

3.5.2 Penentuan jumlah sampel

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini diharapkan dapat memprediksi populasi, sehingga sampel merupakan representatif dari populasi. Menentukan jumlah sampel responden kontraktor, menggunakan rumus Slovin:

Persamaan 3.1 Rumus Slovin

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

dengan:

e (error) = persentase tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi (5%)

n = jumlah sampel

N = Jumlah populasi

3.5.3 Responden penelitian

Responden penelitian berasal dari pemerintah dan kontraktor, yang sebagai pelaksana proyek konstruksi. Pengambilan responden penelitian dengan batasan-batasan seperti pada penjelasan berikut ini.

3.5.3.1 Responden pemerintah

PPK proyek konstruksi saat ini (tahun 2014) sebanyak tujuh orang. Pemilahan berdasarkan instansi asal PPK dan jumlah PPK per instansi dipaparkan pada Tabel 3.2 PPK Proyek Konstruksi di Daerah (X) Tahun 2014, dibawah ini.

Tabel 3.2 PPK Proyek Konstruksi di Daerah (X) Tahun 2014

PPK Berdasarkan Jenis Proyek Konstruksi	Jumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
PPK Bangunan Gedung	4 PPK
PPK Jalan dan Jembatan	2 PPK
PPK Bangunan Irigasi	1 PPK

Sumber: Seksi Perijinan DPU, Agustus 2014

Responden dari pemerintah adalah para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk dengan Surat Keputusan (SK) sebagai pelaksana proyek konstruksi di Daerah penelitian saat ini.

Dengan menggunakan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*) untuk mendapatkan jumlah responden pemerintah, maka jumlah responden pemerintah adalah sesuai dengan jumlah responden pemerintah (PPK) yang dituju yang sebagai pelaksana proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian saat ini, yaitu sebanyak tujuh orang responden.

3.5.3.2 Responden kontraktor

Responden dari kontraktor adalah sampel para kontraktor, sebagai anggota Gapensi yang masih aktif, ada melaksanakan kegiatan pemborongan pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir di Daerah penelitian, dan memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), di Daerah penelitian, yang terdaftar dan masih berlaku. Batasan berikutnya adalah berdasarkan Gred perusahaan. Gred perusahaan yang menjadi sampel adalah Gred 5 (17 kontraktor) dan Gred 6 (9 kontraktor), data ini peneliti peroleh dengan mendatangi langsung ke instansi yang mengeluarkan SIUJK dan Gapensi. Dengan menggunakan rumus Slovin jumlah sampel responden untuk Kontraktor adalah: 25 responden.

$$n = \frac{26}{1+(26 \times 5\%^2)} = 24.5 \approx 25 \text{ responden}$$

3.5.3.3 Responden ahli

Metode untuk mendapatkan responden ahli dengan teknik *Purposive Sampling*. Sampel responden ahli merujuk pada satu orang PPK dan satu orang Kontraktor, yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja dalam lingkup proyek konstruksi pemerintah, dan yang memahami bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika proyek konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian. Pengalaman kerja masing-masing responden ahli, yaitu pengalaman kerja PPK di atas dua puluh tahun, dan pengalaman kerja Kontraktor diantara 5-10 tahun.

Tabel 3.3 Responden Ahli

Responden Ahli	Jabatan	Pengalaman Kerja
1. Pemerintah	PPK Proyek Konstruksi	> 20 Tahun
2. Kontraktor	Kontraktor Proyek Konstruksi	5 – 10 Tahun

Peran responden ahli yakni untuk memberi keterangan tambahan yang diperlukan, yang akan digunakan untuk mendeskripsikan hasil identifikasi penyebab dan solusi pelanggaran etika proyek konstruksi; dan, peran utama responden ahli, yakni untuk mendiskusikan dan dimintai pendapat serta penjelasan, untuk mendeskripsikan variabel yang setelah melalui uji Anova ternyata memiliki perbedaan persepsi penilaian dampak pelanggaran etika, diantara kelompok responden PPK dengan Kontraktor.

3.6 Tipe Skala Pengukuran Data

Jenis skala pengukuran data menggunakan skala Likert. Setiap jawaban dihubungkan dalam bentuk pernyataan atau dukungan sikap dengan penilaian sebagai berikut.

Mengukur persepsi tingkat persetujuan terhadap variabel pelanggaran etika proyek konstruksi, akan menggunakan skala pengukuran seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.4 Skala Likert Pengukuran Data Tingkat Persetujuan.

Tabel 3.4 Skala Likert Pengukuran Data Tingkat Persetujuan

Mengukur Tingkat Persetujuan Terhadap Variabel yang Diyakini Merupakan Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi	Nilai
Sangat Tidak Setuju “Merupakan Pelanggaran Etika”	1
Tidak Setuju “Merupakan Pelanggaran Etika”	2
Cukup Setuju “Merupakan Pelanggaran Etika”	3
Setuju “Merupakan Pelanggaran Etika”	4
Sangat Setuju “Merupakan Pelanggaran Etika”	5

(Silaen & Widiono, 2013)

Operasionalisasi skala pengukuran data tingkat persetujuan, dalam penelitian ini, digunakan untuk mendapatkan “persepsi” para responden, terhadap bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika proyek konstruksi dari variabel penelitian, yang “diyakini responden” terjadi sebagai bagian bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika proyek konstruksi dalam lingkup proyek konstruksi Pemerintah di

Daerah penelitian. Skala penilaiannya dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju, yang merefleksikan tanggapan “tingkat keyakinan responden” bahwa variabel penelitian diyakini sebagai bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah.

Mengukur persepsi penilaian dampak, dan tingkat frekuensi, terhadap variabel praktek-praktek pelanggaran etika proyek konstruksi, akan menggunakan skala pengukuran yang ditunjukkan pada Tabel 3.5 Skala Likert Penilaian Dampak dan Tingkat Frekuensi.

Skala pengukuran data penilaian dampak, digunakan untuk mendapatkan persepsi para responden, yang merupakan sebagai bentuk “keyakinan” responden, terhadap penilaian tingkat dampak untuk setiap bentuk praktek pelanggaran etika proyek konstruksi yang telah disetujui oleh responden sebelumnya untuk menjawab

Tabel 3.5 Skala Likert Penilaian Dampak dan Tingkat Frekuensi

Nilai	Dampak Terhadap Proyek Konstruksi	Tingkat Frekuensi
1	Sangat Tidak Berdampak	Sangat Jarang (sekali dalam ≥ 5 tahun)
2	Tidak Berdampak	Jarang (sekali dalam 3-4 tahun)
3	Cukup Berdampak	Cukup Sering (sekali dalam 1-2 tahun)
4	Berdampak	Sering (di kurang dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)
5	Sangat Berdampak	Sangat Sering (di lebih dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)

pertanyaan praktek-praktek tersebut dapat berdampak terhadap apakah biaya, mutu, ataupun organisasi. Skala penilaiannya dari sangat tidak berdampak hingga sangat berdampak, yang merefleksikan tanggapan responden bahwa variabel penelitian memiliki dampak tertentu dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Berikut di bawah ini diadopsi skala interpretasi dampak terhadap biaya, organisasi, dan mutu dari (UN, 2013).

- Terhadap keuangan:

Sangat tidak berdampak merefleksikan kerugian keuangan $<5\%$; tidak berdampak merefleksikan kerugian keuangan antara 5% dan 10% ; cukup

berdampak merefleksikan kerugian keuangan antara 10% dan 20%; berdampak merefleksikan kerugian keuangan antara 20% dan 30%; sangat berdampak merefleksikan kerugian keuangan > 30%.

- Terhadap reputasi organisasi:

Sangat tidak berdampak merefleksikan minimal perhatian media lokal; tidak berdampak merefleksikan perhatian media lokal dan cepat tersebar; cukup berdampak merefleksikan liputan media lokal secara berkelanjutan dengan meningkatnya implikasi kepada pelanggan; berdampak merefleksikan menjadi perhatian nasional atau liputan pers daerah berkelanjutan dengan permasalahan jangka panjang untuk citra publik; sangat berdampak merefleksikan menjadi liputan media-media nasional.

- Terhadap mutu dari perikatan perjanjian pemborongan

Sangat tidak berdampak merefleksikan peringatan yang membutuhkan tindakan administratif; tidak berdampak merefleksikan denda minimal dan hukuman dapat dikenakan melalui pemeriksaan; cukup berdampak merefleksikan proses pemeriksaan dan/atau proses hukum ditegakkan dan denda besar; berdampak merefleksikan penyelidikan, dikenakan denda besar dan hukuman yang dapat mencakup beberapa tuntutan pidana; sangat berdampak merefleksikan penyelidikan, dikenakan denda besar dan hukuman termasuk tuntutan pidana.

Skala pengukuran data penilaian frekuensi, digunakan untuk mendapatkan persepsi para responden, yang merupakan sebagai bentuk “keyakinan” responden, terhadap penilaian “frekuensi terjadinya praktek-praktek pelanggaran etika proyek konstruksi yang telah disetujui responden sebelumnya.” Skala penilaian frekuensi dari sangat jarang hingga sangat sering, yang merefleksikan tanggapan responden, bahwa setiap variabel penelitian memiliki tingkat frekuensi tertentu dalam aktivitas pengadaan proyek konstruksi. Skala pengukuran dibuat dengan mempertimbangkan skala dari (*Pujianto, 2014*), Sangat jarang merefleksikan frekuensi terjadinya sekali dalam ≥ 5 tahun; jarang merefleksikan frekuensi terjadinya sekali dalam 3-4 tahun; cukup sering merefleksikan frekuensi terjadinya sekali dalam 1-2 tahun; sering merefleksikan frekuensi terjadinya di kurang dari

separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran; dan, sangat sering merefleksikan frekuensi terjadinya di lebih dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran.

3.7 Validitas dan Reliabilitas

Data penelitian yang terkumpul sebelum dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji validitas untuk mengetahui kevaliditasan data, dan uji reliabilitas untuk mengetahui kehandalan alat pengumpulan data.

3.7.1 Validitas

Pengukuran validitas menggunakan, uji Pearson Product Moment atau analisis korelasi untuk mencari hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Rumus yang dikemukakan Riduan, (2011:227) sebagai berikut ini, yang ditunjukkan pada halaman setelah ini:

Persamaan 3.2 Pearson Product Moment

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2][n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}}, \quad (3.2)$$

dengan:

- r_{xy} = koefisien korelasi suatu butir/item
- n = jumlah subyek
- X = skor suatu butir/item
- Y = skor total

Menguji signifikan dengan rumus t test atau t hitung. Jika t hitung \geq dari t tabel maka signifikan (atau valid), dan sebaliknya Apabila ada variabel penelitian yang tidak valid, langkah selanjutnya melakukan kuesioner ulang/penyebaran ulang kuesioner untuk variabel yang tidak valid.

3.7.2 Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach. Penggunaan rumus Alpha Cronbach untuk mencari nilai koefisien reliabilitas instrument, dengan rumus di bawah ini (Silaen & Widiono, 2013:117). Kuesioner dikatakan reliabel bila nilai Alpha Cronbach (α) > 0.6 .

Persamaan 3.3 Alpha Cronbach

$$r = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{V_i}{V_t} \right] \quad (3.3)$$

dengan:

r_{11} = reliabilitas instrumen

k = banyaknya item/butir pertanyaan

V_i = varians item ke-i

V_t^2 = varians total

3.8 Teknik Analisis dan Penyajian Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode analisis statistik deskriptif dan uji Anova, untuk menarik kesimpulan dari data penelitian yang diperoleh. Data yang terkumpul dianalisis statistik dengan menggunakan program Statistical Program for Social Science (SPSS) 16.0.

Hasil statistik deskriptif yaitu dengan menunjukkan nilai minimum (*min*), maksimum (*max*) nilai rata-rata (*mean*), dan deviasi standar (*std. dev*) dari observasi variabel penelitian. Hasil olah data dalam bentuk statistik deskriptif disajikan dalam bentuk tabel dan gambar (matriks).

Metode untuk memperoleh jawaban penyebab pelanggaran etika, dan solusi untuk meminimalkan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian, yakni dengan mengajukan pertanyaan berupa draft wawancara kepada semua para responden, pada penelitian ini berjumlah 32 responden. Draft wawancara untuk mengidentifikasi penyebab dan solusi praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian, dipaparkan pada Tabel 2.2 Pernyataan Penyebab Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Tinjauan Pustaka, dan Tabel 2.3 Pernyataan Solusi Meminimalkan Bentuk-bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Tinjauan Pustaka. Jawaban yang diperoleh dari para responden, kemudian didiskusikan atau dimintai keterangan dari responden ahli. Responden ahli pada penelitian ini, dipaparkan pada Tabel 3.3 Responden Ahli.

Uji Anova pada penelitian ini, dilakukan untuk mengkaji apakah ada perbedaan persepsi antara PPK dengan Kontraktor, terhadap rata-rata penilaian persepsi dampak pelanggaran etika. Hasilnya untuk setiap variabel yang terdapat perbedaan persepsi, akan dijelaskan mengapa terdapat perbedaan persepsi. Untuk menjelaskan mengapa terdapat perbedaan, akan dimintai pendapat dan penjelasan dari responden ahli.

Mengkomunikasikan hasil penelitian hubungan antara persepsi tingkat frekuensi pelanggaran etika dan dampak pelanggaran etika proyek konstruksi digunakan matriks *Simple Heat Map Background*. Melalui matriks *Simple Heat Map Background* dapat menunjukkan bentuk-bentuk pelanggaran etika yang teridentifikasi, yang diplotkan sesuai dengan skala frekuensi (probabilitas) dan skala dampak sebagai indikator untuk mengetahui status pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di Daerah penelitian saat ini, berdasarkan persepsi PPK dan Kontraktor.

Warna yang digunakan pada bidang matriks menunjukkan tingkat resiko yang berbeda, warna yang terdapat yaitu merah, kuning, dan hijau, yang masing-masing menunjukkan risiko tinggi, risiko menengah, dan risiko rendah. Matriks *Simple Heat Map Background* dapat digunakan untuk menggambarkan tampilan menurut lokasi, unit bisnis, atau fungsi. Untuk menyusun Matriks *Simple Heat Map Background* dari volume data yang lebih besar, dapat dilakukan dengan mengelompokkan skema korupsi (misalnya: suap, konflik kepentingan, kolusi, penghindaran pajak, informasi ilegal, *revolving door*, *patronage*) tertentu untuk membangun suatu skor kategori/rating untuk menilai risiko. Pendekatan pemetaan hasil identifikasi status pelanggaran etika saat ini dapat merekomendasikan tiga hal, terhadap kategori pelanggaran etika proyek konstruksi, yaitu: “Kategori Pelanggaran Tinggi” membutuhkan perhatian manajemen yang aktif dalam penanganan pelanggaran etika proyek konstruksi; “Kategori Pelanggaran Menengah” membutuhkan perhatian manajemen yang secara berkala dalam penanganan pelanggaran etika proyek konstruksi; “Kategori Pelanggaran Rendah” mencerminkan proses pengelolaan risiko yang memadai, dan dapat melanjutkan

pemantauan, untuk mengkonfirmasi isu pelanggaran etika proyek konstruksi secara berkala (UN, 2013).

Mengukur status pelanggaran etika saat ini, dinilai dari penilaian persepsi dampak, dan penilaian persepsi frekuensi, yang diberikan oleh masing-masing kelompok responden untuk setiap variabel bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika proyek konstruksi pemerintah, yang kemudian akan diplotkan dalam matrik *Simple Heat Map Background*, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.2 Teknik Penyajian Hasil Status Pelanggaran Etika.

Dampak	Besar (High)		X2	
	Sedang (Medium)	X1		X3
	Kecil (Low)			X4
		Kecil (Remote)	Cukup Mungkin (Possible)	Sangat Mungkin (Probable)
		Frekuensi (probabilitas)		

X1, X2, X3, X4: Dimensi variabel penelitian

Gambar 3.2 Teknik Penyajian Hasil Status Pelanggaran Etika

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1 Lokasi Penelitian dan Gambaran Pembangunan Infrastruktur

Lingkup wilayah pengambilan data berada di Daerah penelitian. Daerah penelitian adalah salah satu wilayah administrasi Kabupaten di Indonesia, yang semenjak tanggal 11 Desember tahun 2002 menjadi kabupaten baru, yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2002 tentang pembentukan 14 kabupaten baru (Pemerintah Daerah penelitian, 2006).

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah adalah pendukung utama pembangunan, dalam rangka peningkatan akses di daerah-daerah terpencil dan terisolir, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, dan penataan kota di daerah penelitian menuju kota modern. Sehingga, melalui rencana strategis pembangunan di Daerah penelitian, salah satu aspek yang diprioritaskan ialah meningkatkan aksesibilitas wilayah. Peningkatan aksesibilitas wilayah, yakni dengan membuka akses pada seluruh wilayah terpencil, melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, permukiman, air bersih, sanitasi, energi, dan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi. Semuanya itu diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, dan mendorong terjadinya peningkatan perekonomian masyarakat di Daerah penelitian. Pada Tabel 4.1 Arah Pembangunan Infrastruktur di Daerah penelitian, di halaman berikut ini, memaparkan kondisi awal pembangunan infrastruktur di akhir rencana strategis tahap 1, dan target pembangunan infrastruktur di akhir tahap 2, dari rencana strategis pembangunan infrastruktur Pemerintah di Daerah penelitian.

Salah satu arah pembangunan sarana dan prasarana, khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana permukiman di Daerah penelitian. Permukiman di Daerah penelitian terdiri dari permukiman kampung dan permukiman kota. Secara umum kawasan permukiman di wilayah Daerah penelitian berkembang secara linear, mengikuti jaringan jalan ataupun mengikuti pantai, namun untuk permukiman penduduk yang berada di perkotaan, di daerah penelitian, membentuk pola grid (persegi), dan juga untuk pengembangan kompleks perumahan aparaturnya

pemerintah. Pemukiman yang berada di luar perkotaan, memiliki kondisi yang relatif terpisah atau menyebar dengan jarak antar kampung yang relatif jauh (rata-rata lebih dari 5 km), sementara pemukiman pada perkotaan memiliki pola yang memusat dan berdekatan (Profil Daerah penelitian, 2014).

Tabel 4.1 Arah Pembangunan Infrastruktur di Daerah penelitian

Menyediakan Sarana dan Prasarana Daerah				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2016
1. Terwujudnya Kota (X) yang aman, nyaman dan lestari	Tertatanya Kota (X) sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Konsistensi pelaksanaan RDTR kota (X)	Belum konsisten	Konsistensi
2. Meningkatkan aksesibilitas wilayah	Teraksesnya wilayah-wilayah terpencil	Persentase akses jalan ke wilayah terpencil	40 %	80 %
3. Meningkatkan sarana & prasarana penunjang	Akses air bersih dan sanitasi	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang Menggunakan Air Bersih	40 %	80 %
	Akses terhadap energi listrik	Presentasi KK yang menggunakan energy listrik	50 %	90 %
	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Rakyat layak huni	Presentasi KK yang memiliki rumah layak huni	50 %	90 %
	Tersediannya sarana prasarana Olah raga yang memadai	Persentase ketersediaan sarana prasarana olah raga	40 %	80 %

Sumber: Pemerintah (X), 2014

4.2 Pengumpulan dan Persiapan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan di Daerah penelitian, dengan menggunakan alat pengumpulan data kuesioner dan melalui wawancara. Data yang dikumpulkan merupakan data persepsi responden, terhadap pelanggaran etika proyek konstruksi. Responden penelitian dikelompokkan menjadi responden PPK dan Kontraktor.

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mendatangi langsung setiap responden. Untuk pengumpulan data, langkah awal yang dilakukan ialah mempersiapkan data para responden, yakni data responden PPK tahun 2014, data klasifikasi Gred untuk responden Kontraktor, dan alamat para responden yang bisa dihubungi. Langkah selanjutnya, melakukan persiapan pengumpulan data dan pengolahan data.

Pada Tabel 4.2 Profil Responden dan Data Terkumpul, memaparkan data profil responden untuk masing-masing kelompok responden, menurut jumlah data sampel yang dibutuhkan dan data sampel yang terkumpul.

Tabel 4.2 Profil Responden dan Data Terkumpul

Jumlah Responden	Jabatan	Pengalamam Kerja	Sampel Terkumpul
Pemerintah: 7 Responden	PPK	3 responden: 5-10 tahun 4 responden: di atas 20 tahun	100%
Kontraktor: 25 Responden	Pelaksana	9 responden: 5-10 tahun 11 responden: 10-15 tahun 5 responden: di atas 20 tahun	100%

Kuesioner yang disebarkan kepada responden pemerintah (PPK) sebanyak 7 Kuesioner, kemudian yang dikembalikan 7 kuesioner (100% terkumpul).

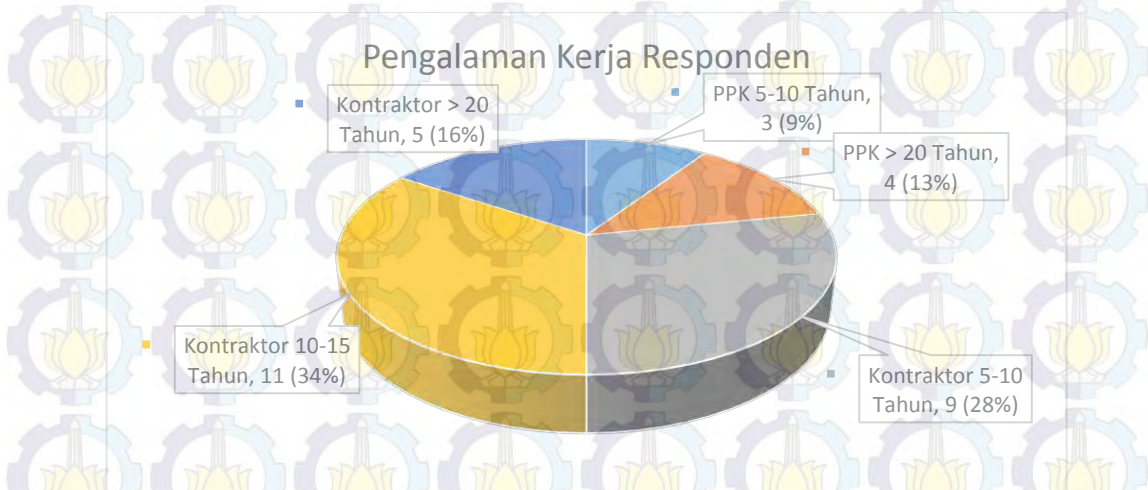
Kuesioner yang disebarkan kepada responden Kontraktor sebanyak 25 Kuesioner, kemudian yang dikembalikan 25 kuesioner (100% terkumpul), yang jika dipilah berdasarkan Gred kontraktor, terdiri dari kontraktor Gred 5 sebanyak 18 responden dan kontraktor Gred 6 sebanyak 7 responden.

Banyaknya responden penelitian untuk kelompok PPK dan Kontraktor dipaparkan pada Gambar 4.1 Jumlah Responden Penelitian, di halaman berikut ini. Pada gambar 4.1, khusus untuk responden Kontraktor yang tersampel dapat dibedakan berdasarkan Gred, maka dapat terlihat jumlah kontraktor berdasarkan Gred 5 dan Gred 6.



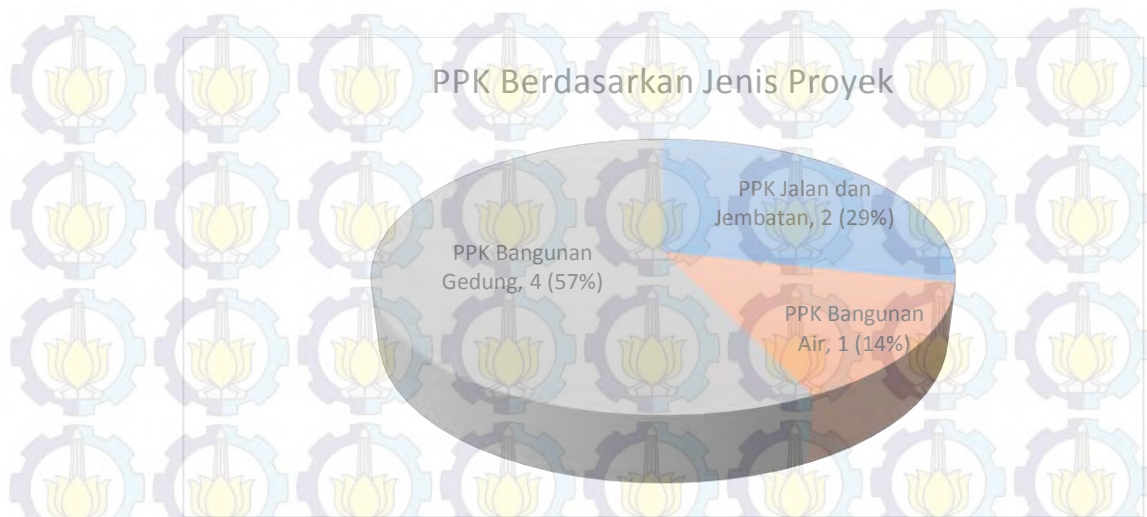
Gambar 4.1 Jumlah Responden Penelitian

Pada gambar 4.1, memaparkan jumlah responden dan persentase bagian dari sampel penelitian. Jumlah responden PPK sebanyak 7 responden (22%), dan jumlah responden Kontraktor dengan Gred 5 sebanyak 18 responden (56%), dan Gred 6 sebanyak 7 responden (22%).



Gambar 4.2 Pengalaman Kerja Responden PPK dan Kontraktor

Pada Gambar 4.2 Pengalaman Kerja Responden PPK, memaparkan pengalaman kerja untuk PPK dan Kontraktor, masing-masing: 3 responden PPK dengan pengalaman kerja diantara 5 sampai dengan 10 tahun, dan 4 responden PPK dengan pengalaman kerja di atas 20 tahun; dan, 9 responden Kontraktor dengan pengalaman kerja diantara 5 sampai dengan 10 tahun, 11 responden Kontraktor dengan pengalaman kerja diantara 10 sampai dengan 15 tahun, dan 5 responden Kontraktor dengan pengalaman kerja di atas 20 tahun.



Gambar 4.3 Jenis Proyek yang Ditugaskan Kepada Responden PPK

Pada Gambar 4.3 Jenis Proyek yang Ditugaskan Kepada Responden PPK, memaparkan jenis proyek yang ditugaskan untuk masing-masing PPK. Jenis proyek yang ditugaskan sangat terkait dengan instansi tempat PPK bertugas, sehingga jika dijabarkan 1 PPK menangani proyek konstruksi jalan dan jembatan, 2 PPK yang menangani proyek konstruksi bangunan air, dan 5 PPK yang menangani proyek konstruksi bangunan gedung.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya ditabulasi untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas, dan jika hasil yang diperoleh tersebut valid dan reliabel maka akan dilakukan analisis lanjutan. Analisis lanjutan yakni analisis Statistik Deskriptif dan uji Anova untuk menjawab permasalahan penelitian.

Secara ringkas tahapan dalam pembahasan ini untuk mengkaji tiga hal, yaitu:

- Pertama: Mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian, dari persepsi PPK dan Kontraktor;
- Kedua: Menilai status saat ini praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah di Daerah penelitian, dilakukan melalui menghubungkan penilaian persepsi frekuensi dengan persepsi dampak dari bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika proyek konstruksi, dan melakukan uji Anova terhadap data penilaian persepsi dampak;

- Ketiga: Mengidentifikasi dan mendeskripsikan penyebab dan solusi untuk meminimalkan praktek pelanggaran etika proyek konstruksi pemerintah saat ini, di Daerah penelitian, dari persepsi responden penelitian dan responden ahli.

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

Berikut ini dipaparkan hasil uji validitas data yang terkumpul, dan uji reliabilitas instrument alat pengumpulan data kuesioner.

4.3.1 Uji validitas

Mengetahui valid atau tidak valid setiap butir pertanyaan dalam instrument pengambilan data, maka perlu mengkorelasikan tujuh belas koefisien korelasi dengan analisis Product Moment menggunakan Statistical Program for Social Science (SPSS) 16.0. Uji validitas dilakukan untuk data persepsi tingkat persetujuan, frekuensi, dan dampak, terhadap bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di Daerah penelitian. Data yang dilakukan uji validitas adalah data yang diperoleh dari jawaban keseluruhan responden penelitian, yang berjumlah tiga puluh dua responden.

Tabel 4.3 Validitas Persetujuan Praktek Pelanggaran Etika Proyek Kontruksi

Variabel	Pearson Correlation	r Tabel	Pearson Correlation > r Tabel, maka "Valid"
X1.1	.788**	0.349	Valid
X1.2	.693**	0.349	Valid
X1.3	.942**	0.349	Valid
X1.4	.722**	0.349	Valid
X2.5	.648**	0.349	Valid
X2.6	.633**	0.349	Valid
X2.7	.679**	0.349	Valid
X2.8	.838**	0.349	Valid
X2.9	.557**	0.349	Valid
X3.10	.974**	0.349	Valid
X3.11	.974**	0.349	Valid
X3.12	.902**	0.349	Valid
X4.13	.714**	0.349	Valid
X4.14	.543**	0.349	Valid
X4.15	.688**	0.349	Valid
X4.16	.740**	0.349	Valid
X4.17	.741**	0.349	Valid

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pada Tabel 4.3 Validitas Persetujuan Praktek Pelanggaran Etika Proyek Kontruksi, di dalam sebelum ini, memaparkan hasil korelasi ketujuh belas butir instrumen dengan masing-masing skor total dimensi variabel, yang digunakan untuk memperoleh data persepsi persetujuan yang diyakini merupakan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian.

Hasil korelasi di atas untuk setiap dimensi variabel penelitian, memiliki koefisien korelasi lebih besar dari koefisien r Tabel, maka konstruk variabel penelitian disimpulkan valid, sehingga telah tepat atau dapat digunakan, untuk memperoleh data persepsi bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian.

Pada Tabel 4.4 Validitas Frekuensi Praktek Pelanggaran Etika Proyek Kontruksi, memaparkan hasil korelasi ketujuh belas butir instrumen dengan masing-masing skor total dimensi variabel, yang digunakan untuk memperoleh data persepsi frekuensi pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian saat ini.

Tabel 4.4 Validitas Frekuensi Praktek Pelanggaran Etika Proyek Kontruksi

Variabel	Pearson Correlation	r Tabel	Keterangan Pearson Correlation > r Tabel, maka "Valid"
X1.1	.523**	0.349	Valid
X1.2	.749**	0.349	Valid
X1.3	.700**	0.349	Valid
X1.4	.819**	0.349	Valid
X2.5	.865**	0.349	Valid
X2.6	.928**	0.349	Valid
X2.7	.775**	0.349	Valid
X2.8	.769**	0.349	Valid
X2.9	.886**	0.349	Valid
X3.10	.877**	0.349	Valid
X3.11	.813**	0.349	Valid
X3.12	.661**	0.349	Valid
X4.13	.848**	0.349	Valid
X4.14	.720**	0.349	Valid
X4.15	.733**	0.349	Valid
X4.16	.555**	0.349	Valid
X4.17	.791**	0.349	Valid

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil korelasi di atas untuk setiap dimensi variabel penelitian, memiliki koefisien korelasi lebih besar dari koefisien r Tabel, maka konstruk variabel penelitian disimpulkan valid, sehingga telah tepat atau dapat digunakan, untuk memperoleh data persepsi frekuensi praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di Daerah penelitian.

Pada Tabel 4.5 Validitas Dampak Praktek Pelanggaran Etika Proyek Kontruksi, memaparkan hasil korelasi ketujuh belas butir instrumen dengan masing-masing skor total dimensi variabel pelanggaran etika proyek konstruksi, yang digunakan untuk memperoleh data persepsi dampak pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian.

Tabel 4.5 Validitas Dampak Praktek Pelanggaran Etika Proyek Kontruksi

Variabel	Pearson Correlation	r Tabel	Keterangan Pearson Correlation > r Tabel Maka "Valid"
X1.1	.757**	0.349	Valid
X1.2	.698**	0.349	Valid
X1.3	.675**	0.349	Valid
X1.4	.632**	0.349	Valid
X2.5	.623**	0.349	Valid
X2.6	.776**	0.349	Valid
X2.7	.770**	0.349	Valid
X2.8	.579**	0.349	Valid
X2.9	.824**	0.349	Valid
X3.10	.893**	0.349	Valid
X3.11	.900**	0.349	Valid
X3.12	.887**	0.349	Valid
X4.13	.798**	0.349	Valid
X4.14	.864**	0.349	Valid
X4.15	.665**	0.349	Valid
X4.16	.749**	0.349	Valid
X4.17	.691**	0.349	Valid

***. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*

Hasil korelasi di atas untuk setiap dimensi variabel penelitian, memiliki koefisien korelasi lebih besar dari koefisien r Tabel, maka konstruk variabel penelitian disimpulkan valid, sehingga telah tepat atau dapat digunakan, untuk memperoleh data persepsi dampak praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian.

4.3.2 Uji reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan analisis Alpha Cronbach, menggunakan Statistical Program for Social Science (SPSS) 16.0, untuk mencari nilai koefisien reliabilitas instrumen. Jika koefisien reliabilitas atau alpha sebesar 0.6 atau lebih dapat dikatakan alat ukur yang digunakan handal untuk di pakai mengumpulkan data (Silaen & Widiono, 2013).

Pada Tabel 4.6 Uji Reliabilitas Instrumen, memaparkan hasil uji reliabilitas instrument kuesioner, yang digunakan untuk mengumpulkan data persepsi persetujuan yang diyakini merupakan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstuksi pemerintah, persepsi frekuensi pelanggaran etika saat ini, dan persepsi dampak praktek-praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian.

Tabel 4.6 Uji Reliabilitas Instrumen

Reliability Statistics					
Persetujuan		Frekuensi		Dampak	
Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items
.887	17	.898	17	.889	17

Dari hasil pengolahan data diperoleh koefisien Alpha untuk pengukuran reliabilitas instrument, pengumpulan data persetujuan, frekuensi, dan dampak, lebih besar dari 0.6, dengan demikian kuesioner yang digunakan dapat dikatakan handal dalam mengumpulkan data. Disimpulkan, data-data yang telah dikumpulkan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, untuk menjawab permasalahan penerlitan.

4.4 Analisis Data

Data penelitian yang telah di uji kevaliditasannya, akan digunakan selanjutnya untuk dianalisis menggunakan metode-metode statistik deskriptif dan uji Anova, sehingga menghasilkan informasi yang bermakna. Pengolahan data menggunakan program *Statistical Program for Social Science* (SPSS) 16.0.

Skala pengukurang menggunakan skala likert, dengan skor terendah 1 hingga skor tertinggi 5. Untuk mengintepretasi hasil rata-rata terhadap semua pengukuran data persepsi pada penelitian ini, digunakan analisis interpretasi rata-

rata skor, dengan bentuk persamaan dan kriteria kategori yang akan digunakan, seperti yang dipaparkan di bawah ini.

Persamaan 4.1 Interval Kelas

$$CL = \frac{Range}{C}$$

Keterangan:

CL = *class interval* (interval kelas);

Range = skor tertinggi – skor terendah; dan

C = jumlah kelas (umumnya sama dengan jumlah alternatif jawaban)

Dengan demikian interval kelas = $(5 - 1) : 5 = 0.8$, kemudian dapat disusun tabel kriteria interpretasi skor sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 4.7 Kriteria Kategori Berdasarkan Interval Skor

No.	Interval Kelas	Kategori
1.	1.00 – 1.79	Sangat tidak setuju “merupakan pelanggaran etika”; Sangat jarang; Sangat tidak berdampak.
2.	1.80 – 2.59	Tidak setuju “merupakan pelanggaran etika”; Jarang; Tidak berdampak.
3.	2.60 – 3.39	Cukup setuju “merupakan pelanggaran etika”; Cukup sering; Cukup Berdampak.
4.	3.40 – 4.19	Setuju “merupakan pelanggaran etika”; Sering; Berdampak.
5.	4.20 – 5.00	Sangat setuju “merupakan pelanggaran etika”; Sangat sering; Sangat berdampak.

4.4.1 Persetujuan bentuk praktek pelanggaran etika proyek konstruksi

Data persepsi persetujuan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika proyek konstruksi digunakan untuk memperoleh tanggapan responden, bawasanya variabel penelitian “diyakini” sebagai bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek Konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian. Sehingga, proses ini merupakan tahapan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian. Analisis deskriptif persetujuan

bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika proyek konstruksi dikelompokkan berdasarkan responden PPK dan Kontraktor. Masing-masing hasil statistik deskriptif berdasarkan responden dipaparkan di bawah ini.

Pada Tabel 4.8 Deskriptif Persepsi Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden PPK, memaparkan jumlah responden PPK yang memberikan tanggapan, nilai persepsi terendah dan tertinggi, nilai rata-rata jawaban, dan standar deviasi, untuk setiap variabel penelitian.

Tabel 4.8 Deskriptif Persepsi Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden PPK

Descriptive Statistics Responden PPK					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1. Mengakali Material	7	4	5	4.86	0.378
X2. Mengakali Volume Material	7	4	5	4.86	0.378
X3. Mengakali Dokumen	7	4	5	4.57	0.535
X4. Mengakali Biaya	7	4	5	4.57	0.535
X5. Tidak Adil dalam Tender	7	4	5	4.71	0.488
X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak	7	4	5	4.71	0.488
X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi)	7	4	5	4.43	0.535
X8. Perselisihan Kepentingan	7	4	5	4.43	0.535
X9. Tidak Adil dalam Informasi	7	4	5	4.29	0.488
X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai	7	3	5	4.14	0.69
X11. Menyogok dalam Bentuk Benda Berharga	7	3	5	4.14	0.69
X12. Menyogok dalam Bentuk Biaya Perjalanan	7	3	5	4.14	0.69
X13. Manipulasi Pembayaran	7	4	5	4.71	0.488
X14. Manipulasi Informasi Proyek	7	4	5	4.29	0.488
X15. Manipulasi Pengawasan Proyek	7	4	5	4.71	0.488
X16. Manipulasi Keselamatan Kerja di Proyek	7	4	5	4.57	0.535
X17. Manipulasi Pendokumentasian Proyek	7	4	5	4.43	0.535
Valid N (listwise)	7				

Persepsi responden PPK menunjukkan nilai interpretasi skor rata-rata terendah adalah 4.14, dengan kategori “Setuju Merupakan Pelanggaran Etika”, untuk tanggapan persetujuan responden terhadap variabel penyuapan yaitu menyogok

dalam bentuk uang tunai, benda berharga, dan biaya perjalanan. Sedangkan, untuk interpretasi skor rata-rata terhadap variabel penelitian lainnya berada pada rentang 4.20 – 5.00, dengan kategori “Sangat Setuju Merupakan Pelanggaran Etika”. Maka tanggapan rata-rata responden PPK diinterpretasikan atau diprediksi telah menyetujui, bahwa variabel penelitian sebagai bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian.

Tabel 4.9 Deskriptif Persepsi Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden Kontraktor

Descriptive Statistics Responden Kontraktor

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1. Mengakali Material	25	4	5	4.88	0.332
X2. Mengakali Volume Material	25	4	5	4.92	0.277
X3. Mengakali Dokumen	25	4	5	4.76	0.436
X4. Mengakali Biaya	25	4	5	4.8	0.408
X5. Tidak Adil dalam Tender	25	4	5	4.92	0.277
X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak	25	4	5	4.72	0.458
X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi)	25	4	5	4.92	0.277
X8. Perselisihan Kepentingan	25	4	5	4.88	0.332
X9. Tidak Adil dalam Informasi	25	4	5	4.48	0.51
X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai	25	4	5	4.88	0.332
X11. Menyogok dalam Bentuk Benda Berharga	25	4	5	4.88	0.332
X12. Menyogok dalam Bentuk Biaya Perjalanan	25	4	5	4.8	0.408
X13. Manipulasi Pembayaran	25	4	5	4.84	0.374
X14. Manipulasi Informasi Proyek	25	4	5	4.36	0.49
X15. Manipulasi Pengawasan Proyek	25	4	5	4.72	0.458
X16. Manipulasi Keselamatan Kerja di Proyek	25	4	5	4.92	0.277
X17. Manipulasi Pendokumentasian Proyek	25	4	5	4.84	0.374
Valid N (listwise)	25				

Pada Tabel 4.9 Deskriptif Persepsi Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden Kontraktor, di atas, memaparkan jumlah responden Kontraktor yang memberikan tanggapan, nilai persepsi terendah dan

tertinggi, nilai rata-rata jawaban, dan standar deviasi, terhadap setiap variabel penelitian.

Persepsi responden Kontraktor, menunjukkan nilai interpretasi skor rata-rata berada pada rentang 4.20 – 5.00, dengan kategori “Sangat Setuju Merupakan Pelanggaran Etika”, terhadap semua variabel penelitian. Maka tanggapan Kontraktor dapat diinterpretasikan atau diprediksi telah menyetujui, bahwa variabel penelitian sebagai bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian.

4.4.2 Persepsi frekuensi praktek pelanggaran etika proyek konstruksi

Penilaian persepsi frekuensi, bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, dilakukan untuk memperoleh tanggapan “yang merupakan tingkat keyakinan responden”, dalam menjawab pertanyaan: Seberapa seringkah terjadinya praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian saat ini? Analisis deskriptif frekuensi praktek pelanggaran etika proyek konstruksi dikelompokkan berdasarkan responden PPK dan kontraktor. Masing-masing hasil statistik deskriptif berdasarkan responden dipaparkan di bawah ini.

Pada Tabel 4.10 Deskriptif Persepsi Frekuensi Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden PPK, di halaman berikut ini, memaparkan jumlah responden PPK yang memberikan tanggapan, nilai persepsi terendah dan tertinggi, nilai rata-rata jawaban, dan standar deviasi, untuk setiap variabel penelitian.

Persepsi responden PPK menunjukkan nilai interpretasi skor rata-rata, masing-masing:

- Pada rentang 1.80 – 2.59 dengan kategori “Jarang” merujuk pada variabel penyuaipan yakni (X11) menyogok dalam bentuk benda berharga, dan variabel manipulasi yakni (X14) memanipulasi informasi proyek dan (X16) manipulasi keselamatan kerja proyek.
- Pada rentang 3.40 – 4.19 dengan kategori “Sering” merujuk pada variabel ketidakadilan yakni (X5) tidak adil dalam tender, (X6) tidak adil dalam

negosiasi kontrak, (X7) tidak adil dalam hubungan (terafiliasi), (X8) perselisihan kepentingan, dan (X9) tidak adil dalam informasi; variabel penyuapan dalam bentuk (X10) uang tunai dan (X12) biaya perjalanan; variabel manipulasi dalam bentuk (X13) memanipulasi pembayaran, (X15) mengawasi proyek, dan (X17) pendokumentasian proyek.

- Pada rentang 4.20 – 5.00 dengan kategori “Sangat Sering” merujuk pada variabel penipuan dalam bentuk (X1) mengakali material, (X2) memanipulasi volume proyek, (X3) mengakali dokumen proyek, dan (X4) mengakali biaya.

Tabel 4.10 Deskriptif Persepsi Frekuensi Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden PPK

Descriptive Statistics Responden PPK					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1. Mengakali Material	7	4	5	4.29	0.488
X2. Mengakali Volume Material	7	4	5	4.29	0.488
X3. Mengakali Dokumen	7	3	5	4.29	0.756
X4. Mengakali Biaya	7	4	5	4.29	0.488
X5. Tidak Adil dalam Tender	7	3	4	3.43	0.535
X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak	7	3	4	3.43	0.535
X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi)	7	3	4	3.43	0.535
X8. Perselisihan Kepentingan	7	3	4	3.43	0.535
X9. Tidak Adil dalam Informasi	7	3	4	3.43	0.535
X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai	7	3	4	3.43	0.535
X11. Menyogok dalam Bentuk Benda Berharga	7	2	3	2.43	0.535
X12. Menyogok dalam Bentuk Biaya Perjalanan	7	3	4	3.57	0.535
X13. Memanipulasi Pembayaran	7	3	4	3.43	0.535
X14. Memanipulasi Informasi Proyek	7	2	3	2.43	0.535
X15. Memanipulasi Pengawasan Proyek	7	3	4	3.86	0.378
X16. Memanipulasi Keselamatan Kerja di Proyek	7	1	3	2.29	0.756
X17. Memanipulasi Pendokumentasian Proyek	7	3	4	3.86	0.378
Valid N (listwise)	7				

Pada Tabel 4.11 Deskripsi Persepsi Frekuensi Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden Kontraktor, memaparkan jumlah responden Kontraktor yang memberikan tanggapan, nilai persepsi terendah dan

tertinggi, nilai rata-rata jawaban, dan standar deviasi, untuk setiap variabel penelitian.

Tabel 4.11 Deskripsi Persepsi Frekuensi Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden Kontraktor

Descriptive Statistics Responden Kontraktor

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1. Mengakali Material	25	1	5	3.92	1.382
X2. Mengakali Volume Material	25	1	5	3.56	1.261
X3. Mengakali Dokumen	25	1	4	2.92	0.909
X4. Mengakali Biaya	25	1	5	2.44	1.583
X5. Tidak Adil dalam Tender	25	1	5	2.52	1.418
X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak	25	1	5	2.08	1.222
X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi)	25	1	5	2.56	1.417
X8. Perselisihan Kepentingan	25	1	5	2.36	1.497
X9. Tidak Adil dalam Informasi	25	1	5	2.48	1.327
X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai	25	1	5	2.2	1.384
X11. Menyogok dalam Bentuk Benda Berharga	25	1	4	1.56	1.044
X12. Menyogok dalam Bentuk Biaya Perjalanan	25	1	4	3.2	1
X13. Manipulasi Pembayaran	25	1	5	3.36	1.68
X14. Manipulasi Informasi Proyek	25	1	4	2.48	1.194
X15. Manipulasi Pengawasan Proyek	25	1	5	3.84	1.281
X16. Manipulasi Keselamatan Kerja di Proyek	25	1	4	2.52	0.963
X17. Manipulasi Pendokumentasian Proyek	25	1	5	3.56	1.158
Valid N (listwise)	25				

Persepsi responden Kontraktor menunjukkan nilai interpretasi skor rata-rata, masing-masing:

- Pada rentang 1.00 – 1.79 dengan kategori “Sangat Jarang” merujuk pada variabel penyuapan yakni (X11) menyogok dalam bentuk benda berharga.
- Pada rentang 1.80 – 2.59 dengan kategori “Jarang” merujuk pada variabel penipuan yakni dalam bentuk (X4) mengakali biaya; variabel ketidakadilan yakni (X5) tidak adil dalam tender, (X6) tidak adil dalam negosiasi kontrak, (X7) tidak adil dalam hubungan (terafiliasi), (X8) perselisihan kepentingan, dan

- (X9) tidak adil dalam informasi; variabel penyuapan yakni dalam bentuk (X10) menyogok dalam bentuk uang tunai; variabel manipulasi yakni dalam praktek (X14) memanipulasi informasi proyek, dan (X16) manipulasi praktek keselamatan kerja di proyek.
- Pada rentang 2.60 – 3.39 dengan kategori “Cukup Sering” merujuk pada variabel penipuan, yakni dalam bentuk (X3) mengakali dokumen; variabel penyuapan yakni menyogok dalam bentuk (X12) biaya perjalanan; dan variabel manipulasi yakni dalam bentuk (X13) memanipulasi pembayaran.
 - Pada rentang 3.40 – 4.19 dengan kategori “Sering” merujuk pada variabel penipuan yakni dalam bentuk (X1) mengakali material, dan (X2) mengakali volume material; variabel manipulasi yakni dalam bentuk (X15) memanipulasi pengawasan proyek, dan (X17) memanipulasi pendokumentasian proyek.

4.4.3 Persepsi dampak praktek pelanggaran etika proyek konstruksi

Kategori dampak praktek pelanggaran etika proyek konstruksi berdasarkan penelitian terdahulu, dikategorikan menjadi: Dampak terhadap biaya, mutu, dan organisasi. Penilaian persepsi dampak praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, dilakukan untuk mendapat pernyataan atau persepsi responden bawasanya untuk setiap praktek pelanggaran etika proyek konstruksi dapat berdampak terhadap apakah: Biaya, mutu, atau organisasi? Dan persepsi seberapa dampaknya? Jawaban persepsi dampak merupakan tanggapan responden, yang bawasanya berdasarkan pada pengalaman responden, yang telah terlibat dalam pelaksanaan pengadaan proyek konstruksi pemerintah, di daerah penelitian. Analisis dampak dari bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika proyek konstruksi dikelompokkan berdasarkan responden PPK dan Kontraktor. Hasil analisis statistik deskriptif ditampilkan menurut persepsi responden yang dominan dalam memilih salah satu bentuk dampak dari praktek-praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi, yang hasil tersebut akan mengindikasikan tingkat persetujuan tertinggi terhadap salah satu bentuk dampak terpilih yang menjadi fokus perhatian. Masing-masing hasil statistik deskriptif berdasarkan responden dipaparkan di bawah ini.

Tabel 4.12 Deskriptif Persepsi Dampak Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden PPK

Descriptive Statistics Dampak Mayoritas Pelanggaran Etika (Responden PPK)							
Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Pemerintah	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Persepsi Dampak	Prosentase Memilih
X1. Mengakali Material	7	4	5	4.86	0.378	Mutu	100.0%
X2. Mengakali Volume Material	7	4	5	4.86	0.378	Mutu	100.0%
X3. Mengakali Dokumen	7	3	4	3.86	0.378	Organisasi	100.0%
X4. Mengakali Biaya	7	2	4	3.29	0.756	Organisasi	100.0%
X5. Tidak Adil dalam Tender	7	3	5	4.14	0.9	Organisasi	100.0%
X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak	7	3	4	3.43	0.535	Organisasi	100.0%
X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi)	7	3	4	3.57	0.535	Organisasi	100.0%
X8. Perselisihan Kepentingan	7	4	5	4.71	0.488	Organisasi	100.0%
X9. Tidak Adil dalam Informasi	7	2	3	2.71	0.488	Organisasi	100.0%
X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai	5	4	5	4.6	0.548	Organisasi	71.4%
X11. Menyogok dalam bentuk barang berharga	5	3	4	3.6	0.548	Organisasi	71.4%
X12. Menyogok dalam bentuk biaya perjalanan	6	4	5	4.67	0.516	Organisasi	85.7%
X13. Manipulasi Pembayaran	5	3	5	4	0.707	Organisasi	71.4%
X14. Manipulasi Informasi Proyek	7	3	5	4.29	0.756	Organisasi	100.0%
X15. Manipulasi Pengawasan Proyek	6	4	5	4.67	0.516	Organisasi	85.7%
X16. Manipulasi Keselamatan Kerja di Proyek	6	3	5	4.17	0.753	Organisasi	85.7%
X17. Manipulasi Pendokumentasian Proyek	7	4	5	4.71	0.488	Organisasi	100.0%

Organisasi yang dimaksud di dalam di tabel 4.12 adalah unit organisasi pemerintah yang sebagai pelaksana dalam pengadaan proyek konstruksi.

Penilaian dampak oleh responden terhadap organisasi ditujukan untuk organisasi masing-masing responden. Jika PPK yang memberi penilaian maka dampak terhadap organisasi yang dimaksud adalah organisasi instansi pemerintah yang menangani pengadaan proyek konstruksi, dan jika Kontraktor yang memberi penilaian maka dampak terhadap organisasi yang dimaksud adalah bagi organisasi atau perusahaan kontraktor yang bergerak dibidang jasa konstruksi.

Persepsi PPK yang mengacu pada Tabel 4.12 Deskriptif Persepsi Dampak Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden PPK di halaman sebelum ini, maka disimpulkan PPK berpendapat:

- Variabel (X1) Mengakali Material “Sangat Berdampak” terhadap “Mutu”,
- Variabel (X2) Mengakali Volume Material “Sangat Berdampak” terhadap “Mutu”,
- Variabel (X3) Mengakali Dokumen "Berdampak" terhadap “Organisasi”,
- Variabel (X4) Mengakali Biaya “Berdampak” terhadap “Organisasi”,
- Variabel (X5) Tidak Adil dalam Tender “Berdampak” terhadap “Organisasi”,
- Variabel (X6) Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak “Berdampak” terhadap “Organisasi”,,
- Variabel (X7) Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi) “Berdampak” terhadap “Organisasi”,
- Variabel (X8) Perselisihan Kepentingan “Sangat Berdampak” terhadap “Organisasi”,
- Variabel (X9) Tidak Adil dalam Informasi “Cukup Berdampak” terhadap “Organisasi”,
- Variabel (X10) Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai “Sangat Berdampak” terhadap “Organisasi”,
- Variabel (X11) Menyogok dalam bentuk barang berharga “Berdampak” terhadap “Organisasi”,
- Variabel (X12) Menyogok dalam bentuk biaya perjalanan “Sangat Berdampak” terhadap “Organisasi”,
- Variabel (X13) Manipulasi Pembayaran “Sangat Berdampak” terhadap “Organisasi”,

- Variabel (X14) Manipulasi Informasi Proyek “Sangat Berdampak” terhadap “Organisasi”,
- Variabel (X15) Manipulasi Pengawasan Proyek “Sangat Berdampak” terhadap “Organisasi”,
- Variabel (X16) Manipulasi Keselamatan Kerja di Proyek “Sangat Berdampak” terhadap “Organisasi”,
- Variabel (X17) Manipulasi Pendokumentasian Proyek “Sangat Berdampak” terhadap “Organisasi”.

Berikut ini dipaparkan hasil analisis statistik deskriptif persepsi dampak dari praktek-praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian, dari responden Kontraktor. Persepsi responden Kontraktor yang mengacu pada Tabel 4.13 Deskriptif Persepsi Dampak Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden Kontraktor di halaman berikut ini, maka disimpulkan Kontraktor berpendapat:

- Variabel (X1) Mengakali Material “Berdampak” terhadap “Mutu”,
- Variabel (X2) Mengakali Volume Material “Sangat Berdampak” terhadap “Mutu”,
- Variabel (X3) Mengakali Dokumen “Sangat Berdampak” terhadap “Organisasi”,
- Variabel (X4) Mengakali Biaya “Sangat Berdampak” terhadap “Organisasi”,
- Variabel (X5) Tidak Adil dalam Tender “Sangat Berdampak” terhadap “Organisasi”,
- Variabel (X6) Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak “Sangat Berdampak” terhadap “Organisasi”,
- Variabel (X7) Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi) “Sangat Berdampak” terhadap “Organisasi”,
- Variabel (X8) Perselisihan Kepentingan “Berdampak” terhadap “Organisasi”,
- Variabel (X9) Tidak Adil dalam Informasi “Berdampak” terhadap “Organisasi”,
- Variabel (X10) Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai “Berdampak” terhadap “Organisasi”,

Tabel 4.13 Deskriptif Persepsi Dampak Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden Kontraktor

Descriptive Statistics Dampak Mayoritas Pelanggaran Etika (KONTRAKTOR)							
Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Pemerintah	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Persepsi Dampak	Prosentase Memilih
X1. Mengakali Material	21	1	5	4.19	1.289	Mutu	84.0%
X2. Mengakali Volume Material	21	2	5	4.43	0.926	Mutu	84.0%
X3. Mengakali Dokumen	20	2	5	4.15	1.309	Organisasi	80.0%
X4. Mengakali Pembiayaan	15	3	5	4.53	0.834	Organisasi	60.0%
X5. Tidak Adil dalam Tender	19	2	5	4.32	1.108	Organisasi	76.0%
X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak	14	2	5	4.57	1.089	Organisasi	56.0%
X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi)	16	2	5	4.25	1.342	Organisasi	64.0%
X8. Perselisihan Kepentingan	15	1	5	4.13	1.506	Organisasi	60.0%
X9. Tidak Adil dalam Informasi	20	2	5	4.2	1.056	Organisasi	80.0%
X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai	19	2	5	4.16	1.015	Organisasi	76.0%
X11. Menyogok dalam bentuk barang berharga	19	2	5	3.84	0.765	Organisasi	76.0%
X12. Menyogok dalam bentuk biaya perjalanan	20	2	5	4.4	0.883	Organisasi	80.0%
X13. Manipulasi Pembayaran	12	2	5	4	1.477	Mutu	48.0%
X14. Manipulasi Informasi Proyek	14	2	5	4.36	1.082	Organisasi	56.0%
X15. Manipulasi Pengawasan Proyek	13	2	5	3.62	1.557	Mutu	52.0%
X16. Manipulasi Keselamatan Kerja di Proyek	16	2	5	4.19	1.109	Organisasi	64.0%
X17. Manipulasi Pendokumentasian Proyek	18	2	5	4.56	0.922	Organisasi	72.0%

Organisasi yang dimaksud di dalam di tabel 4.13 adalah organisasi kontraktor yang sebagai pelaksana pengadaan proyek konstruksi pemerintah.

Lanjutan penjelasan Tabel 4.13 Deskriptif Persepsi Dampak Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden Kontraktor, maka disimpulkan Kontraktor berpendapat:

- Variabel (X11) Menyogok dalam bentuk barang berharga “Berdampak” terhadap “Organisasi”,
- Variabel (X12) Menyogok dalam bentuk biaya perjalanan “Berdampak” terhadap “Organisasi”
- Variabel (X13) Manipulasi Pembayaran “berdampak” terhadap “Mutu”,
- Variabel (X14) Manipulasi Informasi Proyek “berdampak” terhadap “Organisasi”,
- Variabel (X15) Manipulasi Pengawasan Proyek “berdampak” terhadap “Mutu”,
- Variabel (X16) Manipulasi Keselamatan Kerja di Proyek “sangat berdampak” terhadap “Organisasi”,
- Variabel (X17) Manipulasi Pendokumentasian Proyek “sangat berdampak” terhadap “Organisasi”.

4.4.4 Uji Anova

Uji Anova dilakukan untuk membandingkan dan mengetahui apakah ada perbedaan persepsi dampak praktek-praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, antara responden PPK dengan Kontraktor.

Pada Tabel 4.14 Uji Anova Perbedaan Persepsi antara Responden PPK dengan Kontraktor, di halaman berikut ini, memaparkan hasil uji Anova, dan penjelasan hasil uji perbedaan persepsi penilaian dampak oleh PPK dan Kontraktor, untuk setiap variabel penelitian. Untuk variabel X1 disimpulkan bahwa Terima H_0 , karena nilai Sig. 0.272 dimana $> 5\%$, maka dikatakan “tidak terdapat perbedaan” antara persepsi PPK dengan Kontraktor, terhadap dampak praktek pelanggaran etika “mengakali material” di pengadaan proyek konstruksi pemerintah. Hasil pengujian terhadap keseluruhan variabel penelitian dipaparkan dalam tabel 4.14.

Penjelasan hasil uji Anova, terhadap empat variabel yang memiliki perbedaan persepsi antara PPK dengan Kontraktor, yaitu untuk variabel (X6) ketidakadilan dalam negosiasi kontrak, (X8) perselisihan kepentingan, (X14)

memanipulasi informasi proyek, dan (X15) memanipulasi pengawasan proyek, akan dipaparkan pada sub bab pembahasan hasil uji anova.

Tabel 4.14 Uji Anova Perbedaan Persepsi antara Responden PPK dengan Kontraktor

Variabel	Nilai F	Nilai Sig	Penjelasan
X1. Mengakali Material	1.250	.272	Tidak Terdapat Perbedaan
X2. Mengakali Volume Material	1.250	.272	Tidak Terdapat Perbedaan
X3. Mengakali Dokumen	1.423	.242	Tidak Terdapat Perbedaan
X4. Mengakali Biaya	4.042	.053	Tidak Terdapat Perbedaan
X5. Tidak Adil dalam Tender	1.808	.189	Tidak Terdapat Perbedaan
X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak	4.219	.049	Terdapat Perbedaan
X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi)	3.088	.089	Tidak Terdapat Perbedaan
X8. Perselisihan Kepentingan	4.375	.045	Terdapat Perbedaan
X9. Tidak Adil dalam Informasi	1.641	.210	Tidak Terdapat Perbedaan
X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai	.069	.795	Tidak Terdapat Perbedaan
X11. Menyogok dalam bentuk barang berharga	.139	.712	Tidak Terdapat Perbedaan
X12. Menyogok dalam bentuk biaya perjalanan	.312	.581	Tidak Terdapat Perbedaan
X13. Manipulasi Pembayaran	1.929	.175	Tidak Terdapat Perbedaan
X14. Manipulasi Informasi Proyek	4.219	.049	Terdapat Perbedaan
X15. Manipulasi Pengawasan Proyek	4.597	.040	Terdapat Perbedaan
X16. Manipulasi Keselamatan Kerja di Proyek	.510	.481	Tidak Terdapat Perbedaan
X17. Manipulasi Pendokumentasian Proyek	2.179	.150	Tidak Terdapat Perbedaan

4.4.5 Identifikasi penyebab

Mengidentifikasi penyebab terjadinya bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika dalam lingkup proyek konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian, dilakukan melalui proses wawancara kepada keseluruhan responden yang berjumlah 32 responden yang telah terlibat dari sejak awal penelitian, yakni responden PPK sebanyak 7 responden dan responden Kontraktor sebanyak 25 responden yang telah

terlibat dari sejak awal penelitian, yakni responden PPK (pemerintah) sebanyak 7 responden dan responden Kontraktor sebanyak 25 responden.

Sebelum melakukan identifikasi penyebab kepada responden penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk menemukan apa saja permasalahan yang menjadi alasan penyebab pelanggaran etika di proyek konstruksi dari penelitian terdahulu, dan menjadi pedoman bagi peneliti dalam melakukan wawancara. Selama proses wawancara responden penelitian diberi kebebasan dalam menjawab dan mengemukakan pendapat, atau jika responden penelitian tidak memiliki pendapat yang berbeda, responden dapat memilih salah satu jawaban yang dianggap tepat dari hasil identifikasi penyebab pelanggaran etika proyek konstruksi, yang dicantumkan di dalam pedoman wawancara.

Setiap jawaban responden yang diperoleh ditabulasi. Selanjutnya, dari tabulasi persepsi jawaban responden dianalisis prosentase jawaban, dan dipaparkan urutan peringkat jawaban. Peringkat satu mengindikasikan sebagai penyebab utama pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian, dan masing-masing peringkat dua dan tiga menunjukkan sebagai penyebab yang mengikuti. Hasil identifikasi penyebab pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian, dipaparkan pada Tabel 4.15 Identifikasi Persepsi Penyebab Terjadinya Praktek Pelanggaran Etika di Proyek Konstruksi Pemerintah.

Tabel 4.15 Identifikasi Persepsi Penyebab Terjadinya Praktek Pelanggaran Etika di Proyek Konstruksi Pemerintah

Persepsi Penyebab Terjadinya Bentuk-bentuk Praktek Pelanggaran Etika di Proyek Konstruksi Pemerintah	Prosentase	Peringkat
Tidak cukup pendidikan dan pelatihan etika profesional pengadaan proyek konstruksi pemerintah.	43.75%	1
Kompetisi tidak sehat di pengadaan proyek konstruksi.	40.63%	2
Arahan (“negatif”) dari pemegang otoritas (pimpinan organisasi).	15.63%	3

Hasil identifikasi penyebab terjadinya bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian, yang diperoleh dari keseluruhan jawaban para responden menunjukkan, persepsi penyebab utama

dengan prosentase yang menjawab 43.75% mengungkapkan tidak cukup pendidikan dan pelatihan profesional dalam mengatasi permintaan yang ilegal, diikuti peringkat kedua dengan prosentase 40.63% yang menjawab sebab adanya kompetisi tidak sehat, dan peringkat ketiga dengan prosentase 15.63% menjawab adanya arahan (“negatif”) dari pemegang otoritas.

4.4.6 Identifikasi solusi

Mengidentifikasi solusi untuk meminimalkan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika dalam lingkup proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian, dilakukan melalui proses wawancara kepada keseluruhan responden. Jumlah responden sama dengan jumlah responden yang dimintai jawaban untuk mengidentifikasi penyebab pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti telah membuat pedoman wawancara melalui kajian literatur. Hasil studi literatur, diharapkan dapat membantu peneliti mengarahkan responden secara bersama-sama, untuk menemukan solusi. Selama proses wawancara responden penelitian diberi kebebasan dalam menjawab dan mengemukakan pendapat, atau jika responden penelitian tidak memiliki pendapat yang berbeda, responden dapat memilih salah satu jawaban yang dianggap tepat dari hasil identifikasi solusi pelanggaran etika proyek konstruksi, yang dicantumkan di dalam pedoman wawancara.

Setiap jawaban responden yang diperoleh ditabulasi. Selanjutnya, dari tabulasi persepsi jawaban responden dianalisis prosentase jawaban, dan dipaparkan urutan peringkat jawaban. Peringkat satu mengindikasikan sebagai solusi utama untuk meminimalkan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian, dan masing-masing peringkat dua dan tiga menunjukkan sebagai solusi yang mengikuti. Hasil identifikasi solusi untuk meminimalkan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian, dipaparkan pada Tabel 4.16 Identifikasi Persepsi Solusi Meminimalkan Bentuk Praktek Pelanggaran Etika di Proyek Konstruksi Pemerintah, di halaman berikut ini.

Hasil identifikasi solusi untuk meminimalkan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian, yang diperoleh dari jawaban para responden, menunjukkan persepsi penyebab utama dengan prosentase yang menjawab 59.38% mengungkapkan perlunya memberdayakan program pendidikan, dan pelatihan etika profesional, diikuti peringkat kedua dengan prosentase 31.25% yang menjawab

Tabel 4.16 Identifikasi Persepsi Solusi Meminimalkan Bentuk Praktek Pelanggaran Etika di Proyek Konstruksi Pemerintah

Persepsi Solusi untuk Meminimalkan Bentuk-bentuk Praktek Pelanggaran Etika di Proyek Konstruksi Pemerintah	Prosentase	Peringkat
Memberdayakan program pendidikan, dan pelatihan etika profesional.	59.38%	1
Menegaskan regulasi dan penegakan hukum oleh pemerintah.	31.25%	2
Menerapkan sebuah bentuk kode etik profesional dalam pengadaan proyek konstruksi pemerintah.	9.38%	3

perlu menegaskan aspek regulasi dan penegakan hukum, dan peringkat ketiga dengan prosentase 9.38% menjawab perlu menerapkan sebuah bentuk kode etik dalam pengadaan proyek konstruksi pemerintah.

4.5 Pembahasan

Pada sub bab pembahasan, akan membahas masing-masing persepsi responden, terhadap bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian saat ini, beserta mengidentifikasi penyebab, dan mencari solusi untuk mengatasi praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian.

4.5.1 Bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi

Hasil identifikasi bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian menunjukkan, kedua kelompok responden, yakni PPK maupun kontraktor, telah menyetujui variabel penelitian yang diteliti bawasanya sebagai bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di pengadaan proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian. Hasil penilaian menunjukkan:

- Skor rata-rata terendah adalah 4.14 dengan kategori “Setuju Merupakan Pelanggaran Etika”, khusus untuk tanggapan rata-rata responden PPK atas variabel penyuapan, yaitu menyogok dalam bentuk uang tunai, benda berharga, dan biaya perjalanan.
- Sedangkan, tanggapan kedua kelompok responden, untuk variabel penelitian lainnya, berada pada rentang 4.20 – 5.00 dengan kategori “Sangat Setuju Merupakan Pelanggaran Etika”, yaitu untuk variabel penipuan, ketidakadilan dan manipulasi.

Hasil penelitian di atas, menunjukkan baik PPK maupun Kontraktor dengan pengalaman mereka sebagai pelaksana proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian, telah merespon bahwa bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah diyakini terjadi dalam bentuk-bentuk praktek “Penipuan”, “Ketidakadilan”, “Penyuapan”, dan “Manipulasi”, sebagai praktek merugikan sebagai praktek tidak etis.

Khusus responden PPK, mereka pun menganggap dimensi penyuapan berada pada rentang yang sulit untuk diterima secara sosial atau sebagai pelanggaran norma yang tidak dapat diterima secara sosial, sebab penindakan pelaku penyuapan terkait erat dengan pelanggaran hukum atau kepada penindakan hukum. Persepsi PPK menganggap dengan kondisi “lingkungan saat ini di daerah penelitian” dapat lebih tepat dikategorikan sebagai praktek-praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian, yakni mengakali material, mengakali volume material, tidak adil dalam tender, tidak memberi kesempatan untuk menegosiasikan kontrak, memanipulasi pembayaran, dan memanipulasi pengawasan proyek. Sebab, praktek-praktek tersebut selalu diperhadapkan kepada PPK, tetapi akar permasalahannya dipengaruhi oleh berbagai sebab, seperti sebab adanya arahan (“negatif”) dari atasan organisasi, dan/atau sebab kurangnya komitmen masyarakat konstruksi (pengusaha yang terlibat langsung dalam jasa konstruksi maupun masyarakat umum) untuk bersikap profesional.

Kontraktor mengungkapkan “dengan kondisi lingkungan saat ini di daerah penelitian” menganggap yang dapat lebih tepat sebagai praktek-praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian, yakni mengakali volume material, tidak adil dalam tender, tidak adil dalam hubungan (adanya hubungan yang terafiliasi dalam memutuskan pemborong yang menang tender), dan memanipulasi praktek keselamatan kerja di proyek. Sebab, praktek-praktek tersebut dapat selalu dihadapi oleh kontraktor, dan jika tidak dapat dikelola, dapat langsung mempengaruhi keberlanjutan bisnis Kontraktor sebagai penyedia jasa konstruksi atau sebagai rekanan pemerintah, dan akar sebab praktek-praktek tersebut dipengaruhi oleh rantai manajemen proyek pengadaan proyek konstruksi pemerintah yang belum “ideal”.

4.5.2 Status saat ini praktek pelanggaran etika proyek konstruksi

Mengidentifikasi status saat ini bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian, dilakukan melalui menghubungkan penilaian persepsi frekuensi dengan persepsi dampak untuk setiap bentuk praktek pelanggaran etika proyek konstruksi yang telah teridentifikasi.

Untuk mengkomunikasikan hasil penelitian hubungan antara penilaian persepsi frekuensi dan persepsi dampak dari setiap bentuk praktek pelanggaran etika proyek konstruksi yang teridentifikasi, maka akan digunakan matriks *Simple Heat Map Background*. Melalui matriks *Simple Heat Map Background* dapat dipaparkan hasil penilaian persepsi bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika yang teridentifikasi, yang diplotkan sesuai dengan skala frekuensi (probabilitas) dan skala dampak. Warna pada bidang matriks menunjukkan tingkat pelanggaran etika proyek konstruksi yang berbeda. Warna yang terdapat yaitu merah, kuning dan hijau yang masing-masing menunjukkan interpretasi kategori pelanggaran etika proyek konstruksi yang tinggi, menengah, dan rendah. Dalam pendekatan ini, setiap kategori pelanggaran etika proyek konstruksi memiliki standar atau respon dominan, sebagai kontrol yang dianggap efektif atau sebagian efektif dalam mengurangi pelanggaran etika proyek konstruksi. Respon yang diharapkan untuk masing-masing area yang berwarna, adalah:

- “Kategori Pelanggaran Tinggi” pada area yang berwarna merah, membutuhkan respon aktif dari manajemen, dalam menanggapi praktek pelanggaran etika di pengadaan proyek konstruksi pemerintah, di Daerah penelitian saat ini, yang dimulai dari membuat persiapan, melakukan kajian secara aktif dan melakukan penanganan secara berkelanjutan.
- “Kategori Pelanggaran Menengah” pada area berwarna kuning, membutuhkan sistem kontrol yang memadai, untuk terus melakukan pemantauan dan mengkonfirmasi status pelanggaran etika di pengadaan proyek konstruksi pemerintah, di Daerah penelitian saat ini, dalam rentan waktu setidaknya per triwulan.
- “Kategori Pelanggaran Rendah” pada area berwarna hijau, tidak membutuhkan perhatian khusus, sebab bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika atau area terjadinya pelanggaran etika di pengadaan proyek konstruksi pemerintah, di Daerah penelitian saat ini, telah dikelola dengan sistem penanganan yang memadai sehingga tidak memiliki konsekuensi yang tinggi, hanya diperlukan pemantauan untuk memastikan tidak meningkat di waktu yang mendatang.

Pemaparan persepsi status saat ini, terhadap praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian, melalui matriks *Simple Heat Map Background*, dipisah berdasarkan kelompok responden PPK dan Kontraktor. Berikut ini dipaparkan penilaian persepsi PPK dan Kontraktor, terhadap status saat ini dari setiap bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian yang telah teridentifikasi, melalui matriks *Simple Heat Map Background*, yang ditunjukkan pada gambar 4.4 dan 4.5.

Pada Gambar 4.4.a Persepsi Status Saat Ini Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi yang Berdampak Pada Mutu dari Responden PPK, memaparkan kategori pelanggaran (berdasarkan penilaian frekuensi dan dampak), dan variabel yang berdampak pada mutu. Pada Gambar 4.4.b Persepsi Status Saat Ini Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi yang Berdampak Pada Organisasi dari Responden PPK, yang ditunjukkan pada halaman berikut ini, memaparkan kategori pelanggaran (berdasarkan penilaian frekuensi dan dampak), dan variabel yang berdampak pada organisasi.

Dampak Mutu	Sangat berdampak					X1,X2
	Berdampak					
	Cukup berdampak					
	Tidak berdampak					
	Sangat tidak berdampak					
		Sangat jarang	Jarang	Cukup sering	Sering	Sangat sering
		Frekuensi				

Gambar 4.4.a Persepsi Status Saat Ini Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi yang Berdampak Pada Mutu dari Responden PPK

Dampak Organisasi	Sangat berdampak		X14		X8,X10,X12,X15,X17	
	Berdampak		X11,X16		X5,X6,X7,X13	X3
	Cukup berdampak				X9	X4
	Tidak berdampak					
	Sangat tidak berdampak					
		Sangat jarang	Jarang	Cukup sering	Sering	Sangat sering
		Frekuensi				

Gambar 4.4.b Persepsi Status Saat Ini Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi yang Berdampak Pada Organisasi dari Responden PPK

Gambar 4.4 Persepsi Status Saat ini Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden PPK

Penjelasan terhadap kategori pelanggaran dan bentuk dampak, dari setiap bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian, dari Gambar 4.4 Persepsi Status Saat ini Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden PPK, adalah sebagai berikut ini.

1. Kategori pelanggaran dan praktek yang berdampak pada “Mutu” dari persepsi PPK:
 - “Kategori Pelanggaran Tinggi” yaitu untuk praktek: (X1) Mengakali Material, (X2) Mengakali Volume Material.
2. Kategori pelanggaran dan praktek yang berdampak pada “Organisasi” dari persepsi PPK:

- “Kategori Pelanggaran Tinggi” yaitu untuk praktek: (X3) Mengakali Dokumen, (X4) Mengakali Biaya, (X5) Tidak Adil dalam Tender, (X6) Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak, (X7) Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi), (X8) Perselisihan Kepentingan, (X10) Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai, (X12) Menyogok dalam Bentuk Biaya Perjalanan, (X13) Manipulasi Pembayaran, (X15) Manipulasi Pengawasan Proyek, dan (X17) Manipulasi Pendokumentasian Proyek.
- “Kategori Pelanggaran Menengah” yaitu untuk praktek: (X9) Tidak Adil dalam Informasi, (X11) Menyogok dalam Bentuk Barang Berharga, (X14) Manipulasi Informasi Proyek, dan (X16) Manipulasi Keselamatan Kerja di Proyek.

Dampak Mutu	Sangat berdampak				X2	
	Berdampak			X13	X1,X15	
	Cukup berdampak					
	tidak berdampak					
	Sangat tidak berdampak					
		Sangat jarang	Jarang	Cukup sering	Sering	Sangat sering
		Frekuensi				

Gambar 4.5.a Persepsi Status Saat Ini Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi yang Berdampak Pada Mutu dari Responden Kontraktor

Dampak Organisasi	Sangat berdampak		X4,X5,X6, X7,X9,X14	X12	X17	
	Berdampak	X11	X8,X10,X16	X3		
	Cukup berdampak					
	tidak berdampak					
	Sangat tidak berdampak					
		Sangat jarang	Jarang	Cukup sering	Sering	Sangat sering
		Frekuensi				

Gambar 4.5.b Persepsi Status Saat Ini Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi yang Berdampak Pada Organisasi dari Responden Kontraktor

Gambar 4.5 Persepsi Status Saat ini Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden Kontraktor

Gambar 4.5.a, yang ditunjukkan di sebelum ini memaparkan kategori pelanggaran (berdasarkan penilaian frekuensi dan dampak) dan variabel yang berdampak pada mutu. Dan, gambar 4.5.b yang ditunjukkan juga di halaman sebelum ini, memaparkan kategori pelanggaran (berdasarkan penilaian frekuensi dan dampak) dan variabel yang berdampak pada organisasi, dari perspektif responden Kontraktor.

Penjelasan terhadap kategori pelanggaran dan bentuk dampak, dari setiap praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian, yang ditunjukkan pada Gambar 4.5 Persepsi Status Saat ini Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden Kontraktor, akan di jelaskan sebagai berikut ini.

Penjelasan Gambar 4.5 Persepsi Status Saat ini Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden Kontraktor:

1. Kategori pelanggaran dan praktek yang berdampak pada “Mutu” dari persepsi Kontraktor:
 - “Kategori Pelanggaran Tinggi” yaitu untuk praktek: (X1) Mengakali Material, (X2) Mengakali Volume Material, (X15) Manipulasi Pengawasan Proyek.
 - “Kategori Pelanggaran Menengah” yaitu untuk praktek: (X13) Manipulasi Pembayaran.
2. Kategori pelanggaran dan praktek yang berdampak pada “Organisasi”, dari persepsi Kontraktor.
 - “Kategori Pelanggaran Tinggi” yaitu untuk praktek: (X12) Menyogok dalam Bentuk Biaya Perjalanan, dan (X17) Manipulasi Pendokumentasian Proyek.
 - “Kategori Pelanggaran Menengah” yaitu untuk praktek: (X3) Mengakali Dokumen, (X4) Mengakali Biaya, (X5) Tidak Adil dalam Tender, (X6) Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak, (X7) Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi), (X8) Perselisihan Kepentingan, (X9) Tidak Adil dalam Informasi, (X10) Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai, (X14) Manipulasi Informasi Proyek, dan (X16) Manipulasi Keselamatan Kerja di Proyek.

- “Kategori Pelanggaran Rendah” yaitu untuk praktek: (X11) Menyogok dalam Bentuk Benda Berharga.

Jika hasil persepsi responden PPK dan Kontraktor berdasarkan matriks *Simple Heat Map Background* diperbandingkan, maka dapat terlihat adanya persamaan dan perbedaan persepsi antara responden PPK dengan Kontraktor, terhadap kategori dampak dan kategori pelanggaran. Maka, berikut ini akan dipaparkan, perbandingan persepsi status saat ini praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian, antara PPK dengan Kontraktor. Dan juga, akan dipaparkan praktek-praktek yang “diyakini” terjadi oleh kedua kelompok responden, untuk membuktikan persepsi mereka terhadap status saat ini bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, Daerah penelitian.

Hasil analisis yang ditampilkan dalam matriks *Simple Heat Map Background*, menunjukkan bahwa baik PPK maupun Kontraktor, memiliki kesamaan maupun perbedaan persepsi, terhadap status saat ini, praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di Daerah penelitian, yang pemaparannya di bawah ini.

1. Secara deskriptif terdapat “Kesamaan Persepsi” antara PPK dengan Kontraktor, dalam menilai “Kategori Pelanggaran” praktek-praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, yang saat ini diyakini terjadi dengan kategori pelanggaran “Tinggi” dan terhadap praktek-praktek yang berkategori pelanggaran tinggi, terdapat “Kesamaan dan Perbedaan Persepsi Penilaian Dampak.” Hasilnya dipaparkan sebagai berikut:
 - PPK maupun Kontraktor memiliki persepsi, praktek (X1) Mengakali Material dan (X2) Mengakali Volume Material, berkategori pelanggaran yang “Tinggi” dan dapat berdampak pada “Mutu.” Praktek-praktek yang diyakini terjadi, yaitu:
 - o Praktek Mengakali Material yang diyakini terjadi, yakni praktek mengganti dan memasang material bangunan konstruksi, yang kualitas

material bangunan tidak sesuai, dengan yang dipersyaratkan di dalam dokumen pengadaan proyek.

- Praktek Mengakali volume material yang diyakini terjadi, yakni praktek mengurangi volume material bangunan konstruksi (volume material terpasang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam dokumen pengadaan proyek).

- PPK maupun Kontraktor memiliki persepsi, praktek (X12) Menyogok dalam Bentuk Biaya Perjalanan, dan (X17) Manipulasi Pendokumentasian Proyek, berkategori pelanggaran yang “Tinggi” dan dapat berdampak pada “Organisasi” (organisasi masing-masing responden). Praktek-praktek yang diyakini terjadi, yaitu:

- Praktek menyogok dalam bentuk biaya perjalanan, di pengadaan proyek konstruksi pemerintah, yang diyakini terjadi, yakni penyedia jasa proyek konstruksi (kontraktor) mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pihak pemberi pekerjaan (pemerintah), dengan memberi fasilitas dalam bentuk biaya perjalanan, untuk mengusahakan, mengadakan dan menguasai proyek konstruksi pemerintah, sehingga diharapkan memberi keuntungan bagi pihak-pihak tersebut, yang bertentangan dengan pedoman pengadaan proyek konstruksi pemerintah.
- Praktek memanipulasi pendokumentasian proyek, di pengadaan proyek konstruksi pemerintah, oleh pemerintah mau pun kontraktor, yang diyakini terjadi yakni adanya penyelewengan atau berbuat curang dalam mendokumentasikan proyek (semua rancangan gambar, dokumen laporan proyek, dan dokumen lain baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy), sebagai produk yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan proyek konstruksi pemerintah.

- PPK maupun Kontraktor memiliki persepsi, praktek (X15) Manipulasi Pengawasan Proyek, berkategori pelanggaran yang “Tinggi” dan PPK menilai dapat berdampak pada “Organisasi” (unit organisasi pemerintah) sedangkan Kontraktor menilai dapat berdampak pada “Mutu.” Praktek-praktek yang diyakini terjadi, yaitu:

- PPK berpendapat, praktek memanipulasi pengawasan proyek, di pengadaan proyek konstruksi pemerintah, oleh pihak pemerintah, yakni adanya penyelewengan atau berbuat curang dalam memeriksa dan memastikan kesesuaian progres proyek konstruksi, yang terpasang di lapangan dengan yang tersurat di dokumen; adanya bentuk kecurangan dalam hal mengkoordinasi, dan mengendalikan kegiatan pengadaan proyek konstruksi pemerintah; satuan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan proyek konstruksi pemerintah, memanipulasi laporan proyek sebagai pertanggung jawaban kegiatan pelaksanaan proyek; adanya penyelewengan atau berbuat curang terkait cara-cara untuk mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan, agar hasil akhir proyek konstruksi dapat tepat harga, tepat mutu, tepat kuantitas, dan tepat waktu. PPK berpendapat, praktek memanipulasi terkait aspek pengawasan dalam pengadaan proyek konstruksi pemerintah, dapat berdampak pada instansi teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau bagi unit organisasi yang mengelola teknis pelaksanaan pengadaan proyek konstruksi pemerintah.
- Kontraktor berpendapat, praktek memanipulasi pengawasan proyek, di pengadaan proyek konstruksi pemerintah, oleh kontraktor, yakni adanya penyelewengan atau berbuat curan dalam mengambil langkah-langkah yang cukup memadai, untuk melindungi tempat kerja dan material bangunan proyek; dan dalam menjalankan kontrol kualitas selama pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah. Kontraktor berpendapat, praktek memanipulasi pengawasan dalam pengadaan proyek konstruksi pemerintah, dapat berdampak pada mutu proyek konstruksi pemerintah. Dan menurut kontraktor, posisi kontraktor yang sebagai penyedia jasa proyek konstruksi, dan rekanan pemerintah, kontraktor harus memastikan agar hasil proyek sesuai dengan yang diperjanjikan dalam dokumen pengadaan proyek.

2. Secara deskriptif terdapat “Kesamaan Persepsi” antara PPK dengan Kontraktor, dalam menilai “Kategori Pelanggaran” praktek-praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, yang saat ini diyakini terjadi dengan kategori

pelanggaran “Menengah” dan terhadap praktek-praktek yang berkategori pelanggaran menengah, terdapat “Kesamaan Persepsi Penilaian Dampak”.

Hasilnya dipaparkan sebagai berikut:

- PPK maupun Kontraktor memiliki persepsi, praktek (X9) Tidak Adil dalam Informasi, (X14) Manipulasi Informasi Proyek, dan (X16) Manipulasi Keselamatan Kerja di Proyek, berkategori pelanggaran yang “Menengah” dan dapat berdampak pada “Organisasi” (organisasi pemerintah dan kontraktor).

Praktek-praktek yang diyakini terjadi, yaitu:

- o Praktek tidak adil dalam informasi, di pengadaan proyek konstruksi pemerintah, yang diyakini terjadi, yakni tidak dipublikasikan secara terbuka paket pengadaan proyek konstruksi pemerintah, terkait nama dan nilai paket proyek, status kepemilikan lokasi proyek konstruksi, dan proses tender proyek konstruksi tidak dilakukan secara terbuka, yang tidak sesuai dengan pedoman pengadaan proyek konstruksi pemerintah.
- o Praktek manipulasi informasi proyek, di pengadaan proyek konstruksi pemerintah, yang diyakini terjadi, yakni adanya perbuatan curang dengan tidak memberikan penjelasan (anwiding) teknis dalam pelaksanaan pengadaan proyek konstruksi pemerintah yang akan diadakan; dan, dalam memberi masukan serta menjalankan fungsi koordinasi, yang dapat terkait dengan tantangan risiko keselamatan dan kesehatan kerja, maupun hambatan terkait lokasi proyek konstruksi, yang akibatnya kemudian dapat menghambat pelaksanaan pengadaan proyek konstruksi pemerintah.
- o Praktek manipulasi keselamatan kerja, di pengadaan proyek konstruksi pemerintah, yang diyakini terjadi, yakni pekerja tidak dilengkapi alat pelindung diri selama bekerja; dan, tidak dilaksanakan klarifikasi dan kepatuhan untuk menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja perlu dilaksanakan untuk setiap aktivitas proyek.

3. Secara deskriptif terdapat “Perbedaan Persepsi” antara PPK dengan Kontraktor, dalam menilai “Kategori Pelanggaran” praktek pelanggaran etika proyek konstruksi pemerintah, yang saat ini diyakini terjadi. PPK menilai berkategori pelanggaran “Tinggi” dan Kontraktor menilai berkategori pelanggaran

“Menengah” dan terhadap praktek-praktek yang berkategori pelanggaran tersebut, terdapat “Kesamaan Persepsi Penilaian Dampak.” Hasilnya dipaparkan sebagai berikut:

- Praktek (X3) Mengakali Dokumen, (X4) Mengakali Biaya, (X5) Tidak Adil dalam Tender, (X6) Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak, (X7) Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi), (X8) Perselisihan Kepentingan, (X10) Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai, terhadap praktek-praktek tersebut: Persepsi PPK berkategori pelanggaran yang “Tinggi,” dan persepsi Kontraktor berkategori pelanggaran yang “Menengah”; dan, PPK maupun Kontraktor berpendapat praktek-praktek tersebut, dapat berdampak pada “Organisasi” (organisasi pemerintah dan kontraktor). Praktek-praktek yang diyakini terjadi, yaitu:
 - o Praktek mengakali dokumen, di pengadaan proyek konstruksi pemerintah, yang diyakini terjadi, yakni adanya praktek memanipulasi pengumuman pelelangan; mengakali dokumen penawaran; dan mengakali dokumen lain (Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dikeluarkan tanpa ada dikeluarkan sebelumnya Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dan penggunaan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang masa aktif sudah kadaluarsa).
 - o Praktek Mengakali Biaya, di pengadaan proyek konstruksi pemerintah, yang diyakini terjadi, yakni membuat analisis harga satuan yang tidak standar, dengan cara-cara mengubah koefisien (tenaga kerja, bahan, peralatan, maupun volume pekerjaan) perhitungan harga satuan biaya proyek.
 - o Praktek tidak adil dalam tender, di pengadaan proyek konstruksi pemerintah, yang diyakini terjadi, yakni membuat lelang dengan sistem bergilir (menentukan penyedia jasa tertentu, untuk mendapatkan pekerjaan tertentu, pada saat tertentu); dan, meminjam nama perusahaan lain atau meminjam bendera, untuk mendapatkan/menguasai pengadaan proyek konstruksi pemerintah.
 - o Praktek tidak adil dalam negosiasi kontrak, di pengadaan proyek konstruksi pemerintah, yang diyakini terjadi, yakni adanya pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi (akses transportasi darat belum tersedia,

risiko pembebasan lahan) yang tidak sebanding dengan nilai proyek, yang bagi penyedia jasa tidak dapat lagi melakukan negosiasi kontrak, sebab jenis kontrak yang digunakan pihak pemerintah telah mengikat.

- Praktek tidak adil dalam hubungan (terafiliasi), di pengadaan proyek konstruksi pemerintah, yang diyakini terjadi, yakni adanya keterkaitan hubungan keluarga, antara pihak pemberi pekerjaan proyek konstruksi pemerintah (PPK/pejabat atasan langsung/pemegang otoritas) dengan pihak pelaksana proyek konstruksi pemerintah (kontraktor).
- Praktek perselisihan kepentingan, di pengadaan proyek konstruksi pemerintah, yang diyakini terjadi, yakni adanya praktek bujukan atau arahan (“negatif”) dari pemegang otoritas untuk melangkahi prosedur tata cara pengadaan proyek konstruksi pemerintah; kurangnya kesadaran dalam beretika profesi (bersikap profesional), dalam menjalankan sistem pengadaan proyek konstruksi pemerintah (mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok dalam pelaksanaan pengadaan proyek konstruksi pemerintah); dan perselisihan kepentingan dianggap sudah membudaya, dalam pelaksanaan pengadaan proyek konstruksi pemerintah di Daerah penelitian.
- Praktek menyogok dalam bentuk uang tunai, di pengadaan proyek konstruksi pemerintah, yang diyakini terjadi, yakni mempengaruhi anggota kelompok kerja panitia pengadaan dan/atau diantara pihak-pihak yang berkontrak (pemerintah dan kontraktor), dengan memberi materi dalam bentuk uang tunai untuk mengusahakan, mengadakan dan menguasai proyek konstruksi pemerintah, sehingga diharapkan memberi keuntungan bagi pihak-pihak tersebut, yang bertentangan dengan pedoman pengadaan proyek konstruksi pemerintah.

4. Secara deskriptif terdapat “Perbedaan Persepsi” antara PPK dengan Kontraktor, dalam menilai “Kategori Pelanggaran” praktek pelanggaran etika proyek konstruksi pemerintah, yang saat ini diyakini terjadi. Terhadap praktek di bawah ini, PPK menilai berkategori pelanggaran “Tinggi” dan Kontraktor menilai berkategori pelanggaran “Menengah” dan terhadap praktek yang

berkategori pelanggaran tersebut, terdapat “Perbedaan Persepsi Penilaian Dampak.” Hasilnya dipaparkan sebagai berikut:

- Variabel (X13) Manipulasi Pembayaran, terhadap praktek tersebut: Persepsi PPK berkategori pelanggaran yang “Tinggi” dan persepsi Kontraktor berkategori pelanggaran yang “Menengah”; dan, penilaian dampak, PPK menilai dapat berdampak pada “Organisasi” (unit organisasi pemerintah) sedangkan Kontraktor menilai dapat berdampak pada “Mutu.” Praktek yang diyakini terjadi, yaitu:
 - o PPK berpendapat, praktek manipulasi pembayaran, di pengadaan proyek konstruksi pemerintah, yang diyakini terjadi, yakni adanya penundaan yang sering untuk mencairkan anggaran proyek (manipulasi pembayaran) dengan alasan proses administrasi; mengalihkan anggaran dari satu proyek ke proyek yang lainnya; dan, menunda pembayaran proyek (diluncurkan) ke tahun anggaran yang baru. PPK menilai praktek manipulasi pembayaran, dapat berdampak pada instansi teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau bagi unit organisasi yang mengelola teknis pelaksanaan pengadaan proyek konstruksi pemerintah.
 - o Kontraktor berpendapat, praktek manipulasi pembayaran, di pengadaan proyek konstruksi pemerintah, yang diyakini terjadi, yakni pemerintah sering menunda pembayaran sebab alasan ketersediaan anggaran belum ada, atau dianggarkan kembali (dana luncluran) di tahun anggaran yang baru. Adanya kontraktor yang masih bergantung pada pendanaan proyek dari pemerintah untuk melaksanakan proyek konstruksi, manipulasi pembayaran dapat mengakibatkan kontraktor kekurangan anggaran (uang), untuk melaksanakan kegiatan pengadaan proyek konstruksi. Sehingga, bagi kontraktor dengan anggaran (uang) untuk melaksanakan proyek yang terbatas dan tertunda, maka pada akhirnya dapat berdampak pada mutu proyek konstruksi pemerintah yang dilaksanakan.
- 5. Secara deskriptif terdapat “Perbedaan Persepsi” antara PPK dengan Kontraktor, dalam menilai “Kategori Pelanggaran” praktek pelanggaran etika proyek

konstruksi pemerintah, yang saat ini diyakini terjadi. Terhadap praktek di bawah ini, PPK menilai berkategori pelanggaran “Menengah” dan Kontraktor menilai berkategori pelanggaran “Rendah” dan terhadap praktek yang berkategori pelanggaran tersebut, terdapat “Kesamaan Penilaian Dampak”. Hasilnya dipaparkan sebagai berikut:

- Variabel (X11) Menyogok dalam Bentuk Barang Berharga, terhadap praktek tersebut: Persepsi PPK berkategori pelanggaran yang “Menengah”, dan persepsi Kontraktor berkategori pelanggaran yang “Rendah”; dan, penilaian dampak, PPK maupun Kontraktor menilai dapat berdampak pada “Organisasi” (organisasi pemerintah dan kontraktor). Praktek yang diyakini terjadi, yaitu:
 - o Praktek menyogok dalam bentuk benda berharga, di pengadaan proyek konstruksi pemerintah, yang diyakini terjadi, yakni praktek saling mempengaruhi diantara anggota kelompok kerja panitia pengadaan dengan kontraktor atau diantara pihak-pihak yang berkontrak (wakil pemerintah dan kontraktor), dengan memberi materi yang selain uang tunai (misalnya dengan kompensasi barang dinas atau produk yang nanti dihasilkan dari pengadaan proyek konstruksi tersebut), untuk memenuhi keinginan pihak-pihak yang berkontrak, yang bertentangan dengan pedoman pengadaan proyek konstruksi pemerintah.

Adanya perbedaan persepsi dalam menilai kategori pelanggaran di atas, dikarenakan baik PPK maupun Kontraktor berada pada posisi tugas, tanggung jawab, dan pengalaman yang berbeda-beda. Masing-masing pihak (PPK maupun Kontraktor) dalam berprofesi, dapat berada pada posisi yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi, sebabnya dapat menghasilkan interpretasi/persepsi yang berbeda.

PPK ketika memberi penilaian, PPK berposisi sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pengadaan proyek konstruksi pemerintah, dan PPK berada pada posisi yang rentan untuk dipengaruhi dalam pengambilan keputusan, baik oleh atasan instansi, maupun oleh kontraktor (baik orang per orang atau pun oleh sekelompok orang). Sementara Kontraktor ketika memberi penilaian, kontraktor berada pada posisi pihak yang membutuhkan pekerjaan, dan kontraktor akan fokus pada beberapa proyek yang dapat ditangani

dalam satu tahun anggaran. Kontraktor pun dapat mempengaruhi atau pun dipengaruhi, saat pelaksanaan pengadaan proyek konstruksi pemerintah. Maka, tingkat interaksi yang dilakukan oleh masing-masing responden (PPK maupun Kontraktor) dalam bekerja memenuhi/menjalankan tugas pun akan berbeda-beda, sehingga gangguan praktek pelanggaran etika proyek konstruksi yang diperhadapkan kepada PPK maupun Kontraktor dapat menjadi berbeda pula.

4.5.3 Penyebab praktek pelanggaran etika proyek konstruksi pemerintah

Persepsi responden, mengenai penyebab pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian, yang berasal dari rangkuman hasil wawancara ke-tiga puluh dua responden penelitian, dan setelah mendapat tanggapan dari responden ahli mengenai bentuk-bentuk praktek yang diyakini terjadi, menunjukkan:

- 43.75% (responden) berpendapat, sebab tidak cukupnya pendidikan dan pelatihan etika profesional pengadaan proyek konstruksi pemerintah dalam mengatasi permintaan yang illegal (tidak etis). Para responden menanggapinya, sebagai bentuk kurang perhatian dari lembaga atau asosiasi professional, dalam bidang jasa konstruksi di Daerah penelitian, untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan, guna mengatasi isu perilaku tidak etis atau praktek pelanggaran etika di pengadaan proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian. Pendidikan dan pelatihan etika profesi dalam mengatasi permintaan yang illegal (tidak etis), di butuhkan sebab para pelaksana proyek konstruksi (baik PPK maupun Kontraktor) berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.
- 40.63% (responden) berpendapat, sebab praktek kompetisi tidak sehat di pengadaan proyek konstruksi pemerintah di Daerah penelitian. Praktek kompetisi tidak sehat dilakukan melalui praktek-praktek penyimpangan, berupa pengaturan pelelangan yang dilakukan oleh pemberi proyek, dan praktek meminjam bendera atau praktek-praktek monopoli, yang terkait erat dengan persengkongkolan oleh pemberi pekerjaan dan penyedia jasa dalam pengadaan proyek konstruksi.
- 15.63% (responden) berpendapat, sebab adanya bujukan dari pemegang otoritas (pimpinan organisasi). Para responden menanggapi, dengan adanya bujukan

dari pemegang otoritas, menunjukkan adanya sebagian kewenangan yang diambil dari PPK, sebagai pihak yang berkontrak dengan penyedia jasa, yang dilakukan oleh pemegang otoritas untuk mempengaruhi proses pengadaan proyek, sehingga proses pengadaan menjadi tidak sesuai dengan pedoman pengadaan proyek konstruksi pemerintah.

4.5.4 Solusi meminimalkan bentuk praktek pelanggaran etika proyek konstruksi pemerintah

Persepsi responden, mengenai solusi untuk meminimalkan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian saat ini, yang berasal dari rangkuman hasil wawancara ke-tiga puluh dua responden penelitian, dan setelah mendapat tanggapan dari responden ahli mengenai bentuk-bentuk praktek yang diyakini terjadi, menunjukkan:

- 59.38% (responden) berpendapat, melalui memberdayakan program pendidikan dan pelatihan etika profesional dalam bidang pengadaan proyek konstruksi pemerintah di Daerah penelitian. Upaya tersebut juga menunjukkan perlunya peningkatan penelitian dan pengembangan pendidikan etika profesional, untuk secara efektif menangani masalah etika di proyek konstruksi pemerintah. Serta, perlunya peran media asosiasi jasa konstruksi dan instansi pemerintah yang berwenang, untuk mempromosikan bentuk masyarakat konstruksi yang profesional.
- 31.25% (responden) berpendapat, melalui regulasi dan penegakan hukum oleh pemerintah di Daerah penelitian, dan penerapan sistem kontrol atau pedoman operasional yang memadai dalam pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah. Hal ini memandang perlunya merubah perilaku berbisnis di bidang usaha konstruksi dengan memandang perilaku tidak etis dalam pengadaan proyek konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian, yang merugikan kepentingan umum, dikategorikan sebagai aktivitas kriminal. Serta perlu adanya kemauan dan komitmen badan eksekutif dan legislatif, untuk mempromosikan dan menegakkan lingkungan profesional dalam pengadaan proyek konstruksi pemerintah di lingkungan Pemerintah di Daerah penelitian.

- 9.38% (responden) berpendapat, melalui penekanan sebuah bentuk kode etik profesional dalam pengadaan proyek konstruksi pemerintah. Hal ini dipandang, untuk membentengi sikap setiap anggota organisasi/instansi PPK maupun Kontraktor, untuk menilai dan meminimalkan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di pengadaan proyek konstruksi pemerintah, di Daerah penelitian.

Tabel 4.17 Identifikasi Deskriptif Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian dari Persepsi Pemerintah dengan Kontraktor di halaman setelah ini, memaparkan pengelompokkan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, berdasarkan kategori pelanggaran, serta menyandingkannya dengan hasil identifikasi penyebab dan solusi untuk menangani praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, yang masing-masing diurutkan berdasarkan penilaian persepsi responden (dari yang tinggi hingga yang rendah).

4.5.5 Hasil uji Anova

Uji Anova menunjukkan, dari ketujuh belas variabel penelitian terdapat empat variabel penelitian yang memiliki perbedaan persepsi antara PPK dengan Kontraktor, terhadap deskriptif rata-rata penilaian dampak. Perbedaan tersebut untuk variabel (X6) ketidakadilan dalam negosiasi kontrak, (X8) perselisihan kepentingan, (X14) memanipulasi informasi proyek, dan (X15) memanipulasi pengawasan proyek.

Menjelaskan mengapa empat variabel di atas berbeda, maka melalui klarifikasi hasil uji Anova dengan pernyataan atau pendapat dari responden ahli, melalui hasil wawancara bersama responden ahli. Tanggapan responden ahli untuk memberi pernyataan atau pendapat, yang dapat menjadi alasan terdapatnya perbedaan persepsi penilaian dampak praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, diantara PPK dengan Kontraktor, dengan pendekatan batasan praktek pelanggaran etika proyek konstruksi di lingkungan Pemerintah, di Daerah penelitian. Perbedaan hasil deskriptif rata-rata penilaian persepsi dampak, dikarenakan adanya perbedaan persepsi yang terjadi diantara kedua grup responden

Tabel 4.17 Identifikasi Deskriptif Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian dari Persepsi Pemerintah dengan Kontraktor

Persepsi “Kategori Pelanggaran” (KP) antara PPK dengan Kontraktor	Praktek pelanggaran Etika di Proyek Konstruksi Pemerintah Menurut “Kategori Pelanggaran”	Persepsi “Dampak” antara PPK dengan Kontraktor menurut “Kategori Pelanggaran”	Hasil Identifikasi Penyebab (Berdasarkan Peringkat Jawaban Responden), dan Solusi (Berdasarkan Kategori Pelanggaran), terhadap Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Pemerintah, dari Jawaban Keseluruhan Responden Penelitian.	
			Penyebab	Solusi
Kesamaan Persepsi dalam Penilaian KP yang Tinggi	X1. Mengakali Material; X2. Mengakali Volume Material.	Kesamaan Persepsi: dapat berdampak pada “Mutu”.	Pertama: “Tidak cukup pendidikan dan pelatihan etika profesional pengadaan proyek konstruksi pemerintah, dalam mengatasi permintaan yang ilegal.”	Solusi untuk meminimalkan bentuk praktek yang terkategori “Pelanggaran Tinggi”: Respon aktif dari manajemen dengan melakukan kajian secara aktif, dan melakukan penanganan secara berkelanjutan, melalui: - “Memberdayakan program pendidikan dan pelatihan etika professional, untuk secara efektif menangani praktek pelanggaran etika proyek konstruksi pemerintah.” - “Perlunya peran media asosiasi jasa konstruksi dan instansi pemerintah yang berwenang, untuk mempromosikan bentuk masyarakat konstruksi yang profesional.”
	X12. Menyogok dalam Bentuk Biaya Perjalanan; X17. Manipulasi Pendokumentasian Proyek.	Kesamaan Persepsi: dapat berdampak pada “Organisasi”.		
	X15. Manipulasi Pengawasan Proyek.	Perbedaan Persepsi: PPK menilai dapat berdampak pada “Organisasi”. Kontraktor menilai dapat berdampak pada “Mutu”.		

Lanjutan Tabel 4.17 Identifikasi Deskriptif Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Pemerintah di Daerah Penelitian dari Persepsi Pemerintah dengan Kontraktor

Persepsi “Kategori Pelanggaran” (KP) antara PPK dengan Kontraktor	Praktek pelanggaran Etika di Proyek Konstruksi Pemerintah Menurut “Kategori Pelanggaran”	Persepsi “Dampak” antara PPK dengan Kontraktor menurut “Kategori Pelanggaran”	Hasil Identifikasi Penyebab (Berdasarkan Peringkat Jawaban Responden), dan Solusi (Berdasarkan Kategori Pelanggaran), terhadap Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Pemerintah, dari Jawaban Keseluruhan Responden Penelitian.	
			Penyebab	Solusi
Kesamaan Persepsi dalam Penilaian KP yang Menengah	X9. Tidak Adil dalam Informasi, X14. Manipulasi Informasi Proyek, X16. Manipulasi Keselamatan Kerja di Proyek.	Kesamaan Persepsi, yakni: dapat berdampak pada “Organisasi”.	Kedua: “Praktek kompetisi tidak sehat di pengadaan proyek konstruksi pemerintah.”	Solusi untuk meminimalkan bentuk praktek yang terkategori “Pelanggaran Menengah”: Membentuk sistem kontrol yang memadai, untuk terus memantau dan mengkonfirmasi status pelanggaran etika proyek konstruksi, melalui: - “Regulasi dan penegakan hukum oleh pemerintah.” - “Sistem kontrol atau pedoman operasional yang memadai dalam pelaksanaan pengadaan proyek konstruksi pemerintah.”
Perbedaan Persepsi dalam Penilaian KP: PPK Menilai Tinggi Kontraktor Menilai Menengah	X3. Mengakali Dokumen, X4. Mengakali Biaya, X5. Tidak Adil dalam Tender, X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak, X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi), X8. Perselisihan Kepentingan, X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai	Kesamaan Persepsi yakni: dapat berdampak pada “Organisasi”.		

Lanjutan Tabel 4.17 Identifikasi Deskriptif Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Pemerintah di Daerah Penelitian dari Persepsi Pemerintah dengan Kontraktor

Persepsi “Kategori Pelanggaran” (KP) antara PPK dengan Kontraktor	Praktek pelanggaran Etika di Proyek Konstruksi Pemerintah Menurut “Kategori Pelanggaran”	Persepsi “Dampak” antara PPK dengan Kontraktor menurut “Kategori Pelanggaran”	Hasil Identifikasi Penyebab (Berdasarkan Peringkat Jawaban Responden), dan Solusi (Berdasarkan Kategori Pelanggaran), terhadap Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Pemerintah, dari Jawaban Keseluruhan Responden Penelitian.	
			Penyebab	Solusi
<p>Perbedaan Persepsi dalam Penilaian KP:</p> <p>PPK Menilai Tinggi</p> <p>Kontraktor Menilai Menengah</p>	<p>X13. Memanipulasi Pembayaran</p>	<p>Perbedaan Persepsi:</p> <p>PPK menilai dapat berdampak pada “Organisasi”.</p> <p>Kontraktor menilai dapat berdampak pada “Mutu”.</p>		
<p>Perbedaan Persepsi dalam Penilaian KP:</p> <p>PPK Menilai Menengah</p> <p>Kontraktor Menilai Rendah</p>	<p>X11.Menyogok dalam Bentuk Barang Berharga</p>	<p>Kesamaan Persepsi yakni: dapat berdampak pada “Organisasi”.</p>	<p>Ketiga:</p> <p>“Bujukan (negatif) dari pemegang otoritas (pimpinan organisasi).”</p>	<p>Solusi untuk meminimalkan bentuk praktek yang terkategori “Pelanggaran Rendah”:</p> <p>Diperlukan pemantauan untuk memastikan pelanggaran etika tidak meningkat diwaktu yang mendatang, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Menekankan sebuah bentuk kode etik profesional dalam pengadaan proyek konstruksi pemerintah.”

Hasil diskusi dengan responden ahli untuk variabel-variabel yang terdapat perbedaan persepsi dampak praktek pelanggaran etika proyek konstruksi, antara PPK dengan Kontraktor, dipaparkan sebagai berikut ini.

Variabel (X6) Tidak adil dalam negosiasi kontrak, atau adanya pengingkaran untuk berlaku seimbang (sama berat) terkait proses tawar menawar untuk membuat kontrak (perjanjian tertulis proyek), disebabkan:

Responden ahli PPK berpendapat, sebab:

- Perencanaan proyek akan dilaksanakan setelah ditetapkan anggaran proyek. Kondisi saat ini (tahun 2012-2014) penetapan anggaran Pemerintah di Daerah penelitian, dilakukan ketika sudah memasuki tiwulan kedua/ketiga di tahun anggaran berjalan. Sehingga, waktu untuk melaksanakan tender menjadi tidak cukup.
- Anggapan risiko pelaksanaan proyek sepenuhnya menjadi tanggungan kontraktor.
- Jenis kontrak yang digunakan tidak fleksibel. Jenis kontrak yang digunakan setiap tahun anggaran dalam pelaksanaan proyek konstruksi adalah kontrak lumpsum, yang pada jenis proyek tertentu (membangun jalan baru, membangun pondasi bangunan gedung di tempat rawa/berair) tidak menguntungkan kedua belah pihak (pemerintah dan kontraktor).
- Responden PPK berpendapat, akibat langsung dari adanya praktek tidak adil dalam negosiasi kontrak, dapat berdampak sepenuhnya (100%) pada organisasi pemerintah (unit organisasi pemerintah yang bertanggung jawab).

Praktek-praktek di atas menurut responden ahli PPK, disebabkan oleh belum dipahami sepenuhnya peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, oleh sumber daya manusia aparatur instansi pemerintah sebagai pemberi pekerjaan/proyek konstruksi, dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan proyek konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian. Ketidakpahaman ini dapat terjadi sebab kurangnya sosialisasi, atau pun kurangnya kepatuhan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Sehingga peluang-peluang, hak, dan

kewajiban pihak-pihak yang berkontrak dapat diabaikan, atau menjadi tidak sesuai dengan tata cara dalam pedoman pengadaan proyek konstruksi Pemerintah.

Responden ahli dari Kontraktor berpendapat, sebab:

- Ketika melaksanakan pengadaan proyek konstruksi Pemerintah, Kontraktor di Daerah penelitian sebagian besar masih membutuhkan pendanaan dari pencairan anggaran proyek terlebih dahulu.
- Anggapan risiko pelaksanaan proyek (mutu, biaya, dan waktu) menjadi tanggungan pemerintah.
- Kontraktor di Daerah penelitian belum sepenuhnya paham terhadap tata cara pengadaan sesuai pedoman pengadaan pemerintah.
- Responden Kontraktor berpendapat, akibat langsung dari adanya praktek tidak adil dalam negosiasi kontrak, tidak hanya dapat berdampak pada organisasi atau perusahaan kontraktor (56%), tetapi juga pada mutu (28%), dan pada biaya proyek (16%).

Posisi kontraktor di Daerah penelitian yang memiliki modal kecil, dan ketidakpahaman posisi sebagai rekanan pemerintah, untuk mewujudkan proses pengadaan yang adil dan seimbang, membuat kontraktor cenderung menerima keputusan sepihak (jenis kontrak, tata cara pembayaran) oleh pihak pemerintah, atau menekan pemerintah dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (meminta pencairan anggaran proyek terlebih dulu). Dengan kondisi tersebut, maka terdapat proyek yang hasilnya tidak sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan di dalam dokumen pengadaan, namun realisasi anggaran sudah terealisasi seratus persen (100%). Kontraktor di Daerah penelitian saat ini, sangat membutuhkan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah, juga pendidikan dan pelatihan dalam hal manajemen proyek di Daerah penelitian, yang dapat di wadahi oleh instansi pemerintah dan/atau asosiasi kontraktor.

Variabel (X8) Perselisihan kepentingan, atau adanya perihal berselisih untuk mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum dalam

pengadaan proyek konstruksi pemerintah. Perbedaan persepsi PPK dengan Kontraktor terhadap variabel perselisihan kepentingan, disebabkan:

Responden ahli dari PPK berpendapat, sebab:

- Sudah menjadi budaya dalam pelaksanaan pengadaan proyek konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian, sebab bujukan atau arahan (“negatif”) dari pemegang otoritas.
- Kurangnya kesadaran dalam beretika profesi (berperilaku etis) dalam menjalankan sistem pengadaan proyek konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian.
- Responden PPK berpendapat, akibat langsung dari adanya praktek perselisihan kepentingan, dapat berdampak sepenuhnya (100%) pada organisasi pemerintah (unit organisasi pemerintah yang bertanggung jawab).

Praktek-praktek di atas telah diyakini terjadi dan menjadi dilema bagi para PPK. Pemahaman yang diungkapkan saat ini, pada umumnya daerah otonom baru dan baru berkembang seperti di Daerah penelitian, kepentingan daerah menjadi lebih dominan, sehingga peran kepala pemerintahan (kepala daerah) menjadi lebih dominan dari semua ketentuan dalam etika pengadaan barang/jasa pemerintah.

Responden ahli dari Kontraktor berpendapat, sebab:

- Masyarakat di Daerah penelitian, siapa pun, dapat terpenggil untuk menjadi kontraktor, dari apa pun latar belakang profesi sebelumnya.
- Responden Kontraktor berpendapat akibat langsung dari adanya praktek perselisihan kepentingan, tidak hanya dapat berdampak pada organisasi atau perusahaan kontraktor (60%), tetapi juga pada biaya proyek (40%).

Selama periode kedua Pemerintahan di Daerah penelitian, telah banyak perusahaan kontraktor dibentuk. Masyarakat dari yang semula berprofesi sebagai pedagang, nelayan atau petani, telah banyak beralih menjadi kontraktor dan tidak ada kualifikasi maupun tingkat pendidikan yang mendukung. Sehingga dalam prakteknya unsur-unsur keberpihakan, baik itu saling berpihak diantara kontraktor

atau dengan pemerintah, lebih dikedepankan dari pada mengedepankan pengadaan proyek konstruksi Pemerintah yang professional di Daerah penelitian.

Variabel (X14) Manipulasi Informasi Proyek atau adanya perbuatan tidak mengindahkan kewajiban dalam menyediakan informasi proyek. Perbedaan persepsi PPK dengan Kontraktor terhadap variabel manipulasi informasi proyek, disebabkan:

Responden ahli dari PPK berpendapat, sebab:

- Isu pembebasan lahan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) akan didiskusikan jika terjadi masalah dilapangan dalam pelaksanaan proyek.
- Responden PPK berpendapat, akibat langsung dari adanya praktek manipulasi informasi proyek, dapat berdampak sepenuhnya (100%) pada organisasi pemerintah (unit organisasi pemerintah yang bertanggung jawab).

Ruang untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan proyek tertentu tidak dimungkinkan, dengan alasan yang diberikan, yakni pendeknya waktu untuk melaksanakan proses tender proyek, perencanaan fisik konstruksi akan dilakukan setelah ada anggaran untuk sebuah proyek, dan tanpa lagi mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi menghambat pelaksanaan proyek. Sehingga, masalah-masalah yang dapat terjadi ketika pelaksanaan proyek, seperti risiko keselamatan dan kesehatan kerja dan pembebasan lahan, tidak diprioritaskan dalam perencanaan proyek, tetapi akan dicarikan solusi ketika proyek telah dilaksanakan.

Responden ahli dari Kontraktor berpendapat, sebab:

- Ruang untuk penjelasan risiko proyek tidak diberikan.
- Isu pembebasan lahan dan metode kerja untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proyek harus diutamakan.
- Responden Kontraktor berpendapat akibat langsung dari adanya praktek manipulasi informasi proyek tidak hanya dapat berdampak pada organisasi atau perusahaan kontraktor (56%), tetapi juga pada mutu (28%), dan pada biaya proyek (16%).

Bagi kontraktor kesempatan untuk mendiskusikan masalah yang menjadi risiko proyek, yakni praktek keselamatan dan kesehatan kerja, dan masalah pembebasan lahan, adalah kesempatan yang sangat penting, guna menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan proyek konstruksi pemerintah, di Daerah penelitian. Sehingga, semestinya sebelum pelaksanaan aktivitas proyek konstruksi pemerintah dilaksanakan, masalah atau risiko pengadaan proyek konstruksi pemerintah di Daerah penelitian sudah harus diidentifikasi.

Variabel (X15) memanipulasi pengawasan proyek, atau adanya perbuatan tidak mengindahkan kewajiban dalam mengontrol (mengawasi dan memeriksa) proyek. Perbedaan persepsi PPK dengan Kontraktor terhadap variabel memanipulasi pengawasan proyek, disebabkan:

Responden ahli dari PPK berpendapat, sebab:

- Memanipulasi pengawasan proyek konstruksi, menurut persepsi PPK berarti dapat membawa dampak yang besar pada organisasi (85.70%), dan dampak lainnya pada mutu (14.30%), sebab kinerja PPK akan dipertanggung jawabkan kepada instansi dan menjadi pertanggung jawaban pemerintah daerah.

Menurut PPK, mengawasi proyek bertujuan dapat mempertanggung jawabkan kinerja proyek secara institusi kepada negara. Maka langkah-langkah dalam mengawasi proyek yang perlu dilakukan yakni memastikan kesesuaian progres proyek, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan proyek konstruksi, mampu mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul dilapangan agar hasil akhir proyek tepat harga, tepat mutu, tepat kuantitas, dan tepat waktu.

Responden ahli dari Kontraktor berpendapat, sebab:

- Persepsi kontraktor, dampak yang utama dari praktek memanipulasi pengawasan proyek yaitu pada mutu proyek (52%), dampak lainnya yaitu pada organisasi (40%), dan pada biaya (8%).

Menurut Kontraktor, sebagai pelaksana proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian, praktek memanipulasi pengawasan proyek dapat berdampak pada mutu proyek yang dilaksanakan, sebab akan menghambat dalam capaian

prestasi pekerjaan. Maka kontraktor akan fokus pada langkah-langkah yang dianggap memadai, untuk melindungi tempat kerja dan material bangunan, dan memastikan kualitas selama pelaksanaan pekerjaan.

Pada tabel 4.18 di halaman berikut ini, memaparkan rangkuman hasil deskripsi responden ahli terhadap empat variabel yang berbeda persepsi, dari hasil uji anova penilaian persepsi dampak praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di Daerah penelitian, antara PPK dengan Kontraktor.

4.5.6 Aspek pengawasan melalui kajian literatur

Hasil identifikasi pelanggaran etika proyek konstruksi, dalam penelitian ini mengungkapkan adanya aspek pengawasan yang lemah, dimana terungkap memanipulasi pengawasan proyek konstruksi terkategori pelanggaran yang tinggi, dan terhadap aspek tersebut baik pemerintah (PPK) maupun penyedia jasa (Kontraktor) masih memiliki perbedaan persepsi yang tinggi terhadap dampak memanipulasi aspek pengawasan proyek konstruksi.

Pada kajian berikut ini akan memaparkan bagaimana praktek yang ideal dari aspek pengawasan dilihat dari praktek manajemen proyek (PMBOK, 2013) dan praktek penilaian resiko dalam konteks anti korupsi (UN Global Compact, 2013).

4.5.6.1 Aspek pengawasan dalam lingkup manajemen proyek

Aspek pengawasan (monitoring) dan pengendalian proses grup dalam praktek manajemen proyek, terdiri dari proses-proses yang diperlukan untuk melacak, review, dan mengatur kemajuan dan kinerja proyek; mengidentifikasi daerah-daerah yang di mana perubahan rencana diperlukan; dan memulai perubahan yang sesuai. Manfaat utama dari “kelompok proses” ini adalah bahwa kinerja proyek diukur dan dianalisis secara berkala, mengeksekusi proyek sesuai rencana atau untuk kondisi pengecualian dapat mengidentifikasi varians dari rencana manajemen proyek. Monitoring dan Pengendalian Proses Grup juga melibatkan tindakan-tindakan:

- Mengontrol perubahan dan merekomendasikan tindakan perbaikan atau pencegahan untuk mengantisipasi kemungkinan masalah;

Tabel 4.18 Deskripsi Persepsi Responden Ahli: Terhadap Empat Variabel yang Berbeda Persepsi dari Hasil Uji Anova Penilaian Dampak Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian antara Responden PPK dengan Kontraktor

VARIABEL	ALASAN SEBAB PERBEDAAN PERSEPSI		SARAN	
	PPK	KONTRAKTOR	PPK	KONTRAKTOR
(X6) Ketidakadilan dalam Negosiasi Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - “Adanya Kendala pada waktu untuk melaksanakan proses tender.” - Adanya anggapan risiko pelaksanaan proyek sepenuhnya menjadi tanggungan kontraktor. - Jenis kontrak yang digunakan sifatnya baku (tidak dapat di ubah). - Responden PPK berpendapat, akibat langsung dari adanya praktek tidak adil dalam negosiasi kontrak, dapat berdampak sepenuhnya (100%) pada organisasi pemerintah (unit di instansi pemerintah yang bertanggung jawab). 	<ul style="list-style-type: none"> - “Kontraktor di Daerah penelitian sebagian besar masih membutuhkan pendanaan dari pencairan anggaran proyek terlebih dahulu.” - Anggapan risiko pelaksanaan proyek (mutu, biaya, dan waktu) menjadi tanggungan pemerintah. - Jenis kontrak yang digunakan tidak fleksibel. - Adanya pengakuan “kontraktor di Daerah penelitian belum sepenuhnya paham terhadap tata cara pengadaan sesuai pedoman pengadaan pemerintah.” - Responden Kontraktor berpendapat, akibat langsung dari adanya praktek tidak adil dalam negosiasi kontrak, tidak hanya dapat berdampak pada organisasi atau perusahaan kontraktor (56%), tetapi juga 	<p>“Perlunya peningkatan pemahaman dan kepatuhan untuk menjalankan peraturan sesuai pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.”</p>	<p>“Kontraktor di Daerah penelitian saat ini, sangat membutuhkan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah, juga pendidikan dan pelatihan manajemen proyek.”</p>

Lanjutan Tabel 4.18 Deskripsi Persepsi Responden Ahli: Terhadap Empat Variabel yang Berbeda Persepsi dari Hasil Uji Anova Penilaian Dampak Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian antara Responden PPK dengan Kontraktor

VARIABEL	ALASAN SEBAB PERBEDAAN PERSEPSI		SARAN	
	PPK	KONTRAKTOR	PPK	KONTRAKTOR
		pada mutu (28%), dan pada biaya proyek (16%).		
(X8) Perselisihan Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - “Sebab adanya bujukan atau arahan (“negatif”) dari pemegang otoritas (pimpinan organisasi).” - “Kurangnya kesadaran dalam beretika profesi (bersikap profesional) dalam menjalankan proses pengadaan proyek konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian.” - Responden PPK berpendapat, akibat langsung dari adanya praktek perselisihan kepentingan, dapat berdampak sepenuhnya (100%) pada organisasi pemerintah (unit di instansi pemerintah yang bertanggung jawab). 	<ul style="list-style-type: none"> - “Masyarakat di Daerah penelitian, siapa pun, dapat terpanggil untuk menjadi kontraktor, dari apa pun latar belakang profesi sebelumnya.” - Responden Kontraktor berpendapat akibat langsung dari adanya praktek perselisihan kepentingan, tidak hanya dapat berdampak pada organisasi atau perusahaan kontraktor (60%), tetapi juga pada biaya proyek (40%). 	“Perlu merubah pemahaman/budaya yang terjadi saat ini, dengan mengedepankan proses pengadaan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan etika/pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah.”	“Unsur-unsur keberpihakan terhadap kontraktor lokal harus tetap dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mewujudkan pengadaan proyek konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian yang profesional.”
(X14) Memaniplasi Informasi Proyek	<ul style="list-style-type: none"> - “Isu pembebasan lahan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) akan didiskusikan, jika terjadi 	<ul style="list-style-type: none"> - “Ruang untuk penjelasan risiko proyek tidak diberikan.” - Isu pembebasan lahan, dan metode kerja untuk menjamim 	“Perlu memprioritaskan dan menemukan solusi, risiko pelaksanaan proyek konstruksi	“Mendorong pemerintah agar memprioritaskan isu keselamatan dan kesehatan

Lanjutan Tabel 4.18 Deskripsi Persepsi Responden Ahli: Terhadap Empat Variabel yang Berbeda Persepsi dari Hasil Uji Anova Penilaian Dampak Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian antara Responden PPK dengan Kontraktor

VARIABEL	ALASAN SEBAB PERBEDAAN PERSEPSI		SARAN	
	PPK	KONTRAKTOR	PPK	KONTRAKTOR
	<p>masalah di lapangan dalam pelaksanaan proyek.”</p> <p>- Responden PPK berpendapat, akibat langsung dari adanya praktek memanipulasi informasi proyek, dapat berdampak sepenuhnya (100%) pada organisasi pemerintah (unit di instansi pemerintah yang bertanggung jawab).</p>	<p>kelancaran pelaksanaan proyek tidak diutamakan.</p> <p>- Responden Kontraktor berpendapat akibat langsung dari adanya praktek memanipulasi informasi proyek tidak hanya dapat berdampak pada organisasi atau perusahaan kontraktor (56%), tetapi juga pada mutu (28%), dan pada biaya proyek (16%).</p>	<p>pemerintah di Daerah penelitian, terkait isu keselamatan dan kesehatan kerja, dan masalah pembebasan lahan.”</p>	<p>kerja, dan masalah pembebasan lahan.”</p>
(X15) Manipulasi Pengawasan Proyek	<p>- Manipulasi pengawasan proyek konstruksi, menurut persepsi PPK, berarti dapat membawa dampak yang besar pada organisasi (85.70%), dan dampak lainnya pada mutu (14.30%), sebab kinerja PPK akan dipertanggung jawabkan kepada instansi dan menjadi pertanggung jawaban pemerintah daerah.</p>	<p>- Persepsi kontraktor, dampak yang utama dari praktek Manipulasi pengawasan proyek yaitu pada mutu proyek (52%), dampak lainnya yaitu pada organisasi (40%), dan pada biaya (8%).</p>	<p>“Memastikan kesesuaian progres proyek, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan proyek konstruksi, mampu mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul dilapangan agar hasil akhir proyek tepat harga, tepat mutu, tepat kuantitas, dan tepat waktu.”</p>	<p>“Fokus pada langkah-langkan yang dianggap memadai, untuk melindungi tempat kerja dan material bangunan, dan memastikan kontrol kualitas dilakukan selama pelaksanaan pekerjaan.”</p>

- Pemantauan kegiatan proyek yang sedang berlangsung terhadap rencana manajemen proyek dan pengukuran awal kinerja proyek; dan,
- Menghindari faktor-faktor perubahan yang bisa mempengaruhi kontrol terpadu atau konfigurasi manajemen, sehingga perubahan yang hanya disetujui yang diimplementasikan.

Pemantauan merupakan aspek dari manajemen proyek yang dilakukan sepanjang siklus proyek. Pemantauan meliputi pengumpulan, pengukuran, dan mendistribusikan informasi kinerja, dan menilai pengukuran dan tren untuk mengadakan proses perbaikan. Pemantauan tim manajemen proyek terus menerus memberikan wawasan “kesehatan proyek” dan mengidentifikasi setiap daerah yang memerlukan perhatian khusus. Kontrol meliputi penentuan tindakan perbaikan atau pencegahan atau perencanaan ulang, dan menindaklanjuti rencana aksi untuk menentukan apakah tindakan yang diambil dapat menyelesaikan masalah kinerja. Proses monitor dan pengendalian kerja proyek berkaitan dengan:

- Membandingkan kinerja proyek yang sebenarnya terhadap rencana manajemen proyek;
- Menilai kinerja yang ditunjukkan untuk menentukan apakah tindakan perbaikan atau pencegahan, dan kemudian merekomendasikan tindakan-tindakan yang diperlukan;
- Mengidentifikasi dan menganalisis risiko baru, pelacakan, dan pemantauan risiko proyek yang ada untuk memastikan identifikasi risiko yang akan datang, melaporkan status kinerja, dan mengkaji apakah rencana respon risiko yang sesuai sedang dijalankan;
- Mempertahankan akurasi informasi yang tepat waktu, mengenai produk proyek dan dokumentasi terkait basis penyelesaian proyek;
- Memberikan status informasi untuk mendukung pelaporan, pengukuran kemajuan, dan peramalan;
- Memberikan perkiraan untuk memperbarui biaya saat ini dan informasi jadwal saat ini;
- Pemantauan perubahan Pelaksanaan yang disetujui; dan

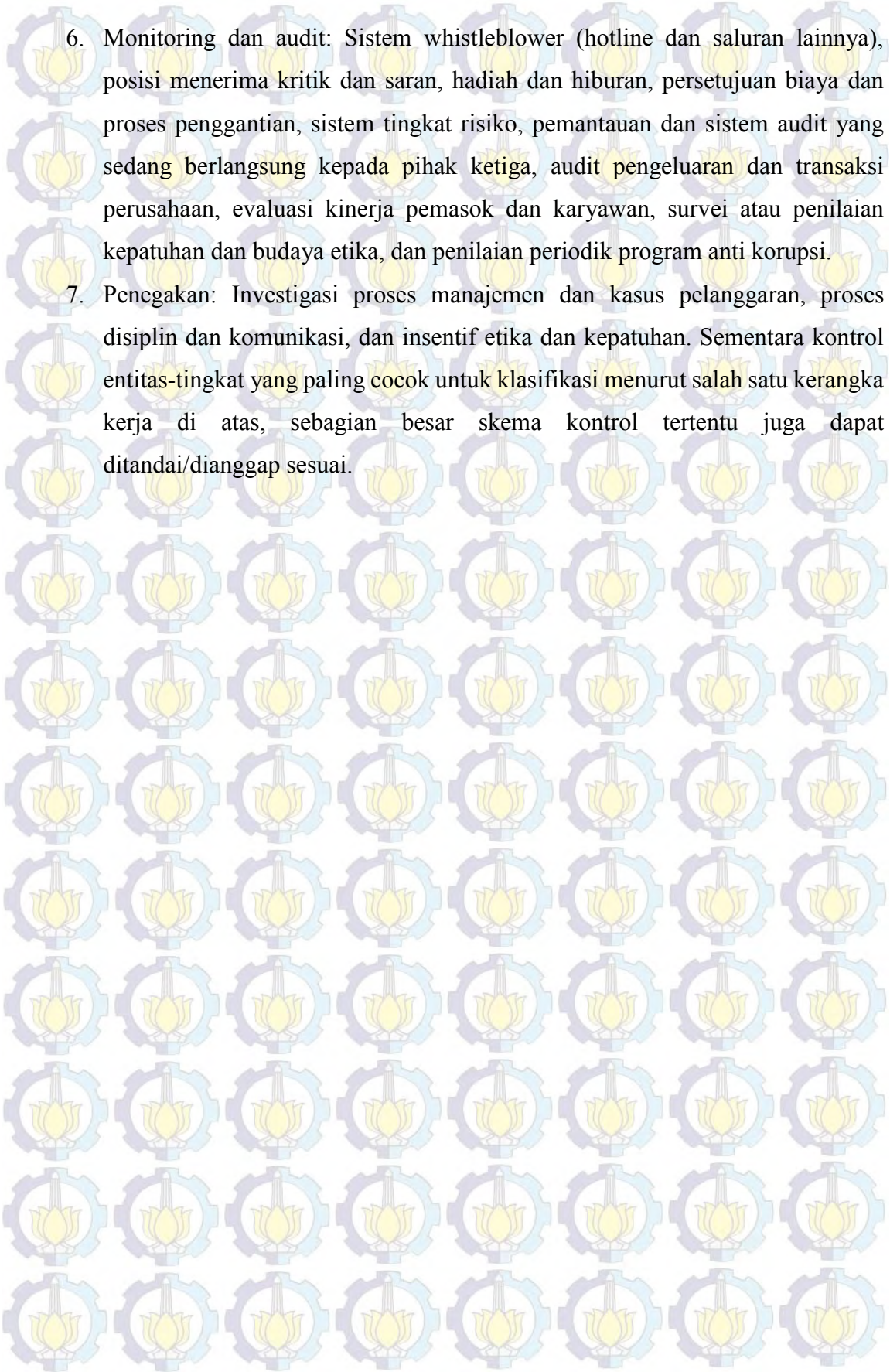
- Memberikan laporan kemajuan dan status proyek yang sesuai untuk program manajemen proyek, yang mana ini adalah bagian dari keseluruhan program.

4.5.6.2 Aspek pengawasan dalam konteks anti korupsi

Praktek penilaian risiko anti korupsi (dalam pendekatan pelanggaran etika pada masalah penelitian ini), memiliki berbagai pilihan katalog kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan upaya pengawasan dan mitigasi pelanggaran etika. Berikut praktek-praktek acuan yang paling umum digunakan, diantaranya: Mengacu pada elemen program kepatuhan anti-korupsi yang efektif dari OECD, sebagai pedoman praktek etika, dan “kepatuhan yang baik” untuk pengendalian di internal organisasi; prinsip bisnis untuk melawan penyuapan yang dikeluarkan oleh Transparency International; dan, UNODC sebuah prinsip etika dan program kepatuhan untuk bisnis anti korupsi, yang merupakan sebuah panduan praktis.

Ketika proses pengawasan mengidentifikasi dan mitigasi risiko pelanggaran etika proyek konstruksi, akan berguna jika memulainya dengan pengawasan umum dan kemudian mempersempit ke skema tertentu. Menggunakan kerangka keunggulan U.S FSG, pencetus kerangka pengawasan umum (pengawasan entitas) meliputi:

1. Program struktur dan sumber: Sebuah program formal untuk kepatuhan anti korupsi, dengan mendefinisikan struktur, kepemilikan, otoritas, rencana kegiatan, dan anggaran.
2. Program pengawasan: Melaporkan hubungan dan pengawasan program dengan otoritas internal yang relevan.
3. Standar tertulis: Kode etik dan kebijakan yang relevan.
4. Proses pembinaan: Pemeriksaan latar belakang karyawan dan pihak ketiga di awal, pemisahan tugas, batas otoritas, kajian kontrak dan persetujuan (vendor, pelanggan), dan ketentuan kepatuhan dalam kontrak pihak ketiga.
5. Pelatihan dan komunikasi: Program pelatihan formal, komunikasi periodik kepada karyawan, ketersediaan dan komitmen manajer untuk melakukan bimbingan dan mempekerjakan sumber daya.

- 
6. Monitoring dan audit: Sistem whistleblower (hotline dan saluran lainnya), posisi menerima kritik dan saran, hadiah dan hiburan, persetujuan biaya dan proses penggantian, sistem tingkat risiko, pemantauan dan sistem audit yang sedang berlangsung kepada pihak ketiga, audit pengeluaran dan transaksi perusahaan, evaluasi kinerja pemasok dan karyawan, survei atau penilaian kepatuhan dan budaya etika, dan penilaian periodik program anti korupsi.
 7. Penegakan: Investigasi proses manajemen dan kasus pelanggaran, proses disiplin dan komunikasi, dan insentif etika dan kepatuhan. Sementara kontrol entitas-tingkat yang paling cocok untuk klasifikasi menurut salah satu kerangka kerja di atas, sebagian besar skema kontrol tertentu juga dapat ditandai/dianggap sesuai.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan permasalahan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

Penilaian deskriptif persepsi bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian, dari persepsi PPK dengan Kontraktor, terungkap bahwa bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian, “diyakini” terjadi dalam bentuk-bentuk praktek penipuan, ketidakadilan, penyuapan, dan manipulasi.

Penilaian deskriptif frekuensi dan dampak, dari persepsi responden PPK dengan Kontraktor, mengungkapkan adanya kesamaan dan perbedaan persepsi. Adanya kesamaan dan perbedaan persepsi dikarenakan baik PPK maupun Kontraktor berada pada posisi tugas, tanggung jawab, dan pengalaman yang berbeda-beda. Masing-masing pihak (PPK maupun Kontraktor) dalam berprofesi, dapat berada pada posisi yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi, sebabnya dapat menghasilkan interpretasi/persepsi yang berbeda. PPK maupun Kontraktor sepakat bahwa praktek-praktek dengan pelanggaran yang tinggi, yaitu:

- Praktek mengganti dan memasang material bangunan konstruksi yang kualitas material bangunan tidak sesuai, dengan yang dipersyaratkan di dalam dokumen pengadaan proyek, yang dapat berdampak pada mutu proyek bangunan konstruksi.
- Praktek mengurangi volume material bangunan konstruksi (volume material yang terpasang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam dokumen pengadaan proyek), yang dapat berdampak pada mutu proyek bangunan konstruksi.
- Penyedia jasa proyek konstruksi (kontraktor) mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pihak pemberi pekerjaan (pemerintah), dengan memberi fasilitas dalam bentuk biaya perjalanan, untuk menguasai proyek konstruksi pemerintah,

sehingga diharapkan memberi keuntungan bagi pihak-pihak tersebut, yang bertentangan dengan pedoman pengadaan proyek konstruksi pemerintah, yang dapat berdampak pada organisasi masing-masing responden (Pemerintah maupun Kontraktor).

- Manipulasi pendokumentasian proyek terkait adanya perbuatan penyelewengan atau berbuat curang terkait mendokumentasikan proyek (semua rancangan gambar, dokumen laporan proyek, dan dokumen lain baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy), yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan proyek konstruksi pemerintah, di nilai dapat berdampak pada organisasi masing-masing responden (Pemerintah maupun Kontraktor).

Deskripsi penyebab praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di Daerah penelitian, antara lain:

- Tidak cukup pendidikan dan pelatihan etika profesional dalam aspek pengadaan proyek konstruksi pemerintah, untuk mengatasi permintaan yang ilegal.
- Praktek kompetisi tidak sehat di sektor pengadaan proyek konstruksi pemerintah.
- Adanya arahan (“negatif”) dari pemegang otoritas (pimpinan organisasi).

Deskripsi solusi meminimalkan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di Daerah penelitian, adalah sebagai berikut:

- Memberdayakan program pendidikan, dan pelatihan etika profesional, oleh lembaga atau asosiasi profesi jasa konstruksi, di Daerah penelitian.
- Melalui penegasan aspek regulasi dan penegakan hukum di sektor pengadaan proyek konstruksi pemerintah, oleh pemerintah di Daerah penelitian.
- Menerapkan dan mematuhi kode etik pada organisasi yang bergerak di sektor pengadaan proyek konstruksi pemerintah, di Daerah penelitian.

Hasil uji Anova mengungkapkan adanya empat variabel praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, yang terdapat perbedaan rata-rata persepsi penilaian dampak, antara PPK dengan Kontraktor. Menurut responden ahli, adanya perbedaan persepsi penilaian dampak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Praktek pengingkaran untuk berlaku seimbang terkait proses tawar menawar untuk membuat kontrak (perjanjian tertulis proyek), disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman terhadap tata cara pengadaan proyek konstruksi pemerintah.
2. Praktek berselisih untuk mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum dalam pengadaan proyek konstruksi pemerintah, disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi terhadap arti keberpihakan kepada kontraktor lokal atau kontraktor dengan Gred kecil yang diamanatkan pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Praktek tidak mengindahkan kewajiban dalam menyediakan informasi proyek, disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi terhadap pentingnya penanganan isu pembebasan lahan, dan keselamatan dan kesehatan kerja di pengadaan proyek konstruksi pemerintah.
4. Praktek tidak mengindahkan kewajiban dalam mengontrol (mengawasi dan memeriksa) proyek, disebabkan oleh adanya perbedaan tuntutan tugas, tanggung jawab dan kewenangan. PPK menilai dapat langsung berdampak pada organisasi, sebab harus memastikan agar hasil akhir proyek tepat harga, tepat mutu, tepat kuantitas, dan tepat waktu. Berbeda dengan kontraktor, kontraktor menilai dapat berdampak pada mutu, sebab kontraktor perlu fokus pada langkah-langkan yang dianggap memadai, untuk melindungi tempat kerja dan material bangunan, dan mengejar progress proyek.

Dengan membandingkan hasil temuan penelitian dengan metode atau praktek manajemen proyek menurut konsep *Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge* (PMBOK, 2013), maka disimpulkan aspek pengawasan proyek konstruksi di Daerah penelitian masih “lemah.” Lemahnya aspek pengawasan yang terjadi telah menjadi salah satu penyebab terjadinya praktek-praktek pelanggaran etika dalam pelaksanaan pengadaan proyek konstruksi pemerintah di Daerah penelitian.

Dengan mengacu pada konsep anti korupsi *United Nations Global Compact: A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment* (UN, 2013), maka dapat diadopsi sebuah proses, cara, atau tindakan-tindakan yang diperlukan, guna menilai

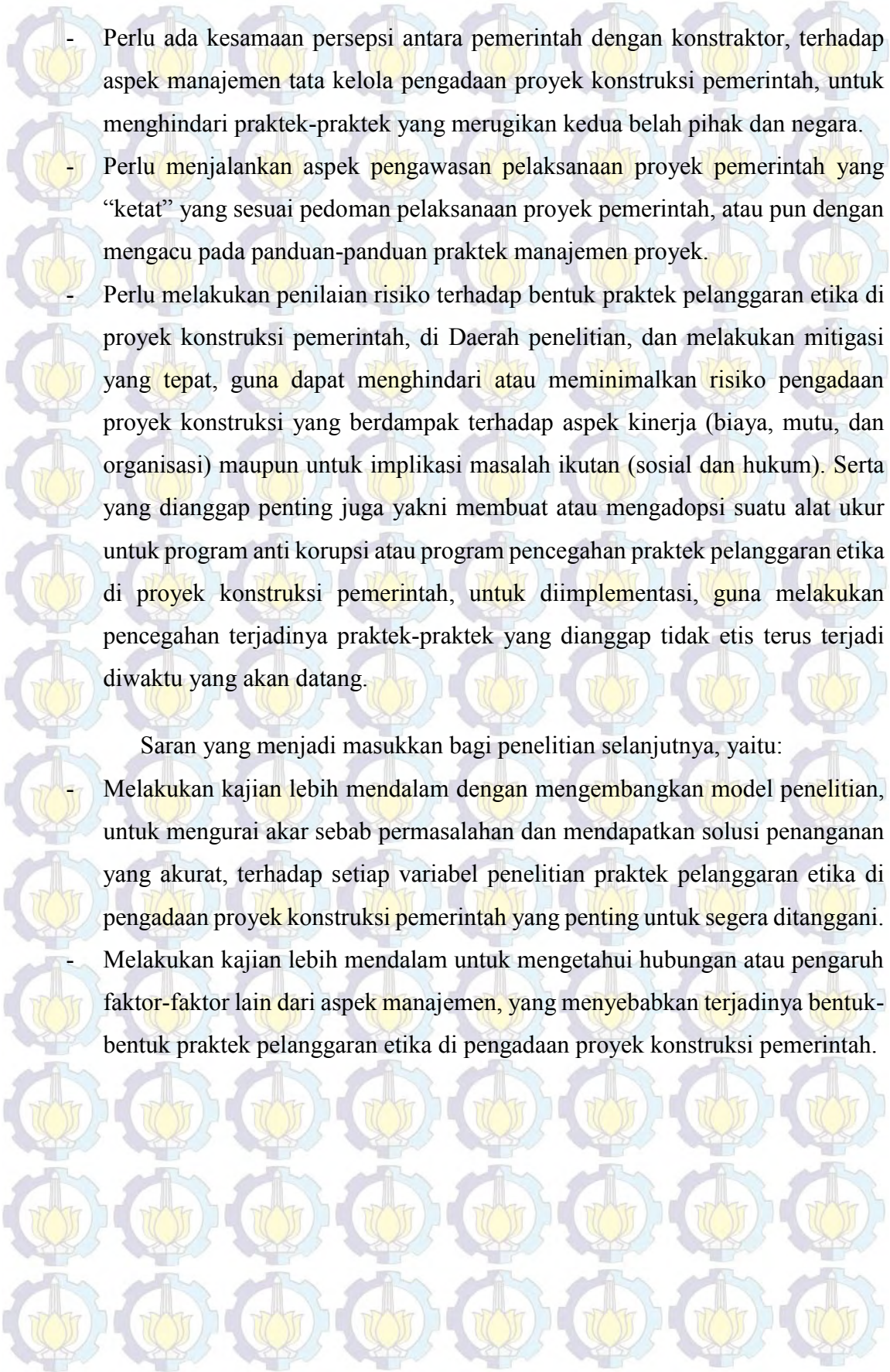
status dan risiko dari adanya praktek korupsi, dan melakukan mitigasi yang diperlukan untuk mengurangi praktek pelanggaran etika di pengadaan proyek konstruksi pemerintah, di Daerah penelitian, sehingga diharapkan dapat menghindari kerugian-kerugian akibat praktek-praktek yang dianggap tidak etis (tidak profesional) tersebut.

5.2 Saran

Saran yang dihasilkan berdasarkan pembahasan permasalahan penelitian ini yang dapat menjadi masukan, pertama untuk mengatasi isu praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, secara khusus di Daerah penelitian; dan kedua untuk menjadi masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Saran bagi manajemen (pemerintah dan kontraktor) yang berkepentingan terhadap pelaksanaan pengadaan proyek konstruksi pemerintah di Daerah penelitian, yaitu:

- Meminimalkan bentuk praktek yang terkategori “Pelanggaran Tinggi” dapat melalui respon aktif dari manajemen, untuk melakukan kajian secara aktif dan melakukan penanganan secara berkelanjutan, dengan menggiatkan program pendidikan dan pelatihan etika profesional, untuk secara efektif menangani praktek pelanggaran etika di pengadaan proyek konstruksi pemerintah. Serta perlunya peran media, baik itu di asosiasi jasa konstruksi maupun instansi pemerintah di Daerah penelitian yang berwewenang, untuk mempromosikan bentuk masyarakat konstruksi yang profesional.
- Meminimalkan bentuk praktek yang terkategori “Pelanggaran Menengah” manajemen harus terus memantau dan mengkonfirmasi status pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah tersebut, dengan membentuk sistem kontrol (pedoman operasional) yang memadai dan penegakkan regulasi, oleh Pemerintah di Daerah penelitian.
- Meminimalkan bentuk praktek yang terkategori “Pelanggaran Rendah” manajemen harus terus memantau untuk memastikan praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah tersebut, tidak meningkat di waktu yang mendatang, dengan menekankan bentuk kode etik dalam organisasi proyek.

- 
- Perlu ada kesamaan persepsi antara pemerintah dengan kontraktor, terhadap aspek manajemen tata kelola pengadaan proyek konstruksi pemerintah, untuk menghindari praktek-praktek yang merugikan kedua belah pihak dan negara.
 - Perlu menjalankan aspek pengawasan pelaksanaan proyek pemerintah yang “ketat” yang sesuai pedoman pelaksanaan proyek pemerintah, atau pun dengan mengacu pada panduan-panduan praktek manajemen proyek.
 - Perlu melakukan penilaian risiko terhadap bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di Daerah penelitian, dan melakukan mitigasi yang tepat, guna dapat menghindari atau meminimalkan risiko pengadaan proyek konstruksi yang berdampak terhadap aspek kinerja (biaya, mutu, dan organisasi) maupun untuk implikasi masalah ikutan (sosial dan hukum). Serta yang dianggap penting juga yakni membuat atau mengadopsi suatu alat ukur untuk program anti korupsi atau program pencegahan praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, untuk diimplementasi, guna melakukan pencegahan terjadinya praktek-praktek yang dianggap tidak etis terus terjadi diwaktu yang akan datang.

Saran yang menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya, yaitu:

- Melakukan kajian lebih mendalam dengan mengembangkan model penelitian, untuk mengurai akar sebab permasalahan dan mendapatkan solusi penanganan yang akurat, terhadap setiap variabel penelitian praktek pelanggaran etika di pengadaan proyek konstruksi pemerintah yang penting untuk segera ditangani.
- Melakukan kajian lebih mendalam untuk mengetahui hubungan atau pengaruh faktor-faktor lain dari aspek manajemen, yang menyebabkan terjadinya bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di pengadaan proyek konstruksi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahzahar, N., Karim, N. A., & Eman, H. J. (2011). A Study of Contribution Factors to Building Failures and Defects in Construction Industry. *Procedia Engineering*, 249-255.

Alias, Z., Baharum, Z. A., & Idris, M. F. (2012). Project Management Towards Best Practise. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 108-120.

Aliza, A. H., Stephen, K., Trigunarsyah, & Bambang (2011). The Importance of Project Governance Framework in Project Procurement Planning. *Procedia Engineering*, 1929-1937.

Bredillet, C., Tywoniak, S., & Dwivedula, R. (2014). What is a Good Project Manager? An Aristotelian Perspective. *International Journal of Project Management*.

Chang, W. (2011). Perlukah Etika Bisnis. *MaBis*.

Guo, F., Richards, Y. C., Wilkinson, S., & Li, T. C. (2013). Effects of Project Governance Structures On the Management Of Risks in Major Infrastructure Projects: A Comparative Analysis. *International Journal of Project Management*.

Hamimah, A., Hashim, N., Yusuwan, N. M., & Ahmad, N. (2012). Ethical Issues in the Construction Industry: Contractor's. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 719-727.

Hutcheson, J. (1984). Educating Project Managers for the Construction Industry in Australia. *Project Management*.

Janipha, N. A., & Ismail, F. (2013). Conceptualisation of Quality Issues in Malaysian Construction Environment. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 53-61.

KBBI, K. (2015, 04 27). *Tentang KBBI daring*. Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <http://kbbi.web.id/>

- KPK Indonesia. (2014, Juni 30). *Penanganan TPK Berdasarkan Jenis Perkara*. Retrieved from <http://www.kpk.go.id>: <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-jenis-perkara>
- Malik, A. (2010). *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*. Indonesia: ANDI.
- Mason, J., & England. (2011). *Can a Single Code for Professionals Promote Ethical Improvement in the Construction Industry?* Marrakech, Morocco: Spatial Information Processing I.
- Mishra, P., Dangayach, G., & Mittal, M. (2011). An Ethical Approach Towards Sustainable Project SUCCESS. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 338-344.
- Mitkus, S., & Mitkus, T. (2014). Causes of conflicts in a construction industry: a communicational approach. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 777-786.
- Müller, R., & Lecoeuvre, L. (2014). Operationalizing Governance Categories of Projects. *International Journal of Project Management*.
- Nahod, M. M., Vukomanovic, M., & Radujkovic, M. (2013). The Impact of ICB 3.0 Competences on Project Management Success. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 244-254.
- Neu, D., Everett, J., & Rahaman, A. S. (2014). Preventing Corruption Within Government Procurement: Constructing the Disciplined and Ethical Subject. *Critical Perspectives on Accounting*.
- Nordin, R. M., Takim, R., & Nawawi, A. H. (2012). Transparency Initiatives (TI) in Construction: The Social Psychology of Human Behaviours. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 350-360.
- Pemerintah Daerah penelitian. (2006). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2006-2010*. Daerah X: Pemerintah Daerah (X).
- Pemerintah Daerah (X). (2014). *Profil Daerah (X)*. Daerah (X): Pemerintah Daerah (X).

Perpres 70. (2012). *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Indonesia.

PMBOK. (2013). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge*.

Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299 USA: Project Management Institute, Inc.

Pujianto, A. (2014, 9 September 4). *Ahmat Pujianto*. Retrieved from <http://fijaytrangki.blogspot.com/2014/09/penerapan-manajemen-risiko-dalam.html>: <http://fijaytrangki.blogspot.com/2014/09/penerapan-manajemen-risiko-dalam.html>

Rahman, H. A., Wang, C., & Saimon, M. A. (2011). *Clients' Perspectives of Professional Ethics for Civil Engineers*. Malaysia: Journal of the South African Institution of Civil Engineering.

Richea, M. M. (2013). Management Ethical Principles and Ethical Behaviour in the Non-profit Organisations. Shaping a Causal Liaison or a Myth? *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 789-798.

Riduan. (2011). *Dasar-dasar Statistika*. Bandung: ALFABETA.

Satiadarma, M. P. (2004). Pendidikan Kreativitas ataukah Pendidikan Moral. *Provita*.

Silaen, S., & Widiono. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: IN MEDIA.

Sumanto. (2009). *STATISTIK DESKRIPTIF*. Yogyakarta: CAPS.

Susanto, H., & Makmur, H. (2013). *Auditing Proyek-proyek Konstruksi*. Jambi: ANDI.

Takim, R., Shaari, S. M., & Nordin, R. M. (2013). Transparency Initiative (TI) for Enhancing Quality of Life: Behavioural components that lead to corruption in construction. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 110-119.

- 
- Tao, G., & Jingjing, W. (2011). A Study of the Owner's Commission Model and Incentive Contract Based on Principal-Agent Relationship. *Systems Engineering Procedia*, 399-405.
- Too, E. G., & Weaver, P. (2013). The Management of Project Management: A Conceptual Framework for Project Governance. *International Journal of Project Management*.
- Tota, I., & Shehu, H. (2012). The Dilemma of Business Ethics. *Procedia Economics and Finance*, 555-559.
- Trivellas, P., & Drimoussis, C. (2013). Investigating Leadership Styles, Behavioural and Managerial Competency Profiles of Successful Project Managers in Greece. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 692-700.
- UN Global Compact. (2013). *A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment*. Two United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA: United Nations Global Compact Office.
- UN, G. C. (2013). *A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment*. Two United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA: United Nations Global Compact.
- Undang-undang Nomor 18. (1999). *Jasa Konstruksi*. Indonesia.

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian



PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN TEKNOLOGI
BIDANG KEAHLIAN MANAJEMEN PROYEK
PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2014

KUESIONER PENELITIAN TESIS

JUDUL TESIS

**IDENTIFIKASI PELANGGARAN ETIKA PROYEK KONSTRUKSI
DALAM LINGKUP PROYEK PEMERINTAH DI DAERAH (X).
TINJAUAN DARI PERSPEKTIF: PEMERINTAH DAN KONTRAKTOR**

Kuesioner Penelitian:

Kuesioner ini dibuat untuk kepentingan penelitian. Kuesioner ini sebagai alat untuk mendapatkan data penelitian dalam menyelesaikan Tesis pada Program Studi Magister Manajemen Teknologi, bidang keahlian Manajemen Proyek ITS Surabaya. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, Kami Berkewajiban Menjamin Kerahasiaan Identitas Responden. Kami mohon agar kuesioner ini dapat diisi dengan obyektif dan sebenar-benarnya.

Tujuan penelitian:

Mengidentifikasi dan mendeskripsikan persepsi terhadap bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, dan dapat mendeskripsikan penyebab dan solusi untuk meminimalkan pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah.

Tujuan survei:

Tujuan survei ini untuk mendapat respon/persepsi dari Bapak/Ibu mengenai bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, tingkat persetujuan, persepsi terhadap frekuensi, dan dampak praktek pelanggaran etika terhadap proyek.

Profil Responden*

Data profil responden dibutuhkan untuk pengelompokkan sampel, dan tidak untuk dipublikasikan di dalam penelitian.

Nama Responden :
Nama Instansi/Perusahaan :
Jabatan :
Pengalaman Kerja (Tahun) : a. < 5; b. 5 - 10; c. 10 - 15; d. >20 (lingkari jawaban)
Nomor Kontak :

*** : (BERSIFAT RAHASIA TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN)**

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab dengan mengisi pilihan jawaban pada kolom yang tersedia pada tabel survei penelitian.
2. Mengisi pilihan jawaban dengan cara **Mencentang** (✓) atau memberikan **Nilai Angka** pada tempat pilihan jawaban.
3. Pilihan jawaban yang dipilih akan mengindikasikan persepsi responden tentang tingkat persetujuan, frekuensi/, dan dampak dari topik kuesioner.

Keterangan skala pengukuran tingkat persetujuan untuk indikator penelitian

Mengukur Tingkat Persetujuan yang Merupakan Bentuk Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi	Nilai
Sangat Tidak Setuju “Merupakan Pelanggaran Etika”	1
Tidak Setuju “Merupakan Pelanggaran Etika”	2
Cukup Setuju “Merupakan Pelanggaran Etika”	3
Setuju “Merupakan Pelanggaran Etika”	4
Sangat Setuju “Merupakan Pelanggaran Etika”	5

Keterangan skala pengukuran tingkat frekuensi dan dampak untuk indikator penelitian

Nilai Angka	Tingkat Frekuensi	Dampak Terhadap Bisnis Proyek Konstruksi
1	Sangat Jarang (sekali dalam ≥ 5 tahun)	Sangat Tidak Berdampak
2	Jarang (sekali dalam 3-4 tahun)	Tidak Berdampak
3	Cukup Sering (sekali dalam 1-2 tahun)	Cukup Berdampak
4	Sering (dikurang dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	Berdampak
5	Sangat Sering (dilebih dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	Sangat Berdampak

Kontak Peneliti

Nama : Hansen Thomas Yarisetouw
HP : 0813 4033 1240
Email : wibyth@yahoo.com
Mahasiswa Program Pasca Sarjana Manajemen Teknologi
Bidang Keahlian Manajemen Proyek
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya

Terima kasih atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden pada penelitian ini. Penulis berharap Bapak/Ibu tidak berkeberatan untuk dihubungi kembali, apabila ada survei lanjutan.

KUESIONER PENELITIAN TESIS

VARIABEL PENELITIAN Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi	Berilah tingkat persetujuan Anda terhadap variabel penelitian di bawah ini, dengan cara mencentang!					Seberapa sering praktek di bawah ini diyakini terjadi? Berilah penilaian Anda, dengan mencentang!					Praktek yang tersebut di bawah ini akan berdampak pada? Beri penilaian Anda, Jawablah dengan skala angka: 1 / 2 / 3 / 4 / 5		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Biaya	Mutu	Organisasi
1. Variabel Penipuan													
X1. Mengakali Material													
X2. Mengakali Volume Material													
X3. Mengakali Dokumen													
X4. Mengakali Biaya													
2. Variabel Ketidakadilan													
X5. Tidak Adil dalam Tender													
X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak													
X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi)													
X8. Perselisihan Kepentingan													
X9. Tidak Adil dalam Informasi													

VARIABEL PENELITIAN Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi	Berilah tingkat persetujuan Anda terhadap variabel penelitian di bawah ini, dengan cara mencentang!					Seberapa sering praktek di bawah ini diyakini terjadi? Berilah penilaian Anda, dengan mencentang!					Praktek yang tersebut di bawah ini akan berdampak pada? Beri penilaian Anda, Jawablah dengan skala angka: 1 / 2 / 3 / 4 / 5		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Biaya	Mutu	Organisasi
3. Variabel Penyuapan													
X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai													
X11. Menyogok dalam Bentuk Benda Berharga													
X12. Menyogok dalam Bentuk Biaya Perjalanan													
4. Variabel Manipulasi													
X13. Manipulasi Pembayaran													
X14. Manipulasi Informasi Proyek													
X15. Manipulasi Pengawasan Proyek													
X16. Manipulasi Praktek Keselamatan Kerja di Proyek													
X17. Manipulasi Pendokumentasian Proyek													

Lampiran 2 Bentuk Pedoman Wawancara Penyebab dan Cara Minimalisasi Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Pemerintah di Daerah (X)

Lampiran 2.1 Pertanyaan Wawancara Penyebab Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi

B. Menurut Bapak/Ibu apakah yang mendorong sebabnya terjadi praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di Daerah (X)?	
Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang dianggap tepat sebagai penyebab praktek pelanggaran etika proyek konstruksi pemerintah!	Jawaban Responden
Kompetisi tidak sehat di pengadaan proyek konstruksi.	
Budaya di sektor pengadaan proyek konstruksi.	
Arahan (“negatif”) dari pemegang otoritas (pimpinan organisasi).	
Tidak cukup pendidikan dan pelatihan etika profesional pengadaan proyek konstruksi dalam mengatasi permintaan yang ilegal.	
Pengaruh krisis ekonomi ke sektor pengadaan proyek konstruksi.	
Kelemahan dari aspek legislasi/peraturan perundang-undangan di sektor pengadaan proyek konstruksi.	
Pendidikan etika profesi di bidang pengadaan proyek konstruksi tidak cukup dari lembaga profesional.	
Pendidikan etika profesional bagi lulusan teknik tidak cukup di sekolah.	
Jika ada jawaban yang berbeda:	
<p>.....</p> <p>.....</p>	
Kami mengharapkan Bapak/Ibu memberikan tanggapan terkait jawaban yang diberikan:	
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

Lampiran 2.2 Pertanyaan Wawancara Cara Meminimalkan Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi

C. Menurut Bapak/Ibu apakah cara-cara yang dapat meminimalkan praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di Daerah (X)?	
Pernyataan-pernyataan di bawah ini, yang dianggap tepat sebagai cara untuk mengurangi praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi!	Jawaban Responden
Memberdayakan program pendidikan, dan pelatihan etika profesional oleh lembaga profesi jasa konstruksi.	
Melakukan penelitian dan pengembangan pendidikan etika profesional untuk secara efektif menangani masalah etika di sektor proyek konstruksi publik dan swasta.	
Menegaskan regulasi dan penegakan hukum oleh pemerintah di sektor pengadaan proyek konstruksi.	
Mewajibkan bagi lulusan teknik muda untuk memiliki pemahaman pada hal-hal profesional, termasuk aspek etika pengadaan proyek konstruksi.	
Memanfaatkan peran media asosiasi bidang konstruksi dalam mempromosikan sebuah bentuk profesi masyarakat konstruksi yang etis.	
Menerapkan sebuah bentuk kode etik dalam pengadaan proyek konstruksi pemerintah.	
Mengenalkan prinsip-prinsip “pakta integritas” sebagai alat untuk mewujudkan penawaran yang legal.	
Membuat perilaku tidak etis dalam pengadaan barang/jasa proyek konstruksi sebagai aktivitas kriminal.	
Menegaskan kerja tim kualitas di proyek konstruksi untuk memastikan kualitas bersama dengan praktek etika.	
Menegaskan dan mewujudkan kemauan dan komitmen badan legislatif untuk menegakkan lingkungan profesional di sektor pengadaan proyek konstruksi.	
Jika ada jawaban yang berbeda:	
.....	
Kami mengharapkan sedapat mungkin Bapak/Ibu memberikan tanggapan terkait pilihan jawaban di atas:	
.....	

Terima kasih atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu telah menjawab pertanyaan penelitian ini. Penulis berharap Bapak/Ibu tidak berkeberatan untuk dihubungi kembali, apabila ada survei lanjutan.

Lampiran 3 Daftar Kontraktor Berdasarkan Masa SIUJK Aktif di Daerah (X), Dalam Kurun Waktu Tiga Tahun Terakhir.

Jumlah Perusahaan Jasa Kontraktor per Gred Perusahaan	Gred Perusahaan
7 Perusahaan	Gred 6
19 Perusahaan	Gred 5

Sumber: Seksi Perijinan DPU Daerah (X), Agustus 2014

Lampiran 4 Daftar PPK Proyek Konstruksi di Daerah (X) Tahun 2014.

PPK Berdasarkan Jenis Proyek Konstruksi	Jumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
PPK Bangunan Gedung	4 PPK
PPK Jalan dan Jembatan	2 PPK
PPK Bangunan Irigasi	1 PPK

Sumber: Seksi Perijinan DPU Daerah (X), Agustus 2014



Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran 5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Persetujuan

Uji Validitas untuk variabel-variabel tingkat persetujuan mengenai pelanggaran etika dalam proyek:

1. Variabel Penipuan

Correlations						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.851**	.604**	0.218	.788**
	Sig. (2-tailed)		0	0	0.23	0
	N	32	32	32	32	32
X1.2	Pearson Correlation	.851**	1	.514**	0.062	.693**
	Sig. (2-tailed)	0		0.003	0.736	0
	N	32	32	32	32	32
X1.3	Pearson Correlation	.604**	.514**	1	.762**	.942**
	Sig. (2-tailed)	0	0.003		0	0
	N	32	32	32	32	32
X1.4	Pearson Correlation	0.218	0.062	.762**	1	.722**
	Sig. (2-tailed)	0.23	0.736	0		0
	N	32	32	32	32	32
X1	Pearson Correlation	.788**	.693**	.942**	.722**	1
	Sig. (2-tailed)	0	0	0	0	
	N	32	32	32	32	32

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Variabel Ketidakadilan

Correlations

	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2
X2.5						
Pearson Correlation	1	.394*	0.303	.486**	0.143	.648**
Sig. (2-tailed)		0.026	0.092	0.005	0.435	0
N	32	32	32	32	32	32
X2.6						
Pearson Correlation	.394*	1	0.234	0.342	0.131	.633**
Sig. (2-tailed)	0.026		0.198	0.056	0.474	0
N	32	32	32	32	32	32
X2.7						
Pearson Correlation	0.303	0.234	1	.714**	0.101	.679**
Sig. (2-tailed)	0.092	0.198		0	0.583	0
N	32	32	32	32	32	32
X2.8						
Pearson Correlation	.486**	0.342	.714**	1	0.314	.838**
Sig. (2-tailed)	0.005	0.056	0		0.08	0
N	32	32	32	32	32	32
X2.9						
Pearson Correlation	0.143	0.131	0.101	0.314	1	.557**
Sig. (2-tailed)	0.435	0.474	0.583	0.08		0.001
N	32	32	32	32	32	32
X2						
Pearson Correlation	.648**	.633**	.679**	.838**	.557**	1
Sig. (2-tailed)	0	0	0	0	0.001	
N	32	32	32	32	32	32

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Variabel Penyuaapan

Correlations

		X3.10	X3.11	X3.12	X3
X3.10	Pearson Correlation	1	1.000**	.782**	.974**
	Sig. (2-tailed)		0	0	0
	N	32	32	32	32
X3.11	Pearson Correlation	1.000**	1	.782**	.974**
	Sig. (2-tailed)	0		0	0
	N	32	32	32	32
X3.12	Pearson Correlation	.782**	.782**	1	.902**
	Sig. (2-tailed)	0	0		0
	N	32	32	32	32
X3	Pearson Correlation	.974**	.974**	.902**	1
	Sig. (2-tailed)	0	0	0	
	N	32	32	32	32

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Variabel Manipulasi

Correlations

		X4.13	X4.14	X4.15	X4.16	X4.17	X4
X4.13	Pearson Correlation	1	0.179	.590**	.455**	0.277	.714**
	Sig. (2-tailed)		0.327	0	0.009	0.124	0
	N	32	32	32	32	32	32
X4.14	Pearson Correlation	0.179	1	0.014	0.311	0.266	.543**
	Sig. (2-tailed)	0.327		0.941	0.083	0.141	0.001
	N	32	32	32	32	32	32

4. Variabel Manipulasi

Correlations

	X4.13	X4.14	X4.15	X4.16	X4.17	X4
X4.15						
Pearson Correlation	.590**	0.014	1	0.305	.441*	.688**
Sig. (2-tailed)	0	0.941		0.09	0.011	0
N	32	32	32	32	32	32
X4.16						
Pearson Correlation	.455**	0.311	0.305	1	.547**	.740**
Sig. (2-tailed)	0.009	0.083	0.09		0.001	0
N	32	32	32	32	32	32
X4.17						
Pearson Correlation	0.277	0.266	.441*	.547**	1	.741**
Sig. (2-tailed)	0.124	0.141	0.011	0.001		0
N	32	32	32	32	32	32
X4						
Pearson Correlation	.714**	.543**	.688**	.740**	.741**	1
Sig. (2-tailed)	0	0.001	0	0	0	
N	32	32	32	32	32	32

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas untuk variabel-variabel tingkat persetujuan mengenai pelanggaran Etika dalam Proyek.

Case Processing Summary

	N	%
Cases		
Valid	32	100
Excluded ^a	0	0
Total	32	100

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.887	17

Lampiran 6 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Penilaian Frekuensi

Uji Validitas untuk variabel-variabel tingkat frekuensi praktek pelanggaran etika dalam proyek:

1. Variabel Penipuan

Correlations						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.399*	0.05	0.064	.523**
	Sig. (2-tailed)		0.024	0.786	0.726	0.002
	N	32	32	32	32	32
X1.2	Pearson Correlation	.399*	1	0.264	.456**	.749**
	Sig. (2-tailed)	0.024		0.144	0.009	0
	N	32	32	32	32	32
X1.3	Pearson Correlation	0.05	0.264	1	.677**	.700**
	Sig. (2-tailed)	0.786	0.144		0	0
	N	32	32	32	32	32
X1.4	Pearson Correlation	0.064	.456**	.677**	1	.819**
	Sig. (2-tailed)	0.726	0.009	0		0
	N	32	32	32	32	32
X1	Pearson Correlation	.523**	.749**	.700**	.819**	1
	Sig. (2-tailed)	0.002	0	0	0	
	N	32	32	32	32	32

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Variabel Ketidakadilan

Correlations

	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2
X2.5						
Pearson Correlation	1	.754**	.770**	.437*	.701**	.865**
Sig. (2-tailed)		0	0	0.012	0	0
N	32	32	32	32	32	32
X2.6						
Pearson Correlation	.754**	1	.592**	.700**	.887**	.928**
Sig. (2-tailed)	0		0	0	0	0
N	32	32	32	32	32	32
X2.7						
Pearson Correlation	.770**	.592**	1	.411*	.496**	.775**
Sig. (2-tailed)	0	0		0.019	0.004	0
N	32	32	32	32	32	32
X2.8						
Pearson Correlation	.437*	.700**	.411*	1	.673**	.769**
Sig. (2-tailed)	0.012	0	0.019		0	0
N	32	32	32	32	32	32
X2.9						
Pearson Correlation	.701**	.887**	.496**	.673**	1	.886**
Sig. (2-tailed)	0	0	0.004	0		0
N	32	32	32	32	32	32
X2						
Pearson Correlation	.865**	.928**	.775**	.769**	.886**	1
Sig. (2-tailed)	0	0	0	0	0	
N	32	32	32	32	32	32

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Variabel Penyuaapan

Correlations

		X3.10	X3.11	X3.12	X3
X3.10	Pearson Correlation	1	.608**	.358*	.877**
	Sig. (2-tailed)		0	0.044	0
	N	32	32	32	32
X3.11	Pearson Correlation	.608**	1	0.318	.813**
	Sig. (2-tailed)	0		0.076	0
	N	32	32	32	32
X3.12	Pearson Correlation	.358*	0.318	1	.661**
	Sig. (2-tailed)	0.044	0.076		0
	N	32	32	32	32
X3	Pearson Correlation	.877**	.813**	.661**	1
	Sig. (2-tailed)	0	0	0	
	N	32	32	32	32

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4. Variabel Manipulasi

Correlations

		X4.13	X4.14	X4.15	X4.16	X4.17	X4
X4.13	Pearson Correlation	1	.588**	.489**	0.338	.549**	.848**
	Sig. (2-tailed)		0	0.004	0.058	0.001	0
	N	32	32	32	32	32	32
X4.14	Pearson Correlation	.588**	1	.377*	0.293	.364*	.720**
	Sig. (2-tailed)	0		0.033	0.103	0.041	0
	N	32	32	32	32	32	32

4. Variabel Manipulasi

Correlations						
	X4.13	X4.14	X4.15	X4.16	X4.17	X4
X4.15	Pearson Correlation	.489**	.377*	1	0.165	.630**
	Sig. (2-tailed)	0.004	0.033		0.366	0
	N	32	32	32	32	32
X4.16	Pearson Correlation	0.338	0.293	0.165	1	.394*
	Sig. (2-tailed)	0.058	0.103	0.366		0.026
	N	32	32	32	32	32
X4.17	Pearson Correlation	.549**	.364*	.630**	.394*	1
	Sig. (2-tailed)	0.001	0.041	0	0.026	
	N	32	32	32	32	32
X4	Pearson Correlation	.848**	.720**	.733**	.555**	.791**
	Sig. (2-tailed)	0	0	0	0.001	
	N	32	32	32	32	32

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas untuk variabel-variabel tingkat frekuensi praktek pelanggaran etika dalam proyek:

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	32	100
	Excluded ^a	0	0
	Total	32	100

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.898	17

Lampiran 7 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Penilaian Dampak

Uji Validitas untuk variabel-variabel dampak dari pelanggaran etika dalam proyek:

1. Variabel Penipuan

		Correlations				
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.491**	.380*	0.169	.757**
	Sig. (2-tailed)		0.004	0.032	0.356	0
	N	32	32	32	32	32
X1.2	Pearson Correlation	.491**	1	0.155	.407*	.698**
	Sig. (2-tailed)	0.004		0.397	0.021	0
	N	32	32	32	32	32
X1.3	Pearson Correlation	.380*	0.155	1	0.233	.675**
	Sig. (2-tailed)	0.032	0.397		0.199	0
	N	32	32	32	32	32
X1.4	Pearson Correlation	0.169	.407*	0.233	1	.632**
	Sig. (2-tailed)	0.356	0.021	0.199		0
	N	32	32	32	32	32
X1	Pearson Correlation	.757**	.698**	.675**	.632**	1
	Sig. (2-tailed)	0	0	0	0	
	N	32	32	32	32	32

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Variabel Ketidakadilan

Correlations

	x2.5	x2.6	x2.7	x2.8	x2.9	X2
Pearson Correlation	1	.520**	.452**	.363*	.373*	.623**
Sig. (2-tailed)		0.002	0.009	0.041	0.035	0
N	32	32	32	32	32	32
Pearson Correlation	.520**	1	.647**	.391*	.704**	.776**
Sig. (2-tailed)	0.002		0	0.027	0	0
N	32	32	32	32	32	32
Pearson Correlation	.452**	.647**	1	0.344	.626**	.770**
Sig. (2-tailed)	0.009	0		0.054	0	0
N	32	32	32	32	32	32
Pearson Correlation	.363*	.391*	0.344	1	0.139	.579**
Sig. (2-tailed)	0.041	0.027	0.054		0.448	0.001
N	32	32	32	32	32	32
Pearson Correlation	.373*	.704**	.626**	0.139	1	.824**
Sig. (2-tailed)	0.035	0	0	0.448		0
N	32	32	32	32	32	32
Pearson Correlation	.623**	.776**	.770**	.579**	.824**	1
Sig. (2-tailed)	0	0	0	0.001	0	
N	32	32	32	32	32	32

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Variabel Penyuaapan

Correlations

		X3.10	x3.11	x3.12	x3
X3.10	Pearson Correlation	1	.730**	.763**	.893**
	Sig. (2-tailed)		0	0	0
	N	32	32	32	32
x3.11	Pearson Correlation	.730**	1	.764**	.900**
	Sig. (2-tailed)	0		0	0
	N	32	32	32	32
x3.12	Pearson Correlation	.763**	.764**	1	.887**
	Sig. (2-tailed)	0	0		0
	N	32	32	32	32
x3	Pearson Correlation	.893**	.900**	.887**	1
	Sig. (2-tailed)	0	0	0	
	N	32	32	32	32

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Variabel Manipulasi

Correlations

		x4.13	x4.14	x4.15	x4.16	x4.17	x4
x4.13	Pearson Correlation	1	.792**	0.304	.469**	.414*	.798**
	Sig. (2-tailed)		0	0.09	0.007	0.018	0
	N	32	32	32	32	32	32
x4.14	Pearson Correlation	.792**	1	0.339	.700**	.418*	.864**
	Sig. (2-tailed)	0		0.058	0	0.017	0
	N	32	32	32	32	32	32

4. Variabel Manipulasi

Correlations

	x4.13	x4.14	x4.15	x4.16	x4.17	x4
x4.15 Pearson Correlation	0.304	0.339	1	0.324	.481**	.665**
Sig. (2-tailed)	0.09	0.058		0.071	0.005	0
N	32	32	32	32	32	32
x4.16 Pearson Correlation	.469**	.700**	0.324	1	.365*	.749**
Sig. (2-tailed)	0.007	0	0.071		0.04	0
N	32	32	32	32	32	32
x4.17 Pearson Correlation	.414*	.418*	.481**	.365*	1	.691**
Sig. (2-tailed)	0.018	0.017	0.005	0.04		0
N	32	32	32	32	32	32
x4 Pearson Correlation	.798**	.864**	.665**	.749**	.691**	1
Sig. (2-tailed)	0	0	0	0	0	
N	32	32	32	32	32	32

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas untuk variabel-variabel dampak dari pelanggaran etika dalam proyek:

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	32	100
Excluded ^a	0	0
Total	32	100

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.889	17

Lampiran 8 Deskriptif Tingkat Persetujuan

Deskripsi penilaian tingkat persetujuan mengenai pelanggaran etika dalam proyek:

Descriptive Statistics Responden Kontraktor

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1. Mengakali Material	25	4	5	4.88	0.332
X2. Mengakali Volume Material	25	4	5	4.92	0.277
X3. Mengakali Dokumen	25	4	5	4.76	0.436
X4. Mengakali Biaya	25	4	5	4.8	0.408
X5. Tidak Adil dalam Tender	25	4	5	4.92	0.277
X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak	25	4	5	4.72	0.458
X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi)	25	4	5	4.92	0.277
X8. Perselisihan Kepentingan	25	4	5	4.88	0.332
X9. Tidak Adil dalam Informasi	25	4	5	4.48	0.51
X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai	25	4	5	4.88	0.332
X11. Menyogok dalam Bentuk Benda Berharga	25	4	5	4.88	0.332
X12. Menyogok dalam Bentuk Biaya Perjalanan	25	4	5	4.8	0.408
X13. Manipulasi Pembayaran	25	4	5	4.84	0.374
X14. Manipulasi Informasi Proyek	25	4	5	4.36	0.49
X15. Manipulasi Pengawasan Proyek	25	4	5	4.72	0.458
X16. Manipulasi Keselamatan Kerja di Proyek	25	4	5	4.92	0.277
X17. Manipulasi Pendokumentasian Proyek	25	4	5	4.84	0.374
Valid N (listwise)	25				

Descriptive Statistics Responden PPK

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1. Mengakali Material	7	4	5	4.86	0.378
X2. Mengakali Volume Material	7	4	5	4.86	0.378
X3. Mengakali Dokumen	7	4	5	4.57	0.535
X4. Mengakali Biaya	7	4	5	4.57	0.535
X5. Tidak Adil dalam Tender	7	4	5	4.71	0.488
X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak	7	4	5	4.71	0.488
X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi)	7	4	5	4.43	0.535
X8. Perselisihan Kepentingan	7	4	5	4.43	0.535
X9. Tidak Adil dalam Informasi	7	4	5	4.29	0.488
X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai	7	3	5	4.14	0.69
X11. Menyogok dalam Bentuk Benda Berharga	7	3	5	4.14	0.69

Descriptive Statistics Responden PPK

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X12. Menyogok dalam Bentuk Biaya Perjalanan	7	3	5	4.14	0.69
X13. Manipulasi Pembayaran	7	4	5	4.71	0.488
X14. Manipulasi Informasi Proyek	7	4	5	4.29	0.488
X15. Manipulasi Pengawasan Proyek	7	4	5	4.71	0.488
X16. Manipulasi Keselamatan Kerja di Proyek	7	4	5	4.57	0.535
X17. Manipulasi Pendokumentasian Proyek	7	4	5	4.43	0.535
Valid N (listwise)	7				

Lampiran 9 Deskriptif Penilaian Frekuensi

Deskripsi penilaian tingkat frekuensi terjadinya pelanggaran etika dalam proyek:

Descriptive Statistics Responden Kontraktor

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1. Mengakali Material	25	1	5	3.92	1.382
X2. Mengakali Volume Material	25	1	5	3.56	1.261
X3. Mengakali Dokumen	25	1	4	2.92	0.909
X4. Mengakali Biaya	25	1	5	2.44	1.583
X5. Tidak Adil dalam Tender	25	1	5	2.52	1.418
X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak	25	1	5	2.08	1.222
X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi)	25	1	5	2.56	1.417
X8. Perselisihan Kepentingan	25	1	5	2.36	1.497
X9. Tidak Adil dalam Informasi	25	1	5	2.48	1.327
X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai	25	1	5	2.2	1.384
X11. Menyogok dalam Bentuk Benda Berharga	25	1	4	1.56	1.044
X12. Menyogok dalam Bentuk Biaya Perjalanan	25	1	4	3.2	1
X13. Manipulasi Pembayaran	25	1	5	3.36	1.68
X14. Manipulasi Informasi Proyek	25	1	4	2.48	1.194
X15. Manipulasi Pengawasan Proyek	25	1	5	3.84	1.281
X16. Manipulasi Keselamatan Kerja di Proyek	25	1	4	2.52	0.963
X17. Manipulasi Pendokumentasian Proyek	25	1	5	3.56	1.158
Valid N (listwise)	25				

Descriptive Statistics Responden PPK

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1. Mengakali Material	7	4	5	4.29	0.488
X2. Mengakali Volume Material	7	4	5	4.29	0.488
X3. Mengakali Dokumen	7	3	5	4.29	0.756
X4. Mengakali Biaya	7	4	5	4.29	0.488
X5. Tidak Adil dalam Tender	7	3	4	3.43	0.535
X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak	7	3	4	3.43	0.535
X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi)	7	3	4	3.43	0.535
X8. Perselisihan Kepentingan	7	3	4	3.43	0.535
X9. Tidak Adil dalam Informasi	7	3	4	3.43	0.535
X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai	7	3	4	3.43	0.535
X11. Menyogok dalam Bentuk Benda Berharga	7	2	3	2.43	0.535
X12. Menyogok dalam Bentuk Biaya Perjalanan	7	3	4	3.57	0.535
X13. Manipulasi Pembayaran	7	3	4	3.43	0.535
X14. Manipulasi Informasi Proyek	7	2	3	2.43	0.535
X15. Manipulasi Pengawasan Proyek	7	3	4	3.86	0.378
X16. Manipulasi Keselamatan Kerja di Proyek	7	1	3	2.29	0.756
X17. Manipulasi Pendokumentasian Proyek	7	3	4	3.86	0.378
Valid N (listwise)	7				

Lampiran 10 Deskriptif Penilaian Dampak

Descriptive Statistics Dampak Pelanggaran Etika (Responden Kontraktor)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1. Mengakali Material	25	1	5	4.16	1.179
X2. Mengakali Volume Material	25	2	5	4.36	0.86
X3. Mengakali Dokumen	25	2	5	4.2	1.19
X4. Mengakali Biaya	25	3	5	4.4	0.866
X5. Tidak Adil dalam Tender	25	2	5	4.24	0.97
X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak	25	2	5	4.52	0.872
X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi)	25	2	5	4.24	1.165
X8. Perselisihan Kepentingan	25	1	5	3.92	1.47
X9. Tidak Adil dalam Informasi	25	2	5	4.16	1.028
X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai	25	1	5	3.84	1.313
X11. Menyogok dalam bentuk barang berharga	25	1	5	3.56	1.193
X12. Menyogok dalam bentuk biaya perjalanan	25	2	5	4.16	1.143
X13. Memanipulasi Pembayaran	25	2	5	4.04	1.338
X14. Memanipulasi Informasi Proyek	25	2	5	4.16	1.281
X15. Memanipulasi Pengawasan Proyek	25	2	5	3.8	1.384
X16. Memanipulasi Keselamatan Kerja di Proyek	25	2	5	4.24	1.165
X17. Memanipulasi Pendokumentasian Proyek	25	2	5	4.44	1.083
Valid N (listwise)	25				

Descriptive Statistics Dampak Pelanggaran Etika (Responden PPK)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1. Mengakali Material	7	4	5	4.86	0.378
X2. Mengakali Volume Material	7	4	5	4.86	0.378
X3. Mengakali Dokumen	7	3	4	3.86	0.378
X4. Mengakali Biaya	7	2	4	3.29	0.756
X5. Tidak Adil dalam Tender	7	3	5	4.14	0.9
X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak	7	3	4	3.43	0.535
X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi)	7	3	4	3.57	0.535
X8. Perselisihan Kepentingan	7	4	5	4.71	0.488
X9. Tidak Adil dalam Informasi	7	2	3	2.71	0.488
X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai	7	4	5	4.71	0.488
X11. Menyogok dalam bentuk barang berharga	7	3	5	4	0.816
X12. Menyogok dalam bentuk biaya perjalanan	7	4	5	4.71	0.488

Descriptive Statistics Dampak Pelanggaran Etika (Responden PPK)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X13. Manipulasi Pembayaran	7	3	5	4.29	0.756
X14. Manipulasi Informasi Proyek	7	3	5	4.29	0.756
X15. Manipulasi Pengawasan Proyek	7	4	5	4.71	0.488
X16. Manipulasi Keselamatan Kerja di Proyek	7	3	5	4.29	0.756
X17. Manipulasi Pendokumentasian Proyek	7	4	5	4.71	0.488
Valid N (listwise)	7				

Lampiran 11 Deskriptif Tabulasi Pengukuran Tingkat Persetujuan

Deskripsi tabulasi dari variabel-variabel tingkat persetujuan mengenai pelanggaran etika dalam proyek ditinjau dari persepsi kontraktor dan PPK.

X1. Mengakali Material * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X1. Mengakali Material	Setuju	Count	3	1	4
		% within Jenis Responden	12.00%	14.30%	12.50%
	Sangat setuju	Count	22	6	28
		% within Jenis Responden	88.00%	85.70%	87.50%
Total	Count		25	7	32
	% within Jenis Responden		100.00%	100.00%	100.00%

X2. Mengakali Volume Material * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X2. Mengakali Volume Material	Setuju	Count	2	1	3
		% within Jenis Responden	8.00%	14.30%	9.40%
	Sangat setuju	Count	23	6	29
		% within Jenis Responden	92.00%	85.70%	90.60%
Total	Count		25	7	32
	% within Jenis Responden		100.00%	100.00%	100.00%

X3. Mengakali Dokumen * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X3. Mengakali Dokumen	Setuju	Count	6	3	9
		% within Jenis Responden	24.00%	42.90%	28.10%
	Sangat setuju	Count	19	4	23
		% within Jenis Responden	76.00%	57.10%	71.90%
Total		Count	25	7	32
		% within Jenis Responden	100.00%	100.00%	100.00%

X4. Mengakali Biaya * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X4. Mengakali Biaya	Setuju	Count	5	3	8
		% within Jenis Responden	20.00%	42.90%	25.00%
	Sangat setuju	Count	20	4	24
		% within Jenis Responden	80.00%	57.10%	75.00%
Total		Count	25	7	32
		% within Jenis Responden	100.00%	100.00%	100.00%

X5. Tidak Adil dalam Tender * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X5. Tidak Adil dalam Tender	Setuju	Count	2	2	4
		% within Jenis Responden	8.00%	28.60%	12.50%
	Sangat setuju	Count	23	5	28
		% within Jenis Responden	92.00%	71.40%	87.50%
Total	Count		25	7	32
	% within Jenis Responden		100.00%	100.00%	100.00%

X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak	Setuju	Count	7	2	9
		% within Jenis Responden	28.00%	28.60%	28.10%
	Sangat setuju	Count	18	5	23
		% within Jenis Responden	72.00%	71.40%	71.90%
Total	Count		25	7	32
	% within Jenis Responden		100.00%	100.00%	100.00%

X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi) * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi)	Setuju	Count	2	4	6
		% within Jenis Responden	8.00%	57.10%	18.80%
	Sangat setuju	Count	23	3	26
		% within Jenis Responden	92.00%	42.90%	81.20%
Total	Count		25	7	32
	% within Jenis Responden		100.00%	100.00%	100.00%

X8. Perselisihan Kepentingan * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X8. Perselisihan Kepentingan	Setuju	Count	3	4	7
		% within Jenis Responden	12.00%	57.10%	21.90%
	Sangat setuju	Count	22	3	25
		% within Jenis Responden	88.00%	42.90%	78.10%
Total	Count		25	7	32
	% within Jenis Responden		100.00%	100.00%	100.00%

X9. Tidak Adil dalam Informasi * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X9. Tidak Adil dalam Informasi	Setuju	Count	13	5	18
		% within Jenis Responden	52.00%	71.40%	56.20%
	Sangat setuju	Count	12	2	14
		% within Jenis Responden	48.00%	28.60%	43.80%
Total	Count		25	7	32
	% within Jenis Responden		100.00%	100.00%	100.00%

X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai	Cukup setuju	Count	0	1	1
		% within Jenis Responden	0.00%	14.30%	3.10%
	Setuju	Count	3	4	7
		% within Jenis Responden	12.00%	57.10%	21.90%
	Sangat setuju	Count	22	2	24
		% within Jenis Responden	88.00%	28.60%	75.00%
Total	Count		25	7	32
	% within Jenis Responden		100.00%	100.00%	100.00%

X11. Menyogok dalam Bentuk Benda Berharga * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X11. Menyogok dalam Bentuk Benda Berharga	Cukup setuju	Count	0	1	1
		% within Jenis Responden	0.00%	14.30%	3.10%
	Setuju	Count	3	4	7

X11. Menyogok dalam Bentuk Benda Berharga * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
	Sangat setuju	% within Jenis Responden	12.00%	57.10%	21.90%
		Count	22	2	24
		% within Jenis Responden	88.00%	28.60%	75.00%
	Total	Count	25	7	32
% within Jenis Responden		100.00%	100.00%	100.00%	

X12. Menyogok dalam Bentuk Biaya Perjalanan * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X12. Menyogok dalam Bentuk Biaya Perjalanan	Cukup setuju	Count	0	1	1
		% within Jenis Responden	0.00%	14.30%	3.10%
	Setuju	Count	5	4	9
		% within Jenis Responden	20.00%	57.10%	28.10%
	Sangat setuju	Count	20	2	22
		% within Jenis Responden	80.00%	28.60%	68.80%
	Total		25	7	32
			100.00%	100.00%	100.00%

X13. Manipulasi Pembayaran * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X13. Manipulasi Pembayaran	Setuju	Count	4	2	6
		% within Jenis Responden	16.00%	28.60%	18.80%
	Sangat setuju	Count	21	5	26
		% within Jenis Responden	84.00%	71.40%	81.20%
Total		Count	25	7	32
		% within Jenis Responden	100.00%	100.00%	100.00%

X14. Manipulasi Informasi Proyek * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X14. Manipulasi Informasi Proyek	Setuju	Count	16	5	21
		% within Jenis Responden	64.00%	71.40%	65.60%
	Sangat setuju	Count	9	2	11
		% within Jenis Responden	36.00%	28.60%	34.40%
Total	Count		25	7	32
	% within Jenis Responden		100.00%	100.00%	100.00%

X15. Manipulasi Pengawasan Proyek * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X15. Manipulasi Pengawasan Proyek	Setuju	Count	7	2	9
		% within Jenis Responden	28.00%	28.60%	28.10%
	Sangat setuju	Count	18	5	23
		% within Jenis Responden	72.00%	71.40%	71.90%
Total	Count		25	7	32
	% within Jenis Responden		100.00%	100.00%	100.00%

X16. Memanipulasi Keselamatan Kerja di Proyek * Jenis Responden Crosstabulation

				Jenis Responden		Total
				Kontraktor	PPK	
X16. Memanipulasi Keselamatan Kerja di Proyek	Count			2	3	5
	Setuju	% within Jenis Responden		8.00%	42.90%	15.60%
	Count			23	4	27
	Sangat setuju	% within Jenis Responden		92.00%	57.10%	84.40%
Total	Count			25	7	32
	% within Jenis Responden			100.00%	100.00%	100.00%

X17. Memanipulasi Pendokumentasian Proyek * Jenis Responden Crosstabulation

				Jenis Responden		Total
				Kontraktor	PPK	
X17. Memanipulasi Pendokumentasian Proyek	Count			4	4	8
	Setuju	% within Jenis Responden		16.00%	57.10%	25.00%
	Count			21	3	24
	Sangat setuju	% within Jenis Responden		84.00%	42.90%	75.00%
Total	Count			25	7	32
	% within Jenis Responden			100.00%	100.00%	100.00%

Lampiran 12 Deskriptif Tabulasi Penilaian Frekuensi

Deskripsi tabulasi dari variabel-variabel tingkat frekuensi terjadinya pelanggaran etika dalam proyek ditinjau dari persepsi kontraktor dan PPK.

X1. Mengakali Material * Jenis Responden Crosstabulation

		Jenis Responden		Total
		Kontraktor	PPK	
X1. Mengakali Material	Count	3	0	3
	Sangat Jarang (sekali dalam lebih dari 5 tahun)	12.00%	0.00%	9.40%
	Count	1	0	1
	Jarang (sekali dalam 3-4 tahun)	4.00%	0.00%	3.10%
	Count	3	0	3
	Cukup Sering (sekali dalam 1-2 tahun)	12.00%	0.00%	9.40%
	Count	6	5	11
	Sering (kurang dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	24.00%	71.40%	34.40%
	Count	12	2	14
	Sangat Sering (dilebih dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	48.00%	28.60%	43.80%
Total		25	7	32
		100.00%	100.00%	100.00%

X2. Mengakali Volume Material * Jenis Responden Crosstabulation

		Jenis Responden		Total
		Kontraktor	PPK	
X2. Mengakali Volume Material	Count	2	0	2
	Sangat Jarang (sekali dalam lebih dari 5 tahun)	8.00%	0.00%	6.20%
	Count	3	0	3
	Jarang (sekali dalam 3-4 tahun)	12.00%	0.00%	9.40%
	Count	6	0	6
	Cukup Sering (sekali dalam 1-2 tahun)	24.00%	0.00%	18.80%
	Count	7	5	12
	Sering (kurang dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	28.00%	71.40%	37.50%
	Count	7	2	9
	Sangat Sering (dilebih dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	28.00%	28.60%	28.10%
Total	Count	25	7	32
	% within Jenis Responden	100.00%	100.00%	100.00%

X3. Mengakali Dokumen * Jenis Responden Crosstabulation

		Jenis Responden		Total
		Kontraktor	PPK	
X3. Mengakali Dokumen	Count	2	0	2
	Sangat Jarang (sekali dalam lebih dari 5 tahun)	8.00%	0.00%	6.20%
	Count	5	0	5

Jarang (sekali dalam 3-4 tahun)	% within Jenis Responden	20.00%	0.00%	15.60%
Count		11	1	12
Cukup Sering (sekali dalam 1-2 tahun)	% within Jenis Responden	44.00%	14.30%	37.50%
Count		7	3	10
Sering (kurang dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	% within Jenis Responden	28.00%	42.90%	31.20%
Count		0	3	3
Sangat Sering (dilebih dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	% within Jenis Responden	0.00%	42.90%	9.40%
Count		25	7	32
Total	% within Jenis Responden	100.00%	100.00%	100.00%

X4. Mengakali Biaya * Jenis Responden Crosstabulation

		Jenis Responden		Total
		Kontraktor	PPK	
X4. Mengakali Biaya	Sangat Jarang (sekali dalam lebih dari 5 tahun)	Count 11	0	11
	% within Jenis Responden	44.00%	0.00%	34.40%
	Jarang (sekali dalam 3-4 tahun)	Count 3	0	3
	% within Jenis Responden	12.00%	0.00%	9.40%
	Cukup Sering (sekali dalam 1-2 tahun)	Count 5	0	5
	% within Jenis Responden	20.00%	0.00%	15.60%
		Count 1	5	6

X4. Mengakali Biaya * Jenis Responden Crosstabulation

		Jenis Responden		Total
		Kontraktor	PPK	
Sering (kurang dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	% within Jenis Responden	4.00%	71.40%	18.80%
	Count	5	2	7
Sangat Sering (dilebih dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	% within Jenis Responden	20.00%	28.60%	21.90%
	Count	25	7	32
Total	% within Jenis Responden	100.00%	100.00%	100.00%

X5. Tidak Adil dalam Tender * Jenis Responden Crosstabulation

		Jenis Responden		Total	
		Kontraktor	PPK		
X5. Tidak Adil dalam Tender	Count	8	0	8	
	Sangat Jarang (sekali dalam lebih dari 5 tahun)	% within Jenis Responden	32.00%	0.00%	25.00%
	Count	5	0	5	
	Jarang (sekali dalam 3-4 tahun)	% within Jenis Responden	20.00%	0.00%	15.60%
	Count	7	4	11	
	Cukup Sering (sekali dalam 1-2 tahun)	% within Jenis Responden	28.00%	57.10%	34.40%
	Count	1	3	4	
	Sering (kurang dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	% within Jenis Responden	4.00%	42.90%	12.50%
	Count	4	0	4	

X5. Tidak Adil dalam Tender * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
	Sangat Sering (dilebih dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	% within Jenis Responden	16.00%	0.00%	12.50%
	Count		25	7	32
Total	% within Jenis Responden		100.00%	100.00%	100.00%

X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak	Sangat Jarang (sekali dalam lebih dari 5 tahun)	Count	11	0	11
		% within Jenis Responden	44.00%	0.00%	34.40%
	Jarang (sekali dalam 3-4 tahun)	Count	6	0	6
		% within Jenis Responden	24.00%	0.00%	18.80%
	Cukup Sering (sekali dalam 1-2 tahun)	Count	4	4	8
		% within Jenis Responden	16.00%	57.10%	25.00%
	Sering (kurang dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	Count	3	3	6
		% within Jenis Responden	12.00%	42.90%	18.80%
	Sangat Sering (dilebih dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	Count	1	0	1
		% within Jenis Responden	4.00%	0.00%	3.10%
Total	Count		25	7	32
	% within Jenis Responden		100.00%	100.00%	100.00%

X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi) * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi)	Sangat Jarang (sekali dalam lebih dari 5 tahun)	Count	9	0	9
		% within Jenis Responden	36.00%	0.00%	28.10%
	Count		2	0	2

X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi) * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
	Jarang (sekali dalam 3-4 tahun)	% within Jenis Responden	8.00%	0.00%	6.20%
	Cukup Sering (sekali dalam 1-2 tahun)	Count	8	4	12
		% within Jenis Responden	32.00%	57.10%	37.50%
	Sering (kurang dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	Count	3	3	6
		% within Jenis Responden	12.00%	42.90%	18.80%
	Sangat Sering (dilebih dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	Count	3	0	3
		% within Jenis Responden	12.00%	0.00%	9.40%
	Total	Count	25	7	32
		% within Jenis Responden	100.00%	100.00%	100.00%

X8. Perselisihan Kepentingan * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
	Sangat Jarang (sekali dalam lebih dari 5 tahun)	Count	10	0	10
		% within Jenis Responden	40.00%	0.00%	31.20%
	Jarang (sekali dalam 3-4 tahun)	Count	6	0	6
		% within Jenis Responden	24.00%	0.00%	18.80%
	Cukup Sering (sekali dalam 1-2 tahun)	Count	3	4	7
X8. Perselisihan Kepentingan		% within Jenis Responden	12.00%	57.10%	21.90%
	Sering (kurang dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	Count	2	3	5
		% within Jenis Responden	8.00%	42.90%	15.60%
	Sangat Sering (dilebih dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	Count	4	0	4
		% within Jenis Responden	16.00%	0.00%	12.50%
Total		Count	25	7	32
		% within Jenis Responden	100.00%	100.00%	100.00%

X9. Tidak Adil dalam Informasi * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X9. Tidak Adil dalam Informasi	Sangat Jarang (sekali dalam lebih dari 5 tahun)	Count % within Jenis Responden	7 28.00%	0 0.00%	7 21.90%
	Jarang (sekali dalam 3-4 tahun)	Count % within Jenis Responden	7 28.00%	0 0.00%	7 21.90%
	Cukup Sering (sekali dalam 1-2 tahun)	Count % within Jenis Responden	6 24.00%	4 57.10%	10 31.20%
	Sering (kurang dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	Count % within Jenis Responden	2 8.00%	3 42.90%	5 15.60%
	Sangat Sering (dilebih dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	Count % within Jenis Responden	3 12.00%	0 0.00%	3 9.40%
	Total	Count % within Jenis Responden	25 100.00%	7 100.00%	32 100.00%

X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai	Sangat Jarang (sekali dalam lebih dari 5 tahun)	Count % within Jenis Responden	10 40.00%	0 0.00%	10 31.20%
	Jarang (sekali dalam 3-4 tahun)	Count % within Jenis Responden	8 32.00%	0 0.00%	8 25.00%
	Cukup Sering (sekali dalam 1-2 tahun)	Count % within Jenis Responden	2 8.00%	4 57.10%	6 18.80%
	Sering (kurang dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	Count % within Jenis Responden	2 8.00%	3 42.90%	5 15.60%
	Sangat Sering (dilebih dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	Count % within Jenis Responden	3 12.00%	0 0.00%	3 9.40%
	Total	Count % within Jenis Responden	25 100.00%	7 100.00%	32 100.00%

X11. Menyogok dalam Bentuk Benda Berharga * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X11. Menyogok dalam Bentuk Benda Berharga	Sangat Jarang (sekali dalam lebih dari 5 tahun)	Count % within Jenis Responden	18 72.00%	0 0.00%	18 56.20%
	Jarang (sekali dalam 3-4 tahun)	Count % within Jenis Responden	3 12.00%	4 57.10%	7 21.90%
	Cukup Sering (sekali dalam 1-2 tahun)	Count % within Jenis Responden	1 4.00%	3 42.90%	4 12.50%
	Sering (kurang dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	Count % within Jenis Responden	3 12.00%	0 0.00%	3 9.40%
Total		Count % within Jenis Responden	25 100.00%	7 100.00%	32 100.00%

X12. Menyogok dalam Bentuk Biaya Perjalanan * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X12. Menyogok dalam Bentuk Biaya Perjalanan	Sangat Jarang (sekali dalam lebih dari 5 tahun)	Count % within Jenis Responden	2 8.00%	0 0.00%	2 6.20%
	Jarang (sekali dalam 3-4 tahun)	Count % within Jenis Responden	4 16.00%	0 0.00%	4 12.50%
	Cukup Sering (sekali dalam 1-2 tahun)	Count % within Jenis Responden	6 24.00%	3 42.90%	9 28.10%
	Sering (kurang dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	Count % within Jenis Responden	13 52.00%	4 57.10%	17 53.10%
Total		Count % within Jenis Responden	25 100.00%	7 100.00%	32 100.00%

X13. Manipulasi Pembayaran * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X13. Manipulasi Pembayaran	Sangat Jarang (sekali dalam lebih dari 5 tahun)	Count % within Jenis Responden	7 28.00%	0 0.00%	7 21.90%

X13. Manipulasi Pembayaran * Jenis Responden Crosstabulation

		Jenis Responden		Total
		Kontraktor	PPK	
Jarang (sekali dalam 3-4 tahun)	Count % within Jenis Responden	1 4.00%	0 0.00%	1 3.10%
Cukup Sering (sekali dalam 1-2 tahun)	Count % within Jenis Responden	2 8.00%	4 57.10%	6 18.80%
Sering (kurang dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	Count % within Jenis Responden	6 24.00%	3 42.90%	9 28.10%
Sangat Sering (dilebih dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	Count % within Jenis Responden	9 36.00%	0 0.00%	9 28.10%
Total	Count % within Jenis Responden	25 100.00%	7 100.00%	32 100.00%

X14. Manipulasi Informasi Proyek * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X14. Memanipulasi Informasi Proyek	Sangat Jarang (sekali dalam lebih dari 5 tahun)	Count % within Jenis Responden	7 28.00%	0 0.00%	7 21.90%
	Jarang (sekali dalam 3-4 tahun)	Count % within Jenis Responden	6 24.00%	4 57.10%	10 31.20%
	Cukup Sering (sekali dalam 1-2 tahun)	Count % within Jenis Responden	5 20.00%	3 42.90%	8 25.00%
	Sering (kurang dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	Count % within Jenis Responden	7 28.00%	0 0.00%	7 21.90%
Total		Count % within Jenis Responden	25 100.00%	7 100.00%	32 100.00%

X15. Memanipulasi Pengawasan Proyek * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X15. Memanipulasi Pengawasan Proyek	Sangat Jarang (sekali dalam lebih dari 5 tahun)	Count % within Jenis Responden	3 12.00%	0 0.00%	3 9.40%
	Cukup Sering (sekali dalam 1-2 tahun)	Count % within Jenis Responden	4 16.00%	1 14.30%	5 15.60%
	Sering (kurang dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	Count % within Jenis Responden	9 36.00%	6 85.70%	15 46.90%
	Sangat Sering (dilebih dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	Count % within Jenis Responden	9 36.00%	0 0.00%	9 28.10%
Total		Count % within Jenis Responden	25 100.00%	7 100.00%	32 100.00%

X16. Memanipulasi Keselamatan Kerja di Proyek * Jenis Responden Crosstabulation

			Jenis Responden		Total
			Kontraktor	PPK	
X16. Memanipulasi Keselamatan Kerja di Proyek	Sangat Jarang (sekali dalam lebih dari 5 tahun)	Count % within Jenis Responden	5 20.00%	1 14.30%	6 18.80%
	Jarang (sekali dalam 3-4 tahun)	Count % within Jenis Responden	5 20.00%	3 42.90%	8 25.00%
		Count	12	3	15

X16. Manipulasi Keselamatan Kerja di Proyek * Jenis Responden Crosstabulation

		Jenis Responden		Total
		Kontraktor	PPK	
Cukup Sering (sekali dalam 1-2 tahun)	% within Jenis Responden	48.00%	42.90%	46.90%
	Count	3	0	3
Sering (kurang dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	% within Jenis Responden	12.00%	0.00%	9.40%
	Count	25	7	32
Total	% within Jenis Responden	100.00%	100.00%	100.00%

X17. Manipulasi Pendokumentasian Proyek * Jenis Responden Crosstabulation

		Jenis Responden		Total
		Kontraktor	PPK	
Sangat Jarang (sekali dalam lebih dari 5 tahun)	Count	2	0	2
	% within Jenis Responden	8.00%	0.00%	6.20%
Jarang (sekali dalam 3-4 tahun)	Count	1	0	1
	% within Jenis Responden	4.00%	0.00%	3.10%
Cukup Sering (sekali dalam 1-2 tahun)	Count	9	1	10
	% within Jenis Responden	36.00%	14.30%	31.20%
Sering (kurang dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	Count	7	6	13
	% within Jenis Responden	28.00%	85.70%	40.60%
Count		6	0	6

X17. Manipulasi Pendokumentasian Proyek * Jenis Responden Crosstabulation

		Jenis Responden		Total
		Kontraktor	PPK	
Sangat Sering (dilebih dari separuh jumlah proyek dalam 1 tahun anggaran)	% within Jenis Responden	24.00%	0.00%	18.80%
	Count	25	7	32
Total	% within Jenis Responden	100.00%	100.00%	100.00%

Lampiran 13 Deskriptif Tabulasi Penilaian Dampak

Deskripsi tabulasi antara dampak (biaya/mutu/organisasi) terhadap pelanggaran etika proyek, ditinjau dari persepsi kontraktor dan PPK.

X1. Mengakali Material * Dampak Mengakali Material * Jenis Responden Crosstabulation

Jenis Responden				Dampak Mengakali Material		Total
				Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Mutu	
Kontraktor	X1. Mengakali Material	Sangat tidak berdampak	Count % of Total	0 0.00%	2 8.00%	2 8.00%
		Cukup berdampak	Count % of Total	0 0.00%	3 12.00%	3 12.00%
		Berdampak	Count % of Total	4 16.00%	3 12.00%	7 28.00%
		Sangat berdampak	Count % of Total	0 0.00%	13 52.00%	13 52.00%
		Total	Count % of Total	4 16.00%	21 84.00%	25 100.00%
PPK	X1. Mengakali Material	Berdampak	Count % of Total		1 14.30%	1 14.30%
		Sangat berdampak	Count % of Total		6 85.70%	6 85.70%
	Total		Count % of Total		7 100.00%	7 100.00%

X2. Mengakali Volume Material * Dampak Mengakali Volume Material * Jenis Responden Crosstabulation

Jenis Responden				Dampak Mengakali Volume Material		Total
				Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Mutu	
Kontraktor	X2. Mengakali Volume Material	Tidak berdampak	Count % of Total	0 0.00%	2 8.00%	2 8.00%
		Berdampak	Count	4	6	10

X2. Mengakali Volume Material * Dampak Mengakali Volume Material * Jenis Responden
Crosstabulation

Jenis Responden		Dampak Mengakali Volume Material		Total
		Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Mutu	
		% of Total		
		16.00%	24.00%	40.00%
	Sangat berdampak	Count	0	13
		% of Total	0.00%	52.00%
Total		Count	4	25
		% of Total	16.00%	100.00%
PPK	X2. Mengakali Volume Material	Berdampak	Count	1
		% of Total	14.30%	14.30%
	Sangat berdampak	Count	6	6
		% of Total	85.70%	85.70%
Total		Count	7	7
		% of Total	100.00%	100.00%

X3. Mengakali Dokumen * Dampak Mengakali Dokumen * Jenis Responden
Crosstabulation

Jenis Responden			Dampak Mengakali Dokumen			Total
			Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Mutu	Berdampak ke Organisasi	
Kontraktor	X3. Mengakali Dokumen	Tidak berdampak	Count	0	0	5
		% of Total	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%
		Berdampak	Count	0	3	2
	Sangat berdampak	% of Total	0.00%	12.00%	8.00%	20.00%
		Count	2	0	13	15
		% of Total	8.00%	0.00%	52.00%	60.00%
Total		Count	2	3	20	25
		% of Total	8.00%	12.00%	80.00%	100.00%
PPK	X3. Mengakali	Count			1	1

X3. Mengakali Dokumen * Dampak Mengakali Dokumen * Jenis Responden Crosstabulation

Jenis Responden			Dampak Mengakali Dokumen			Total
			Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Mutu	Berdampak ke Organisasi	
li Dokumen	Cukup berdampak	% of Total			14.30%	14.30%
		Count			6	6
	Berdampak	% of Total			85.70%	85.70%
Total		Count			7	7
		% of Total			100.00%	100.00%

X4. Mengakali Biaya * Dampak Mengakali Biaya * Jenis Responden Crosstabulation

Jenis Responden			Dampak Mengakali Biaya			Total
			Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Mutu	Berdampak ke Organisasi	
Kontraktor	X4. Mengakali Biaya	Cukup berdampak	Count 1	2	3	6
		% of Total	4.00%	8.00%	12.00%	24.00%
		Berdampak	Count 2	0	1	3
	Total	% of Total	8.00%	0.00%	4.00%	12.00%
		Sangat berdampak	Count 5	0	11	16
		% of Total	20.00%	0.00%	44.00%	64.00%
PPK	X4. Mengakali Biaya		Count 8	2	15	25
		% of Total	32.00%	8.00%	60.00%	100.00%
		Tidak berdampak	Count 1		1	1
	Total	% of Total			14.30%	14.30%
		Cukup berdampak	Count 3		3	3
		% of Total			42.90%	42.90%
Total	Total	Berdampak	Count 3		3	3
		% of Total				

X4. Mengakali Biaya * Dampak Mengakali Biaya * Jenis Responden Crosstabulation

Jenis Responden		Dampak Mengakali Biaya			Total
		Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Mutu	Berdampak ke Organisasi	
	% of Total			42.90%	42.90%
	Count			7	7
Total	% of Total			100.00%	100.00%

X5. Tidak Adil dalam Tender * Dampak Tidak Adil dalam Tender * Jenis Responden Crosstabulation

Jenis Responden			Dampak Tidak Adil dalam Tender			Total
			Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Mutu	Berdampak ke Organisasi	
Kontraktor	X5. Tidak Adil dalam Tender	Tidak berdampak	Count 0	Count 0	Count 3	Count 3
		% of Total	0.00%	0.00%	12.00%	12.00%
	Berdampak	Count	3	3	4	10
		% of Total	12.00%	12.00%	16.00%	40.00%
	Sangat berdampak	Count	0	0	12	12
		% of Total	0.00%	0.00%	48.00%	48.00%
	Total	Count	3	3	19	25
		% of Total	12.00%	12.00%	76.00%	100.00%
PPK	X5. Tidak Adil dalam Tender	Cukup berdampak			Count 2	Count 2
		% of Total			28.60%	28.60%
	Berdampak	Count			2	2
		% of Total			28.60%	28.60%
	Sangat berdampak	Count			3	3
		% of Total			42.90%	42.90%
	Total	Count			7	7

X5. Tidak Adil dalam Tender * Dampak Tidak Adil dalam Tender * Jenis Responden Crosstabulation

Jenis Responden	Dampak Tidak Adil dalam Tender			Total
	Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Mutu	Berdampak ke Organisasi	
% of Total			100.00%	100.00%

X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak * Dampak Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak * Jenis Responden Crosstabulation

Jenis Responden			Dampak Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak			Total
			Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Mutu	Berdampak ke Organisasi	
Kontraktor	X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak	Tidak berdampak	0 0.00%	0 0.00%	2 8.00%	2 8.00%
		Berdampak	2 8.00%	4 16.00%	0 0.00%	6 24.00%
		Sangat berdampak	2 8.00%	3 12.00%	12 48.00%	17 68.00%
	Total		4 16.00%	7 28.00%	14 56.00%	25 100.00%
PPK	X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak	Cukup berdampak			4 57.10%	4 57.10%
		Berdampak			3 42.90%	3 42.90%
	Total				7 100.00%	7 100.00%

X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi) * Dampak Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi) * Jenis Responden Crosstabulation

Jenis Responden				Dampak Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi)			Total
				Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Mutu	Berdampak ke Organisasi	
Kontraktor	X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi)	Tidak berdampak	Count % of Total	0 0.00%	0 0.00%	4 16.00%	4 16.00%
		Cukup berdampak	Count % of Total	0 0.00%	2 8.00%	0 0.00%	2 8.00%
		Berdampak	Count % of Total	1 4.00%	2 8.00%	0 0.00%	3 12.00%
		Sangat berdampak	Count % of Total	2 8.00%	2 8.00%	12 48.00%	16 64.00%
	Total	Count % of Total	3 12.00%	6 24.00%	16 64.00%	25 100.00%	
PPK	X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi)	Cukup berdampak	Count % of Total			3 42.90%	3 42.90%
		Berdampak	Count % of Total			4 57.10%	4 57.10%
	Total	Count % of Total			7 100.00%	7 100.00%	

X8. Perselisihan Kepentingan * Dampak Perselisihan Kepentingan * Jenis Responden Crosstabulation

Jenis Responden				Dampak Perselisihan Kepentingan		Total
				Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Organisasi	
Kontraktor	X8. Perselisihan Kepentingan	Sangat tidak berdampak	Count	0	1	1
			% of Total	0.00%	4.00%	4.00%

X8. Perselisihan Kepentingan * Dampak Perselisihan Kepentingan * Jenis Responden
Crosstabulation

Jenis Responden			Dampak Perselisihan Kepentingan		Total
			Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Organisasi	
	Tidak berdampak	Count	4	3	7
		% of Total	16.00%	12.00%	28.00%
	Berdampak	Count	2	0	2
		% of Total	8.00%	0.00%	8.00%
	Sangat berdampak	Count	4	11	15
		% of Total	16.00%	44.00%	60.00%
Total		Count	10	15	25
		% of Total	40.00%	60.00%	100.00%
PPK	X8. Perselisihan Kepentingan	Count		2	2
		% of Total		28.60%	28.60%
	Sangat berdampak	Count		5	5
		% of Total		71.40%	71.40%
	Total	Count		7	7
		% of Total		100.00%	100.00%

X9. Tidak Adil dalam Informasi * Dampak Tidak Adil dalam Informasi * Jenis Responden
Crosstabulation

Jenis Responden			Dampak Tidak Adil dalam Informasi		Total
			Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Organisasi	
Kontraktor	Tidak berdampak	Count	0	3	3
		% of Total	0.00%	12.00%	12.00%
	Cukup berdampak	Count	2	0	2
		% of Total	8.00%	0.00%	8.00%
	Berdampak	Count	1	7	8
		% of Total	4.00%	28.00%	32.00%
Total		Count	2	10	12

X9. Tidak Adil dalam Informasi * Dampak Tidak Adil dalam Informasi * Jenis Responden Crosstabulation

Jenis Responden			Dampak Tidak Adil dalam Informasi		Total
			Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Organisasi	
PPK	Sangat berdampak	% of Total	8.00%	40.00%	48.00%
		Count	5	20	25
	Total	% of Total	20.00%	80.00%	100.00%
		Count			
	Tidak berdampak	% of Total		28.60%	28.60%
		Count		2	2
X9. Tidak Adil dalam Informasi	Cukup berdampak	% of Total		71.40%	71.40%
		Count		5	5
	Total	% of Total		100.00%	100.00%
		Count		7	7

X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai * Dampak Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai * Jenis Responden Crosstabulation

Jenis Responden			Dampak Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai			Total
			Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Mutu	Berdampak ke Organisasi	
Kontraktor	Sangat tidak berdampak	Count	1	0	0	1
		% of Total	4.00%	0.00%	0.00%	4.00%
	Tidak berdampak	Count	0	3	1	4
		% of Total	0.00%	12.00%	4.00%	16.00%
	Cukup berdampak	Count	0	0	5	5
		% of Total	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%
	Berdampak	Count	0	0	3	3
		% of Total	0.00%	0.00%	12.00%	12.00%
	Sangat berdampak	Count	2	0	10	12
		% of Total	8.00%	0.00%	40.00%	48.00%

X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai * Dampak Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai
*** Jenis Responden Crosstabulation**

Jenis Responden			Dampak Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai			Total
			Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Mutu	Berdampak ke Organisasi	
Total			Count 3 % of Total 12.00%	Count 3 % of Total 12.00%	Count 19 % of Total 76.00%	Count 25 % of Total 100.00%
PPK	X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai	Berdampak	Count 0 % of Total	Count 0 % of Total 0.00%	Count 2 % of Total 28.60%	Count 2 % of Total 28.60%
		Sangat berdampak	Count 2 % of Total	Count 2 % of Total 28.60%	Count 3 % of Total 42.90%	Count 5 % of Total 71.40%
	Total		Count 2 % of Total	Count 2 % of Total 28.60%	Count 5 % of Total 71.40%	Count 7 % of Total 100.00%

X11. Menyogok dalam bentuk barang berharga * Dampak Menyogok dalam bentuk barang berharga
*** Jenis Responden Crosstabulation**

Jenis Responden			Dampak Menyogok dalam bentuk barang berharga			Total
			Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Mutu	Berdampak ke Organisasi	
Kontraktor	X11. Menyogok dalam bentuk barang berharga	Sangat tidak berdampak	Count 2 % of Total 8.00%	Count 0 % of Total 0.00%	Count 0 % of Total 0.00%	Count 2 % of Total 8.00%
		Tidak berdampak	Count 0 % of Total 0.00%	Count 2 % of Total 8.00%	Count 1 % of Total 4.00%	Count 3 % of Total 12.00%
		Cukup berdampak	Count 0 % of Total 0.00%	Count 0 % of Total 0.00%	Count 4 % of Total 16.00%	Count 4 % of Total 16.00%
		Berdampak	Count 0 % of Total 0.00%	Count 0 % of Total 0.00%	Count 11 % of Total 44.00%	Count 11 % of Total 44.00%
		Sangat berdampak	Count 2 % of Total 8.00%	Count 0 % of Total 0.00%	Count 3 % of Total 12.00%	Count 5 % of Total 20.00%

X11.Menyogok dalam bentuk barang berharga * Dampak Menyogok dalam bentuk barang berharga * Jenis Responden Crosstabulation

Jenis Responden			Dampak Menyogok dalam bentuk barang berharga			Total
			Berdamp ak ke Biaya	Berdamp ak ke Mutu	Berdamp ak ke Organisas i	
Total			4 16.00%	2 8.00%	19 76.00%	25 100.00%
PPK	X11.Menyog ok dalam bentuk barang berharga	Cukup berdampa k		0 0.00%	2 28.60%	2 28.60%
		Berdamp ak		0 0.00%	3 42.90%	3 42.90%
		Sangat berdampa k		2 28.60%	0 0.00%	2 28.60%
		Total		2 28.60%	5 71.40%	7 100.00%

X12.Menyogok dalam bentuk biaya perjalanan * Dampak Menyogok dalam bentuk biaya perjalanan * Jenis Responden Crosstabulation

Jenis Responden			Dampak Menyogok dalam bentuk biaya perjalanan			Total
			Berdamp ak ke Biaya	Berdamp ak ke Mutu	Berdamp ak ke Organisas i	
Kontrakt or	X12.Menyog ok dalam bentuk biaya perjalanan	Tidak berdampa k	0 0.00%	3 12.00%	1 4.00%	4 16.00%
		Cukup berdampa k	0 0.00%	0 0.00%	2 8.00%	2 8.00%
		Berdamp ak	0 0.00%	0 0.00%	5 20.00%	5 20.00%
		Sangat berdampa k	2 8.00%	0 0.00%	12 48.00%	14 56.00%

X12.Menyogok dalam bentuk biaya perjalanan * Dampak Menyogok dalam bentuk biaya perjalanan * Jenis Responden Crosstabulation

Jenis Responden				Dampak Menyogok dalam bentuk biaya perjalanan			Total
				Berdamp ak ke Biaya	Berdamp ak ke Mutu	Berdamp ak ke Organisas i	
Total			Coun t % of Total	2 8.00%	3 12.00%	20 80.00%	25 100.00 %
PPK	X12.Menyog ok dalam bentuk biaya perjalanan	Berdamp ak	Coun t % of Total		0 0.00%	2 28.60%	2 28.60%
		Sangat berdampa k	Coun t % of Total		1 14.30%	4 57.10%	5 71.40%
	Total		Coun t % of Total		1 14.30%	6 85.70%	7 100.00 %

X13. Manipulasi Pembayaran * Dampak Manipulasi Pembayaran * Jenis Responden Crosstabulation

Jenis Responden				Dampak Manipulasi Pembayaran			Total
				Berdampa k ke Biaya	Berdampa k ke Mutu	Berdampa k ke Organisas i	
Kontrakt or	X13. Manipula si Pembayara n	Tidak berdampa k	Coun t % of Total	0 0.00%	4 16.00%	2 8.00%	6 24.00%
		Cukup berdampa k	Coun t % of Total	3 12.00%	0 0.00%	0 0.00%	3 12.00%
		Sangat berdampa k	Coun t % of Total	4 16.00%	8 32.00%	4 16.00%	16 64.00%
	Total		Coun t % of Total	7 28.00%	12 48.00%	6 24.00%	25 100.00 %
PPK	X13. Manipula si	Cukup berdampa k	Coun t % of Total	0 0.00%		1 14.30%	1 14.30%

X13. Memanipulasi Pembayaran * Dampak Memanipulasi Pembayaran * Jenis Responden Crosstabulation

Jenis Responden			Dampak Memanipulasi Pembayaran			Total
			Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Mutu	Berdampak ke Organisasi	
Pembayaran	Berdampak	Count % of Total	0 0.00%		3 42.90%	3 42.90%
	Sangat berdampak	Count % of Total	2 28.60%		1 14.30%	3 42.90%
Total			2 28.60%		5 71.40%	7 100.00%

X14. Memanipulasi Informasi Proyek * Dampak Memanipulasi Informasi Proyek * Jenis Responden Crosstabulation

Jenis Responden			Dampak Memanipulasi Informasi Proyek			Total
			Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Mutu	Berdampak ke Organisasi	
Kontraktor	Tidak berdampak	Count % of Total	0 0.00%	4 16.00%	1 4.00%	5 20.00%
	Cukup berdampak	Count % of Total	0 0.00%	0 0.00%	3 12.00%	3 12.00%
	Sangat berdampak	Count % of Total	4 16.00%	3 12.00%	10 40.00%	17 68.00%
	Total	Count % of Total	4 16.00%	7 28.00%	14 56.00%	25 100.00%
PPK	Cukup berdampak	Count % of Total			1 14.30%	1 14.30%
	Berdampak	Count % of Total			3 42.90%	3 42.90%

X14. Memanipulasi Informasi Proyek * Dampak Memanipulasi Informasi Proyek * Jenis Responden Crosstabulation

Jenis Responden			Dampak Memanipulasi Informasi Proyek			Total
			Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Mutu	Berdampak ke Organisasi	
	Sangat berdampak	Count % of Total			3 42.90%	3 42.90%
	Total	Count % of Total			7 100.00%	7 100.00%

X15. Memanipulasi Pengawasan Proyek * Dampak Memanipulasi Pengawasan Proyek * Jenis Responden Crosstabulation

Jenis Responden			Dampak Memanipulasi Pengawasan Proyek			Total
			Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Mutu	Berdampak ke Organisasi	
Kontraktor	Tidak berdampak	Count % of Total	0 0.00%	6 24.00%	2 8.00%	8 32.00%
	Cukup berdampak	Count % of Total	0 0.00%	0 0.00%	2 8.00%	2 8.00%
	Berdampak	Count % of Total	2 8.00%	0 0.00%	0 0.00%	2 8.00%
	Sangat berdampak	Count % of Total	0 0.00%	7 28.00%	6 24.00%	13 52.00%
	Total	Count % of Total	2 8.00%	13 52.00%	10 40.00%	25 100.00%
PPK	Berdampak	Count % of Total		0 0.00%	2 28.60%	2 28.60%
	Sangat berdampak	Count % of Total		1 14.30%	4 57.10%	5 71.40%

X15. Memanipulasi Pengawasan Proyek * Dampak Memanipulasi Pengawasan Proyek * Jenis Responden Crosstabulation

Jenis Responden		Dampak Memanipulasi Pengawasan Proyek			Total
		Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Mutu	Berdampak ke Organisasi	
Total			1	6	7
	Coun t % of Total		14.30%	85.70%	100.00 %

X16.Memanipulasi Keselamatan Kerja di Proyek * Dampak Memanipulasi Keselamatan Kerja di Proyek * Jenis Responden Crosstabulation

Jenis Responden				Dampak Memanipulasi Keselamatan Kerja di Proyek			Total
				Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Mutu	Berdampak ke Organisasi	
Kontraktor	X16.Memanipulasi Keselamatan Kerja di Proyek	Tidak berdampak	Coun t % of Total	0 0.00%	2 8.00%	1 4.00%	3 12.00 %
		Cukup berdampak	Coun t % of Total	0 0.00%	0 0.00%	5 20.00%	5 20.00 %
		Sangat berdampak	Coun t % of Total	4 16.00%	3 12.00%	10 40.00%	17 68.00 %
	Total		Coun t % of Total	4 16.00%	5 20.00%	16 64.00%	25 100.00 %
PPK	X16.Memanipulasi Keselamatan Kerja di Proyek	Cukup berdampak	Coun t % of Total	0 0.00%		1 14.30%	1 14.30 %
		Berdampak	Coun t % of Total	0 0.00%		3 42.90%	3 42.90 %
		Sangat berdampak	Coun t % of Total	1 14.30%		2 28.60%	3 42.90 %
	Total		Coun t % of Total	1 14.30%		6 85.70%	7 100.00 %

X17. Memanipulasi Pendokumentasian Proyek * Dampak Memanipulasi Pendokumentasian Proyek * Jenis Responden Crosstabulation

Jenis Responden	Dampak Memanipulasi Pendokumentasian Proyek		Total
-----------------	---	--	-------

				Berdampak ke Biaya	Berdampak ke Mutu	Berdampak ke Organisasi	
Kontra ktor	X17. Manipulasi Pendokumentasian Proyek	Tidak berdampak	Count % of Total	0 0.00%	2 8.00%	1 4.00%	3 12.00%
		Cukup berdampak	Count % of Total	0 0.00%	0 0.00%	2 8.00%	2 8.00%
		Berdampak	Count % of Total	0 0.00%	0 0.00%	1 4.00%	1 4.00%
		Sangat berdampak	Count % of Total	2 8.00%	3 12.00%	14 56.00%	19 76.00%
		Total	Count % of Total	2 8.00%	5 20.00%	18 72.00%	25 100.00%
PPK	X17. Manipulasi Pendokumentasian Proyek	Berdampak	Count % of Total			2 28.60%	2 28.60%
		Sangat berdampak	Count % of Total			5 71.40%	5 71.40%
	Total		Count % of Total			7 100.00%	7 100.00%

Lampiran 14 Deskriptif Dampak Mayoritas Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden PPK

Descriptive Statistics Dampak Mayoritas Pelanggaran Etika (PPK)					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1. Mengakali Material	7	4	5	4.86	0.378
X2. Mengakali Volume Proyek	7	4	5	4.86	0.378
X3. Mengakali Dokumen	7	3	4	3.86	0.378
X4. Mengakali Pembiayaan	7	2	4	3.29	0.756
X5. Tidak Adil dalam Tender	7	3	5	4.14	0.9
X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak	7	3	4	3.43	0.535
X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi)	7	3	4	3.57	0.535
X8. Perselisihan Kepentingan	7	4	5	4.71	0.488
X9. Tidak Adil dalam Informasi	7	2	3	2.71	0.488
X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai	5	4	5	4.6	0.548
X11. Menyogok dalam bentuk barang berharga	5	3	4	3.6	0.548
X12. Menyogok dalam bentuk biaya perjalanan	6	4	5	4.67	0.516
X13. Manipulasi Pembayaran	5	3	5	4	0.707
X14. Manipulasi Informasi Proyek	7	3	5	4.29	0.756
X15. Manipulasi Pengawasan Proyek	6	4	5	4.67	0.516
X16. Manipulasi Keselamatan Kerja di Proyek	6	3	5	4.17	0.753
X17. Manipulasi Pendokumentasian Proyek	7	4	5	4.71	0.488

Lampiran 15 Deskriptif Dampak Mayoritas Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden Kontraktor

Descriptive Statistics Dampak Mayoritas Pelanggaran Etika (KONTRAKTOR)					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1. Mengakali Material	21	1	5	4.19	1.289
X2. Mengakali Volume Proyek	21	2	5	4.43	0.926
X3. Mengakali Dokumen	20	2	5	4.15	1.309
X4. Mengakali Pembiayaan					
X5. Tidak Adil dalam Tender	19	2	5	4.32	1.108
X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak	14	2	5	4.57	1.089
X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi)	16	2	5	4.25	1.342
X8. Perselisihan Kepentingan	15	1	5	4.13	1.506
X9. Tidak Adil dalam Informasi	20	2	5	4.2	1.056
X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai	19	2	5	4.16	1.015
X11. Menyogok dalam bentuk barang berharga	19	2	5	3.84	0.765
X12. Menyogok dalam bentuk biaya perjalanan	20	2	5	4.4	0.883
X13. Manipulasi Pembayaran	12	2	5	4	1.477
X14. Manipulasi Informasi Proyek	14	2	5	4.36	1.082
X15. Manipulasi Pengawasan Proyek	13	2	5	3.62	1.557
X16. Manipulasi Keselamatan Kerja di Proyek	16	2	5	4.19	1.109
X17. Manipulasi Pendokumentasian Proyek	18	2	5	4.56	0.922

Lampiran 16 Hasil Uji Anova

Pengujian perbedaan variabel X1:

Descriptives

Dampak Mengakali Material

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Kontraktor	25	1.84	0.374	0.075	1.69	1.99	1	2
PPK	7	2	0	0	2	2	2	2
Total	32	1.88	0.336	0.059	1.75	2	1	2

ANOVA

Dampak Mengakali Material

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	0.14	1	0.14	1.25	0.272
Within Groups	3.36	30	0.112		
Total	3.5	31			

Pengujian perbedaan variabel X2:

Descriptives

Dampak Mengakali Volume Proyek

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Kontraktor	25	1.84	0.374	0.075	1.69	1.99	1	2
PPK	7	2	0	0	2	2	2	2
Total	32	1.88	0.336	0.059	1.75	2	1	2

ANOVA

Dampak Mengakali Volume Proyek

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	0.14	1	0.14	1.25	0.272
Within Groups	3.36	30	0.112		
Total	3.5	31			

Pengujian perbedaan variabel X3:

Descriptives

Dampak Mengakali Dokumen

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Kontraktor	25	2.72	0.614	0.123	2.47	2.97	1	3
PPK	7	3	0	0	3	3	3	3
Total	32	2.78	0.553	0.098	2.58	2.98	1	3

ANOVA

Dampak Mengakali Dokumen

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	0.429	1	0.429	1.423	0.242
Within Groups	9.04	30	0.301		
Total	9.469	31			

Pengujian perbedaan variabel X4:

Descriptives

Dampak Mengakali Pembiayaan

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Kontraktor	25	2.28	0.936	0.187	1.89	2.67	1	3
PPK	7	3	0	0	3	3	3	3
Total	32	2.44	0.878	0.155	2.12	2.75	1	3

ANOVA

Dampak Mengakali Pembiayaan

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	2.835	1	2.835	4.042	0.053
Within Groups	21.04	30	0.701		
Total	23.875	31			

Pengujian perbedaan variabel X5:

Descriptives

Dampak Tidak Adil dalam Tender

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Kontraktor	25	2.64	0.7	0.14	2.35	2.93	1	3
PPK	7	3	0	0	3	3	3	3
Total	32	2.72	0.634	0.112	2.49	2.95	1	3

ANOVA

Dampak Tidak Adil dalam Tender

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	0.709	1	0.709	1.808	0.189
Within Groups	11.76	30	0.392		
Total	12.469	31			

Pengujian perbedaan variabel X6:

Descriptives

Dampak Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Kontraktor	25	2.4	0.764	0.153	2.08	2.72	1	3
PPK	7	3	0	0	3	3	3	3
Total	32	2.53	0.718	0.127	2.27	2.79	1	3

ANOVA

Dampak Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1.969	1	1.969	4.219	0.049
Within Groups	14	30	0.467		
Total	15.969	31			

Pengujian perbedaan variabel X7:

Descriptives

Dampak Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi)

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Kontraktor	25	2.52	0.714	0.143	2.23	2.81	1	3
PPK	7	3	0	0	3	3	3	3
Total	32	2.62	0.66	0.117	2.39	2.86	1	3

ANOVA

Dampak Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1.26	1	1.26	3.088	0.089
Within Groups	12.24	30	0.408		
Total	13.5	31			

Pengujian perbedaan variabel X8:

Descriptives

Dampak Perselisihan Kepentingan

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Kontraktor	25	2.2	1	0.2	1.79	2.61	1	3
PPK	7	3	0	0	3	3	3	3
Total	32	2.38	0.942	0.166	2.04	2.71	1	3

ANOVA

Dampak Perselisihan Kepentingan

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	3.5	1	3.5	4.375	0.045
Within Groups	24	30	0.8		
Total	27.5	31			

Pengujian perbedaan variabel X9:

Descriptives

Dampak Tidak Adil dalam Informasi

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Kontraktor	25	2.6	0.816	0.163	2.26	2.94	1	3
PPK	7	3	0	0	3	3	3	3
Total	32	2.69	0.738	0.13	2.42	2.95	1	3

ANOVA

Dampak Tidak Adil dalam Informasi

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	0.875	1	0.875	1.641	0.21
Within Groups	16	30	0.533		
Total	16.875	31			

Pengujian perbedaan variabel X10:

Descriptives

Dampak Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Kontraktor	25	2.64	0.7	0.14	2.35	2.93	1	3
PPK	7	2.71	0.488	0.184	2.26	3.17	2	3
Total	32	2.66	0.653	0.115	2.42	2.89	1	3

ANOVA

Dampak Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	0.03	1	0.03	0.069	0.795
Within Groups	13.189	30	0.44		
Total	13.219	31			

Pengujian perbedaan variabel X11:

Descriptives

Dampak Menyogok dalam bentuk barang berharga

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Kontraktor	25	2.6	0.764	0.153	2.28	2.92	1	3
PPK	7	2.71	0.488	0.184	2.26	3.17	2	3
Total	32	2.62	0.707	0.125	2.37	2.88	1	3

ANOVA

Dampak Menyogok dalam bentuk barang berharga

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	0.071	1	0.071	0.139	0.712
Within Groups	15.429	30	0.514		
Total	15.5	31			

Pengujian perbedaan variabel X12:

Descriptives

Dampak Menyogok dalam bentuk biaya perjalanan

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Kontraktor	25	2.72	0.614	0.123	2.47	2.97	1	3
PPK	7	2.86	0.378	0.143	2.51	3.21	2	3
Total	32	2.75	0.568	0.1	2.55	2.95	1	3

ANOVA

Dampak Menyogok dalam bentuk biaya perjalanan

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	0.103	1	0.103	0.312	0.581
Within Groups	9.897	30	0.33		
Total	10	31			

Pengujian perbedaan variabel X13:

Descriptives

Dampak Manipulasi Pembayaran

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Kontraktor	25	1.96	0.735	0.147	1.66	2.26	1	3
PPK	7	2.43	0.976	0.369	1.53	3.33	1	3
Total	32	2.06	0.801	0.142	1.77	2.35	1	3

ANOVA

Dampak Manipulasi Pembayaran

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1.201	1	1.201	1.929	0.175
Within Groups	18.674	30	0.622		
Total	19.875	31			

Pengujian perbedaan variabel X14:

Descriptives

Dampak Manipulasi Informasi Proyek

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Kontraktor	25	2.4	0.764	0.153	2.08	2.72	1	3
PPK	7	3	0	0	3	3	3	3
Total	32	2.53	0.718	0.127	2.27	2.79	1	3

ANOVA

Dampak Manipulasi Informasi Proyek

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1.969	1	1.969	4.219	0.049
Within Groups	14	30	0.467		
Total	15.969	31			

Pengujian perbedaan variabel X15:

Descriptives

Dampak Memanipulasi
Pengawasan Proyek

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Kontraktor	25	2.32	0.627	0.125	2.06	2.58	1	3
PPK	7	2.86	0.378	0.143	2.51	3.21	2	3
Total	32	2.44	0.619	0.109	2.21	2.66	1	3

ANOVA

Dampak Memanipulasi Pengawasan Proyek

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1.578	1	1.578	4.597	0.04
Within Groups	10.297	30	0.343		
Total	11.875	31			

Pengujian perbedaan variabel X16:

Descriptives

Dampak Memanipulasi Keselamatan
Kerja di Proyek

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Kontraktor	25	2.48	0.77	0.154	2.16	2.8	1	3
PPK	7	2.71	0.756	0.286	2.02	3.41	1	3
Total	32	2.53	0.761	0.135	2.26	2.81	1	3

ANOVA

Dampak Memanipulasi Keselamatan Kerja di Proyek

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	0.3	1	0.3	0.51	0.481
Within Groups	17.669	30	0.589		
Total	17.969	31			

Pengujian perbedaan variabel X17:

Descriptives

Dampak Manipulasi
Pendokumentasian Proyek

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Kontraktor	25	2.64	0.638	0.128	2.38	2.9	1	3
PPK	7	3	0	0	3	3	3	3
Total	32	2.72	0.581	0.103	2.51	2.93	1	3

ANOVA

Dampak Manipulasi Pendokumentasian Proyek

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	0.709	1	0.709	2.179	0.15
Within Groups	9.76	30	0.325		
Total	10.469	31			

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	119
Lampiran 2 Bentuk Pedoman Wawancara Penyebab dan Cara Minimalisasi Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Pemerintah di Daerah (X)	123
Lampiran 3 Daftar Kontraktor Berdasarkan Masa SIUJK Aktif di Daerah (X), Dalam Kurun Waktu Tiga Tahun Terakhir.....	125
Lampiran 4 Daftar PPK Proyek Konstruksi di Daerah (X) Tahun 2014.	125
Lampiran 5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Persetujuan	127
Lampiran 6 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Penilaian Frekuensi	131
Lampiran 7 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Penilaian Dampak.....	135
Lampiran 8 Deskriptif Tingkat Persetujuan.....	139
Lampiran 9 Deskriptif Penilaian Frekuensi	140
Lampiran 10 Deskriptif Penilaian Dampak	142
Lampiran 11 Deskriptif Tabulasi Pengukuran Tingkat Persetujuan	144
Lampiran 12 Deskriptif Tabulasi Penilaian Frekuensi	152
Lampiran 13 Deskriptif Tabulasi Penilaian Dampak.....	164
Lampiran 14 Deskriptif Dampak Mayoritas Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden PPK	178
Lampiran 15 Deskriptif Dampak Mayoritas Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi dari Responden Kontraktor	180
Lampiran 16 Hasil Uji Anova.....	181



IDENTIFIKASI PELANGGARAN ETIKA PROYEK KONSTRUKSI DALAM LINGKUP PROYEK KONSTRUKSI PEMERINTAH DAERAH (X). TINJAUAN DARI PERSPEKTIF: PEMERINTAH DAN KONTRAKTOR

Hansen Thomas Yarisetouw¹⁾ dan Tri Joko Wahyu Adi²⁾

*1) Program Studi Magister Manajemen Teknologi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Kampus ITS, Jl. Cokroaminoto 12A, Surabaya, 60264, Indonesia
e-mail: wibyth@yahoo.com*

2) Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

ABSTRAK

Pelanggaran etika merupakan bentuk perilaku yang bertentangan dengan norma kebaikan. Dalam Pelaksanaan proyek konstruksi dapat terjadi praktek-praktek penyuapan, penipuan, ketidakadilan, dan manipulasi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi serta mendeskripsikan praktek-praktek tersebut dari perspektif responden penelitian, yang dalam lingkup proyek konstruksi Pemerintah Daerah (X). Daerah (X) merupakan salah satu kabupaten di Indonesia.

Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif. Responden penelitian adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Kontraktor. Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Metode analisis statistik menggunakan analisis deskriptif dan uji Anova.

Identifikasi deskriptif terungkap bahwa praktek yang diduga sering terjadi, yaitu mengakali material, mengakali volume material, menyogok dalam bentuk biaya perjalanan, dan memanipulasi pendokumentasian proyek. Hasil uji Anova mengungkapkan praktek yang memiliki perbedaan persepsi dalam penilaian dampak, yaitu tidak adil dalam negosiasi kontrak, perselisihan kepentingan, memanipulasi informasi proyek, dan memanipulasi pengawasan proyek. Identifikasi penyebab mengungkapkan, (1) kurangnya pendidikan dan pelatihan etika profesional pengadaan proyek konstruksi pemerintah, (2) kompetisi tidak sehat, dan (3) arahan (“negatif”) dari pimpinan organisasi. Hasil identifikasi solusi, (1) memberdayakan program pendidikan dan pelatihan etika profesional pengadaan proyek konstruksi pemerintah, (2) regulasi dan penegakan hukum, dan (3) penekanan sebuah bentuk kode etik profesional dalam pengadaan proyek konstruksi pemerintah.

Kata Kunci: *Etika Proyek Konstruksi, Proyek Konstruksi Pemerintah, PPK, Kontraktor.*

PENDAHULUAN

Saat ini, masalah etika profesional telah memicu antusias dan diskusi pragmatis di kalangan masyarakat umum, dan ada permintaan dalam literatur untuk mendorong penerapan praktek etika yang baik atau berperilaku etis di dalam bisnis industri

konstruksi. Hal ini menjadi perhatian, sebab dampak dari praktek yang tidak etis dalam industri konstruksi telah merugikan banyak pihak dan berdampak pada hasil proyek (Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, 2012). Sehingga, dengan memperhatikan aspek etika dapat menjamin keberlanjutan dalam hasil akhir proyek (Mishra, Dangayach, & Mittal, 2011), dan dianjurkan untuk semua pihak untuk mempromosikan dan mempraktekkan perilaku etika dalam proyek mereka untuk meminimalkan cacat dan kegagalan konstruksi (Ahzahar, Karim, & Eman, 2011).

Temuan dari penelitian yang dilakukan di negara-negara lain seperti, Malaysia (Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, 2012) dan (Rahman, Wang, & Saimon, 2011), India (Mishra, Dangayach, & Mittal, 2011), Rumania (Richea, 2013), Yunani (Trivellas & Drimoussis, 2013) memberikan bukti bahwa praktek di proyek konstruksi terkendala dengan masalah etika.

Instansi Pemerintah di Daerah penelitian telah berkomitmen untuk meningkatkan kelayakan infrastruktur pemerintahan, ekonomi, dan fasilitas layanan publik, yang memadai. Salah satu implementasi dari misi tersebut adalah dengan melaksanakan agenda pembangunan permukiman, dengan sasaran mewujudkan perumahan yang terjangkau dan layak huni, sebagai program andalan. Salah satu ancaman dalam analisis lingkungan Pemerintah di Daerah penelitian adalah masih berkembangnya nuansa Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Pemerintah Daerah (X), Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2006-2010, 2006).

Pada umumnya kasus pada pekerjaan konstruksi didominasi oleh penyimpangan berupa pengaturan lelang, kekurangan volume pekerjaan, ketidak-sesuaian spesifikasi berupa pengurangan kualitas pekerjaan, pemahalan harga (mark-up) dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan (Susanto & Makmur, 2013). Dengan adanya penemuan-penemuan penelitian yang mengungkapkan industri konstruksi terkendala dengan masalah perilaku tidak etis, maka pelaksanaan penelitian ini secara khusus akan difokuskan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan persepsi pemerintah dan kontraktor, yang sebagai pelaksana proyek konstruksi pemerintah, terhadap bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, serta dapat mengetahui penyebab dan solusi untuk meminimalkan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, secara khusus di Daerah penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: (1) Apa sajakah bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, dan bagaimana frekuensi dan dampak dari praktek-praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah saat ini, di Daerah (X)? (2) Apa penyebab dan solusi untuk meminimalkan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah saat ini, di Daerah (X)?

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi serta mendeskripsikan masing-masing persepsi pemerintah dan kontraktor, terhadap bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi, dan mengetahui penilaian responden, yang merupakan “keyakinan responden,” terhadap tingkat frekuensi dan dampak dari praktek-praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah saat ini, di Daerah (X). (2) Mengetahui dan mendeskripsikan persepsi keseluruhan responden, terhadap penyebab dan solusi untuk meminimalkan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah saat ini, di Daerah (X).

METODA

Responden penelitian dikelompokkan menjadi responden PPK dan Kontraktor. Kuesioner penelitian digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang pertama, yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan persepsi kedua kelompok responden untuk mengetahui bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, dan mengetahui tingkat persepsi (“keyakinan”) responden terhadap frekuensi dan dampak dari praktek-praktek pelanggaran etika proyek konstruksi yang teridentifikasi, di Daerah penelitian saat ini

Menjawab permasalahan penelitian selanjutnya, untuk mengetahui penyebab dan solusi yang dapat meminimalkan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di Daerah penelitian, dilakukan melalui wawancara terstruktur.

Skala pengukuran data menggunakan skala likert, dengan skor terendah 1 hingga skor tertinggi 5. Untuk menginterpretasi hasil rata-rata terhadap semua pengukuran data persepsi pada penelitian ini, untuk pengukuran tingkat persetujuan, frekuensi dan dampak bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika proyek konstruksi pemerintah, digunakan analisis interpretasi rata-rata skor.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode analisis statistik deskriptif dan uji Anova, untuk menarik kesimpulan dari data penelitian yang diperoleh. Data yang terkumpul dianalisis statistik dengan menggunakan program *Statistical Program for Social Science* (SPSS) 16.0.

Hasil statistik deskriptif yaitu dengan menunjukkan nilai minimum (min), maksimum (max), nilai rata-rata (mean), dan deviasi standar (std. dev) dari observasi variabel penelitian. Hasil olah data dalam bentuk statistik deskriptif disajikan dalam bentuk tabel dan gambar (matriks).

Uji Anova pada penelitian ini, dilakukan untuk mengkaji apakah ada perbedaan persepsi antara PPK dengan Kontraktor, terhadap rata-rata penilaian persepsi dampak pelanggaran etika. Hasilnya untuk setiap variabel yang terdapat perbedaan persepsi, akan dijelaskan mengapa terdapat perbedaan persepsi. Untuk menjelaskan mengapa terdapat perbedaan, akan dimintai pendapat dan penjelasan dari responden ahli. Penilaian persepsi dampak praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, dilakukan untuk mendapat pernyataan atau persepsi responden bawasanya untuk setiap praktek pelanggaran etika proyek konstruksi dapat berdampak terhadap apakah: Biaya, mutu, atau organisasi? Dan persepsi seberapa dampaknya? Jawaban persepsi dampak merupakan tanggapan responden, yang bawasanya berdasarkan pada pengalaman responden, yang telah terlibat dalam pelaksanaan pengadaan proyek konstruksi pemerintah, di daerah penelitian.

Mengkomunikasikan hasil penelitian hubungan antara persepsi tingkat frekuensi pelanggaran etika dan dampak pelanggaran etika proyek konstruksi digunakan matriks *Simple Heat Map Background*. Melalui matriks *Simple Heat Map Background* dapat menunjukkan bentuk-bentuk pelanggaran etika yang teridentifikasi, yang diplotkan sesuai dengan skala frekuensi (probabilitas) dan skala dampak sebagai indikator untuk mengetahui status pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di Daerah penelitian saat ini, berdasarkan persepsi PPK dan Kontraktor. Matrik *Simple Heat Map Background*, ditunjukkan pada Gambar 1 Teknik Penyajian Hasil Status Pelanggaran Etika. Konsep matrik *Simple Heat Map Background* diadopsi dari (UN, 2013). Warna pada bidang matriks menunjukkan tingkat pelanggaran etika proyek konstruksi yang berbeda. Warna yang terdapat yaitu merah, kuning dan hijau yang masing-masing

menunjukkan interpretasi kategori pelanggaran etika proyek konstruksi yang tinggi, menengah, dan rendah.

Dampak	Besar (High)		X2	
	Sedang (Medium)	X1		X3
	Kecil (Low)			X4
		Kecil (Remote)	Cukup Mungkin (Possible)	Sangat Mungkin (Probable)
Frekuensi (probabilitas)				

X1, X2, X3, X4: Dimensi variabel penelitian

Gambar 1 Teknik Penyajian Hasil Status Pelanggaran Etika

Secara ringkas tahapan dalam pembahasan ini untuk mengkaji tiga hal, yaitu:

- Pertama: Mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian, dari persepsi PPK dan Kontraktor;
- Kedua: Menilai status saat ini praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah di Daerah penelitian, dilakukan melalui menghubungkan penilaian persepsi frekuensi dengan persepsi dampak dari bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika proyek konstruksi, dan melakukan uji Anova terhadap data penilaian persepsi dampak;
- Ketiga: Mengidentifikasi dan mendeskripsikan penyebab dan solusi untuk meminimalkan praktek pelanggaran etika proyek konstruksi pemerintah saat ini, di Daerah penelitian, dari persepsi responden penelitian dan responden ahli.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil identifikasi bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian menunjukkan, kedua kelompok responden, yakni PPK maupun kontraktor, telah menyetujui variabel penelitian yang diteliti bawasanya sebagai bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di pengadaan proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian. Hasil penilaian menunjukkan:

- Skor rata-rata terendah adalah 4.14 dengan kategori “Setuju Merupakan Pelanggaran Etika”, khusus untuk tanggapan rata-rata responden PPK atas variabel penyuapan, yaitu menyogok dalam bentuk uang tunai, benda berharga, dan biaya perjalanan.
- Sedangkan, tanggapan kedua kelompok responden, untuk variabel penelitian lainnya, berada pada rentang 4.20 – 5.00 dengan kategori “Sangat Setuju Merupakan Pelanggaran Etika”, yaitu untuk variabel penipuan, ketidakadilan dan manipulasi.

Hasil penelitian di atas, menunjukkan baik PPK maupun Kontraktor dengan pengalaman mereka sebagai pelaksana proyek konstruksi Pemerintah, di Daerah penelitian, telah merespon bahwa bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah diyakini terjadi dalam bentuk-bentuk praktek Penipuan, Ketidakadilan, Penyuapan, dan Manipulasi, sebagai praktek merugikan dan sebagai praktek tidak etis.

Tabel 1 Identifikasi Deskriptif Bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Pemerintah di Daerah penelitian dari Persepsi Pemerintah dengan Kontraktor

Persepsi “Kategori Pelanggaran” (KP) antara PPK dengan Kontraktor	Praktek pelanggaran Etika di Proyek Konstruksi Pemerintah Menurut “Kategori Pelanggaran”	Persepsi “Dampak” antara PPK dengan Kontraktor menurut “Kategori Pelanggaran”
Kesamaan Persepsi dalam Penilaian KP yang Tinggi	X1. Mengakali Material, X2. Mengakali Volume Material.	Kesamaan Persepsi: dapat berdampak pada “Mutu”
	X12. Menyogok dalam Bentuk Biaya Perjalanan; X17. Manipulasi Pendokumentasian Proyek.	Kesamaan Persepsi: dapat berdampak pada “Organisasi”
	X15. Manipulasi Pengawasan Proyek.	Perbedaan Persepsi: PPK menilai dapat berdampak pada “Organisasi” Kontraktor menilai dapat berdampak pada “Mutu”
Kesamaan Persepsi dalam Penilaian KP yang Menengah	X9. Tidak Adil dalam Informasi, X14. Manipulasi Informasi Proyek, X16. Manipulasi Keselamatan Kerja di Proyek.	Kesamaan Persepsi, yakni: dapat berdampak pada “Organisasi”
Perbedaan Persepsi dalam Penilaian KP: PPK Menilai Tinggi Kontraktor Menilai Menengah	X3. Mengakali Dokumen, X4. Mengakali Biaya, X5. Tidak Adil dalam Tender, X6. Tidak Adil dalam Negosiasi Kontrak, X7. Tidak Adil dalam Hubungan (terafiliasi), X8. Perselisihan Kepentingan, X10. Menyogok dalam Bentuk Uang Tunai	Kesamaan Persepsi yakni: dapat berdampak pada “Organisasi”
Perbedaan Persepsi dalam Penilaian KP: PPK Menilai Tinggi Kontraktor Menilai Menengah	X13. Manipulasi Pembayaran	Perbedaan Persepsi: PPK menilai dapat berdampak pada “Organisasi” Kontraktor menilai dapat berdampak pada “Mutu”
Perbedaan Persepsi dalam Penilaian KP: PPK Menilai Menengah Kontraktor Menilai Rendah	X11. Menyogok dalam Bentuk Barang Berharga	Kesamaan Persepsi yakni: dapat berdampak pada “Organisasi”

Hasil identifikasi persepsi penyebab terjadinya bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di Daerah (X), sebagai berikut: 1. tidak cukup pendidikan dan pelatihan etika profesional pengadaan proyek konstruksi pemerintah (43.75%); 2. Kompetisi tidak sehat di pengadaan proyek konstruksi (40.63%); 3. Arahkan (“negatif”) dari pemegang otoritas atau pimpinan organisasi (15.63%).

Hasil identifikasi persepsi solusi untuk meminimalkan bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika di proyek konstruksi pemerintah, di Daerah (X), sebagai berikut: 1. Memberdayakan program pendidikan, dan pelatihan etika profesional (59.38%); 2. Menegaskan regulasi dan penegakan hukum oleh pemerintah (31.25%); 3. Menerapkan sebuah bentuk kode etik profesional dalam pengadaan proyek konstruksi pemerintah (9.38%).

Solusi untuk meminimalkan bentuk praktek yang terkategori Pelanggaran Tinggi, membutuhkan respon aktif dari manajemen dengan melakukan kajian secara aktif, dan melakukan penanganan secara berkelanjutan, melalui: “Memberdayakan program pendidikan dan pelatihan etika profesional, untuk secara efektif menangani praktek pelanggaran etika proyek konstruksi pemerintah; dan perlunya peran media asosiasi jasa konstruksi dan instansi pemerintah yang berwenang, untuk mempromosikan bentuk masyarakat konstruksi yang profesional.” Solusi untuk meminimalkan bentuk praktek yang terkategori Pelanggaran Menengah, dengan membentuk sistem kontrol yang memadai, untuk terus memantau dan mengkonfirmasi status pelanggaran etika proyek konstruksi, yang dapat melalui: “Regulasi dan penegakan hukum oleh pemerintah; dan penerapan sistem kontrol atau pedoman operasional yang memadai dalam pelaksanaan pengadaan proyek konstruksi pemerintah.” Solusi untuk meminimalkan bentuk praktek yang terkategori Pelanggaran Rendah, memerlukan pemantauan untuk memastikan pelanggaran etika tidak meningkat diwaktu yang mendatang, yang dapat melalui: “Menekankan sebuah bentuk kode etik profesional dalam pengadaan proyek konstruksi pemerintah.”

Menurut responden ahli, adanya hasil perbedaan persepsi penilaian dampak untuk keempat variabel penelitian di bawah ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Praktek pengingkaran untuk berlaku seimbang terkait proses tawar menawar untuk membuat kontrak (perjanjian tertulis proyek), disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman terhadap tata cara pengadaan proyek konstruksi pemerintah; (2) praktek berselisih untuk mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum dalam pengadaan proyek konstruksi pemerintah, disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi terhadap arti keberpihakan kepada kontraktor lokal atau kontraktor dengan Gred kecil yang diamanatkan pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah. (3) Praktek tidak mengindahkan kewajiban dalam menyediakan informasi proyek, disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi terhadap pentingnya penanganan isu pembebasan lahan, dan keselamatan dan kesehatan kerja di pengadaan proyek konstruksi pemerintah. (4) Praktek tidak mengindahkan kewajiban dalam mengontrol (mengawasi dan memeriksa) proyek, disebabkan oleh adanya perbedaan tuntutan tugas, tanggung jawab dan kewenangan. PPK menilai dapat langsung berdampak pada organisasi, sebab harus memastikan agar hasil akhir proyek tepat harga, tepat mutu, tepat kuantitas, dan tepat waktu. Berbeda dengan kontraktor, kontraktor menilai dapat berdampak pada mutu, sebab kontraktor perlu fokus pada langkah-langkan yang dianggap memadai, untuk melindungi tempat kerja dan material bangunan, dan mengejar progress proyek.

KESIMPULAN

Penilaian deskriptif bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika proyek konstruksi pemerintah dan deskriptif penilaian frekuensi dan dampak, dari persepsi responden PPK dengan Kontraktor, mengungkapkan adanya kesamaan dan perbedaan persepsi. Adanya kesamaan dan perbedaan persepsi dikarenakan baik PPK maupun Kontraktor berada pada posisi tugas, tanggung jawab, dan pengalaman yang berbeda-beda. Masing-masing pihak (PPK mau pun Kontraktor) dalam berprofesi, dapat berada pada posisi yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi, sebabnya dapat menghasilkan intepretasi/persepsi yang berbeda. Maka perlu ada penekanan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah

dengan kontraktor, terhadap aspek manajemen tata kelola proyek konstruksi pemerintah, untuk menghindari praktek-praktek yang merugikan kedua belah pihak dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahzahar, N., Karim, N. A., & Eman, H. J. (2011). A Study of Contribution Factors to Building Failures and Defects in Construction Industry. *Procedia Engineering*, 249-255.
- Alias, Z., Baharum, Z. A., & Idris, M. F. (2012). Project Management Towards Best Practise. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 108-120.
- Aliza, A. H., Stephen, K., Trigunarsyah, & Bambang. (2011). The Importance of Project Governance Framework in Project Procurement Planning. *Procedia Engineering*, 1929-1937.
- Bredillet, C., Tywoniak, S., & Dwivedula, R. (2014). What is a Good Project Manager? An Aristotelian Perspective. *International Journal of Project Management*.
- Chang, W. (2011). Perlukah Etika Bisnis. *MaBis*.
- Guo, F., Richards, Y. C., Wilkinson, S., & Li, T. C. (2013). Effects of Project Governance Structures On the Management Of Risks in Major Infrastructure Projects: A Comparative Analysis. *International Journal of Project Management*.
- Hamimah, A., Hashim, N., Yusuwan, N. M., & Ahmad, N. (2012). Ethical Issues in the Construction Industry: Contractor's. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 719-727.
- Hutcheson, J. (1984). Educating Project Managers for the Construction Industry in Australia. *Project Management*.
- Janipha, N. A., & Ismail, F. (2013). Conceptualisation of Quality Issues in Malaysian Construction Environment. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 53-61.
- KBBI, K. (2015, 04 27). *Tentang KBBI daring*. Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <http://kbbi.web.id/>
- KPK Indonesia. (2014, Juni 30). *Penanganan TPK Berdasarkan Jenis Perkara*. Retrieved from <http://www.kpk.go.id>: <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-jenis-perkara>
- Malik, A. (2010). *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*. Indonesia: ANDI.
- Mason, J., & England. (2011). *Can a Single Code for Professionals Promote Ethical Improvement in the Construction Industry?* Marrakech, Morocco: Spatial Information Processing I.
- Mishra, P., Dangayach, G., & Mittal, M. (2011). An Ethical Approach Towards Sustainable Project SUCCESS. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 338-344.
- Mitkus, S., & Mitkus, T. (2014). Causes of conflicts in a construction industry: a communicational approach. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 777-786.
- Müller, R., & Lecoeuvre, L. (2014). Operationalizing Governance Categories of Projects. *International Journal of Project Management*.
- Nahod, M. M., Vukomanovic, M., & Radujkovic, M. (2013). The Impact of ICB 3.0 Competences on Project Management Success. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 244-254.
- Neu, D., Everett, J., & Rahaman, A. S. (2014). Preventing Corruption Within Government Procurement: Constructing the Disciplined and Ethical Subject. *Critical Perspectives on Accounting*.

- Nordin, R. M., Takim, R., & Nawawi, A. H. (2012). Transparency Initiatives (TI) in Construction: The Social Psychology of Human Behaviours. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 350-360.
- Pemerintah Daerah penelitian. (2006). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2006-2010*. Daerah X: Pemerintah Daerah (X).
- Pemerintah Daerah (X). (2014). *Profil Daerah (X)*. Daerah (X): Pemerintah Daerah (X).
- Perpres 70. (2012). *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Indonesia.
- PMBOK. (2013). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge*. Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299 USA: Project Management Institute, Inc.
- Pujianto, A. (2014, 9 September 4). *Ahmat Pujianto*. Retrieved from <http://fijaytrangki.blogspot.com/2014/09/penerapan-manajemen-risiko-dalam.html>: <http://fijaytrangki.blogspot.com/2014/09/penerapan-manajemen-risiko-dalam.html>
- Rahman, H. A., Wang, C., & Saimon, M. A. (2011). *Clients' Perspectives of Professional Ethics for Civil Engineers*. Malaysia: Journal of the South African Institution of Civil Engineering.
- Richea, M. M. (2013). Management Ethical Principles and Ethical Behaviour in the Non-profit Organisations. Shaping a Causal Liaison or a Myth? *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 789-798.
- Riduan. (2011). *Dasar-dasar Statistika*. Bandung: ALFABETA.
- Satiadarma, M. P. (2004). Pendidikan Kreativitas ataukah Pendidikan Moral. *Provita*.
- Silaen, S., & Widiono. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: IN MEDIA.
- Sumanto. (2009). *STATISTIK DESKRIPTIF*. Yogyakarta: CAPS.
- Susanto, H., & Makmur, H. (2013). *Auditing Proyek-proyek Konstruksi*. Jambi: ANDI.
- Takim, R., Shaari, S. M., & Nordin, R. M. (2013). Transparency Initiative (TI) for Enhancing Quality of Life: Behavioural components that lead to corruption in construction. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 110-119.
- Tao, G., & Jingjing, W. (2011). A Study of the Owner's Commission Model and Incentive Contract Based on Principal-Agent Relationship. *Systems Engineering Procedia*, 399-405.
- Too, E. G., & Weaver, P. (2013). The Management of Project Management: A Conceptual Framework for Project Governance. *International Journal of Project Management*.
- Tota, I., & Shehu, H. (2012). The Dilemma of Business Ethics. *Procedia Economics and Finance*, 555-559.
- Trivellas, P., & Drimoussis, C. (2013). Investigating Leadership Styles, Behavioural and Managerial Competency Profiles of Successful Project Managers in Greece. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 692-700.
- UN Global Compact. (2013). *A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment*. Two United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA: United Nations Global Compact Office.
- UN, G. C. (2013). *A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment*. Two United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA: United Nations Global Compact.
- Undang-undang Nomor 18. (1999). *Jasa Konstruksi*. Indonesia.



SEMINAR TESIS

JUDUL TESIS:

**IDENTIFIKASI PELANGGARAN ETIKA PROYEK KONSTRUKSI DALAM
LINGKUP PROYEK KONSTRUKSI PEMERINTAH DAERAH (X).
TINJAUAN DARI PERSPEKTIF: PEMERINTAH DAN KONTRAKTOR**

OLEH:

**Hansen Thomas Yarisetouw
NRP: 9112202812**

Latar Belakang Penelitian

- Pengaturan di bidang jasa konstruksi harus berdasarkan azas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, dan keamanan dan keselamatan (Undangundang Nomor 18, 1999)
- Berdasarkan data dari buku saku APBN dan indikator ekonomi kementerian keuangan diketahui bahwa belanja pemerintah disektor infrasturktur dari tahun 2005 (Rp 23.7 Triliun) sampai dengan tahun 2011 (Rp 123.8 Triliun) mengalami peningkatan cukup signifikan (Susanto & Makmur, 2013).
- Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 30 Juni 2014, KPK telah melakukan penanganan korupsi yang sebagiannya dari jenis perkara korupsi pengadaan barang/jasa sebanyak 7 kasus.

Latar Belakang Penelitian

- Tabulasi Data Penanganan Korupsi dari Tahun 2004-2014 per 30 Juni 2014 untuk pengadaan barang/jasa sebanyak 120 kasus, yang adalah peringkat kedua dari banyaknya jenis kasus. Peringkat pertama adalah kasus penyuapan sebanyak 175 kasus (KPK Indonesia, 2014). Dan,
- Temuan dari penelitian yang dilakukan di negara-negara lain seperti, Malaysia (Hamimah, Hashim, Yusuwan, & Ahmad, 2012) dan (Rahman, Wang, & Saimon, 2011), India (Mishra, Dangayach, & Mittal, 2011), Rumania (Richea, 2013), Yunani (Trivellas & Drimoussis, 2013) memberikan bukti bahwa praktek di proyek konstruksi terkendala dengan masalah etika.

Latar Belakang Penelitian

- Salah satu ancaman dalam analisis lingkungan pemerintah Daerah (X) adalah masih berkembangnya nuansa KKN dalam sendi-sendi kehidupan

bangsa dan negara, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Pemerintah Daerah (X), 2006).

Perumusan Masalah Penelitian

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti adalah:

- Apa sajakah bentuk-bentuk praktek pelanggaran etika proyek konstruksi pemerintah, dan bagaimana frekuensi dan dampak dari praktek pelanggaran etika proyek konstruksi pemerintah saat ini, di Daerah (X)?
- Apa penyebab dan solusi untuk meminimalkan praktek pelanggaran etika proyek konstruksi pemerintah saat ini, di Daerah (X)?

Perumusan Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi serta mendeskripsikan masing-masing persepsi pemerintah dan kontraktor, terhadap bentuk-bentuk praktek

pelanggaran etika proyek konstruksi, dan mengetahui penilaian responden terhadap frekuensi dan dampak praktek pelanggaran etika proyek konstruksi pemerintah saat ini, di Daerah (X).

- Mengetahui dan mendeskripsikan persepsi keseluruhan responden, terhadap penyebab dan solusi untuk meminimalkan praktek pelanggaran etika proyek konstruksi pemerintah saat ini, di Daerah (X).

Perumusan Batasan Penelitian

Batasan Penelitian

- Ukuran pelanggaran etika pada penelitian ini sebagai bentuk perilaku yang tidak etis (professional) atau melakukan perbuatan yang salah dan dilakukan dengan sengaja, serta berulang di dalam pelaksanaan proyek konstruksi.
- Lokasi penelitian dibatasi pada daerah di Daerah (X).
- Lingkup proyek konstruksi pada penelitian ini adalah proyek konstruksi pemerintah yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2012- 2014 (saat ini).
- Pembahasan penelitian ini tentang mendeskripsikan persepsi responden terhadap praktek pelanggaran etika, penyebab, dan solusi untuk meminimalkan praktek

pelanggaran etika proyek konstruksi dalam lingkup proyek konstruksi pemerintah, di Daerah (X) saat ini.

- Permasalahan pelanggaran etika proyek konstruksi pemerintah di Daerah (X), di lihat dari sudut pandang (persepsi) pemerintah (PPK) dan penyedia jasa (Kontraktor).
- Penyedia jasa dibatasi pada Kontraktor yang memiliki kualifikasi Gred 5 dan 6.

Konsep dan Model Riset

- Posisi penelitian: Konstruktif atau mendukung penelitian terdahulu.
 - Jenis penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.
- Teknik analisis data: Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode analisis statistik deskriptif, untuk menarik kesimpulan dari data penelitian yang diperoleh.
- Pengumpulan data: Penelitian ini menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner berjenis pertanyaan tertutup dan wawancara terstruktur.

- Validitas dan reliabilitas: Pengujian validitas menggunakan uji Pearson Product Moment. Pengujian reliabilitas menggunakan uji Alpha Cronbach.

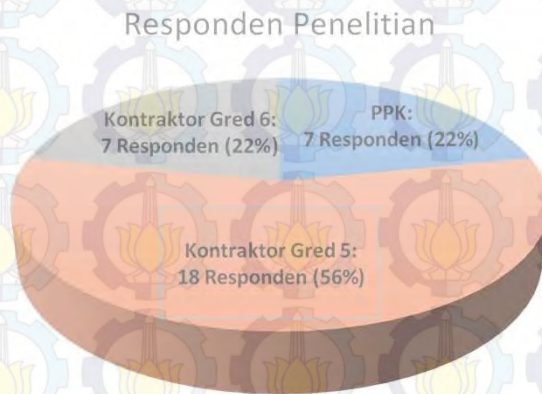
Konsep dan Model Riset

Metode dan Teknik Pengambilan Sampel

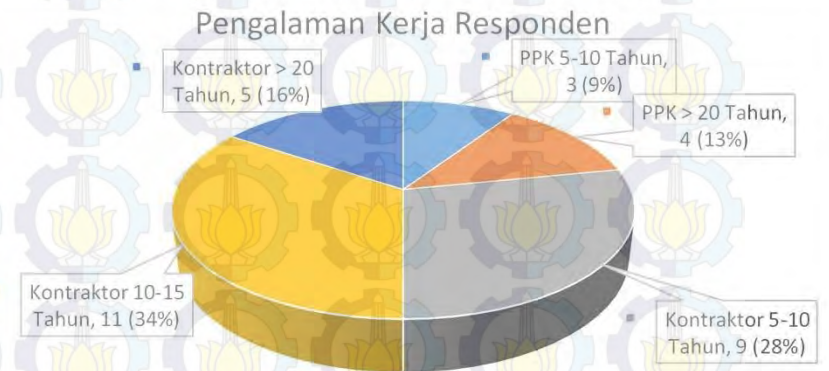
- Pengambilan atau penarikan sampel menggunakan, teknik sampel bertujuan (*Purposive sampling*) untuk mendapatkan sampel responden pemerintah dan responden ahli, dan teknik sampel acak sederhana (*Simple random sampling*) untuk mendapatkan sampel responden kontraktor. Menentukan jumlah sampel responden kontraktor menggunakan rumus Slovin.

Konsep dan Model Riset

Responden Penelitian



Gambar 4.1 Jumlah Responden Penelitian



Gambar 4.1 Pengalaman Kerja Responden PPK dan Kontraktor

Konsep dan Model Riset

Tipe Skala Pengukuran Data

- Jenis skala pengukuran data menggunakan skala Likert, untuk mengukur penilaian persepsi tingkat persetujuan, dampak, dan frekuensi.

Tingkat Persetujuan	Persepsi Dampak	Persesi Frekuensi	Nilai
Sangat Setuju	Sangat Tidak Berdampak	Sangat Sering	5
Setuju	Tidak Berdampak	Sering	4
Cukup Setuju	Cukup Berdampak	Cukup Sering	3
Tidak Setuju	Berdampak	Jarang	2
Sangat Tidak Setuju	Sangat Berdampak	Sangat Jarang	1

Konsep dan Model Riset

Teknik Analisis dan Penyajian Data

- Hasil statistik deskriptif yaitu dengan menunjukkan nilai minimum (*min*), maksimum (*max*), nilai rata-rata (*mean*), dan deviasi standar (*std. dev*) dari observasi variabel penelitian. Hasil olah data dalam bentuk statistik deskriptif disajikan dalam bentuk tabel dan gambar (matriks).

- Mengkomunikasikan hasil penelitian hubungan antara persepsi tingkat frekuensi pelanggaran etika dan dampak pelanggaran etika proyek konstruksi digunakan matriks *Simple Heat Map Background*.

Konsep dan Model Riset

Matriks *Simple Heat Map Background*

Dampak	Besar (High)		X2	
	Sedang (Medium)	X1		X3
	Kecil (Low)			X4
		Kecil (Remote)	Cukup Mungkin (Possible)	Sangat Mungkin (Probable)
		Frekuensi (probabilitas)		

X1, X2, X3, X4: Dimensi variabel penelitian

Gambar 3.1 Teknik Penyajian Hasil Status Pelanggaran Etika

Konsep dan Model Riset

- Metode untuk memperoleh jawaban penyebab pelanggaran etika, dan solusi untuk meminimalkan praktek pelanggaran etika proyek konstruksi pemerintah di Daerah (X), yakni dengan mengajukan pertanyaan berupa draft wawancara kepada semua para responden, pada penelitian ini berjumlah 32 responden.
- Uji Anova pada penelitian ini, dilakukan untuk mengkaji apakah ada perbedaan persepsi antara PPK dengan Kontraktor, dari rata-rata penilaian persepsi dampak pelanggaran etika. Hasilnya untuk setiap variabel yang terdapat perbedaan persepsi, akan dijelaskan mengapa terdapat perbedaan persepsi. Untuk menjelaskan mengapa terdapat perbedaan, akan dimintai keterangan tambahan dari responden ahli.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk-bentuk Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Pemerintah

- Skor rata-rata terendah adalah 4.14 dengan kategori “Setuju”, khusus untuk tanggapan rata-rata responden PPK atas variabel penyyuapan, yaitu menyogok dalam bentuk uang tunai, benda berharga, dan biaya perjalanan.
- Sedangkan, tanggapan kedua kelompok responden, untuk variabel penelitian lainnya, berada pada rentang 4.20 – 5.00 dengan kategori “Sangat Setuju”, yaitu untuk variabel penipuan, ketidakadilan dan kelalaian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Identifikasi Status Saat Ini Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Pemerintah

- PPK mau pun Kontraktor sepakat bahwa praktek-praktek dengan pelanggaran yang tinggi, yaitu:
- Praktek mengganti dan memasang material bangunan konstruksi yang kualitas material bangunan tidak sesuai, dengan yang dipersyaratkan di dalam dokumen pengadaan proyek, yang dapat berdampak pada mutu proyek bangunan konstruksi.
- Praktek mengurangi volume material bangunan konstruksi (volume material yang terpasang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam dokumen pengadaan proyek), yang dapat berdampak pada mutu proyek bangunan konstruksi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Identifikasi Status Saat Ini Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Pemerintah

- Penyedia jasa proyek konstruksi (kontraktor) mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pihak pemberi pekerjaan (pemerintah), dengan memberi fasilitas dalam bentuk biaya perjalanan, untuk menguasai proyek konstruksi pemerintah, sehingga diharapkan memberi keuntungan bagi pihak-pihak tersebut, yang bertentangan dengan pedoman pengadaan proyek konstruksi pemerintah, yang dapat berdampak pada organisasi masing-masing responden (Pemerintah mau pun Kontraktor).
- lalai dalam mendokumentasikan semua rancangan gambar, dokumen laporan proyek, dan dokumen lain baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy, yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan proyek konstruksi pemerintah, yang dapat berdampak pada organisasi masing-masing responden (Pemerintah mau pun Kontraktor).

Hasil dan Pembahasan

- Penyebab praktek pelanggaran etika proyek konstruksi pemerintah

Persepsi Penyebab pelanggaran etika proyek konstruksi	Prosentase	Peringkat
Tidak cukup pendidikan dan pelatihan etika profesional pengadaan proyek konstruksi pemerintah.	43.75%	1
Kompetisi tidak sehat di pengadaan proyek konstruksi.	40.63%	2
Arahan (negatif) dari pemegang otoritas (pimpinan organisasi).	15.63%	3

Hasil dan Pembahasan

Solusi Meminimalkan Praktek Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi Pemerintah

Persepsi Solusi untuk Meminimalkan Pelanggaran Etika Proyek Konstruksi	Prosentase	Peringkat
--	------------	-----------

Memberdayakan program pendidikan, dan pelatihan etika profesional.

59.38%

1

Menegaskan regulasi dan penegakan hukum oleh pemerintah.

31.25%

2

Menerapkan sebuah bentuk kode etik profesional dalam pengadaan proyek konstruksi pemerintah.

9.38%

3

Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Anova

Uji Anova menunjukkan, dari ketujuh belas variabel penelitian terdapat empat variabel penelitian yang memiliki perbedaan persepsi antara PPK dengan Kontraktor, terhadap deskriptif rata-rata penilaian dampak. Perbedaan tersebut untuk variabel:

- (X6) Ketidakadilan dalam negosiasi kontrak;
- (X8) Perselisihan kepentingan;

- (X14) Lalai memberi informasi; dan
- (X15) Lalai mengawasi proyek.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- Adanya kesamaan dan perbedaan persepsi dikarenakan baik PPK maupun Kontraktor berada pada posisi tugas, tanggung jawab, dan pengalaman yang berbeda-beda. Masing-masing pihak (PPK mau pun Kontraktor) dalam berprofesi, dapat berada pada posisi yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi, sebabnya dapat menghasilkan intepretasi/persepsi yang berbeda.

Saran

- Perlu ada kesamaan persepsi antara pemerintah dengan kontraktor, terhadap aspek manajemen - tata kelola proyek konstruksi pemerintah, untuk menghindari praktek-praktek yang merugikan kedua belah pihak dan negara.



Terima Kasih